

345.081
FOL
K C



**KEBIJAKAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK MELALUI SANKSI
PIDANA KERJA SOSIAL DALAM RANGKA PEMBAHARUAN
HUKUM PIDANA ANAK INDONESIA**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :

ERICH FOLANDA, SH

NIM : B4A 000 269

PEMBIMBING :

PROF. DR. H. BARDA NAWAWI ARIEF, SH

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

**KEBIJAKAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK MELALUI SANKSI
PIDANA KERJA SOSIAL DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM
PIDANA ANAK INDONESIA**

Disusun Oleh :

ERICH FOLANDA, SH

NIM : B4A 000 269

Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal : **23 Maret 2004**

Tesis Ini Telah Diterima
Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Magister Ilmu Hukum

Mengetahui

Pembimbing



Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, S.H.
NIP. 130 350 519

Mengetahui

Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, S.H.
NIP. 130 350 519

ABSTRAK

Tujuan pemidanaan terhadap anak harus disesuaikan dengan keperluan dan kebutuhan anak tersebut demi masa depannya karena anak memiliki ciri-ciri yang khusus yang melekat pada dirinya yang tidak dapat disamakan dengan pelaku dewasa. Perkembangan pemikiran dari tujuan pemidanaan pada saat ini yang lebih cenderung bersifat *restorative* membawa konsekuensi logis terhadap penerapan jenis pidana, terutama setelah banyaknya kritik tentang aspek negatif dari pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kerja sosial merupakan salah satu dari pidana alternatif perampasan kemerdekaan atau penjara. Oleh karena itu dikaitkan dengan perkembangan teori di atas, maka perlu diadakan reformulasi yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berlaku sekarang ini.

Permasalahan yang muncul adalah sejauhmanakah ide pidana kerja sosial ini sesuai atau menunjang tujuan pemidanaan dan pembinaan terhadap terpidana anak, serta bagaimanakah konsep pengaturan sanksi pidana kerja sosial terhadap terpidana anak di Indonesia.

Untuk menjawab permasalahan di atas, metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis bersifat normatif dengan menggunakan sumber data yang bersifat sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan serta dengan metode komparasi yang dilakukan terhadap beberapa peraturan negara lain guna menjawab permasalahan yang ada.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan pemidanaan terhadap anak melalui sanksi pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) sangat relevan dengan tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana anak tersebut, karena pidana kerja sosial dapat memberikan perlindungan secara integratif antara perlindungan masyarakat dan individu, dan mempermudah proses pembinaan dengan menjauhkan hal negatif yang di dapat jika dilakukan dalam penjara seperti stigmatisasi ataupun dehumanisasi. Pengaturan pidana kerja sosial terhadap anak di Indonesia akan ada dalam konsep Rancangan KUHP-Baru (RKUHP) yang tercantum dalam Pasal 109 ayat (1) yang diterapkan sebagai pidana pokok dengan syarat.

Pengaturan sanksi pidana kerja sosial terhadap terpidana anak ini di masa yang akan datang dapat diterapkan dan tidak bertentangan dengan konsep dasar dari Pemasyarakatan yang telah ada, tetapi masalah batasan umur pengenaan pidana kerja sosial ini terhadap anak akan dapat menjadi kendala karena tidak secara tegas disebutkan dalam RKUHP. Batasan umur anak lebih baik disesuaikan dengan keadaan psikologis anak, terutama menyangkut tanggung jawab anak dalam melakukan pekerjaan. Pidana kerja sosial erat kaitannya dengan masalah fasilitas, sarana dan prasarana tempat bekerja yang memadai, oleh karena itu harus telah dipersiapkan sebelumnya, terutama terhadap petugas pengawasan yang mengawasi dan membina terpidana yang melaksanakan pidana kerja sosial ini, serta tentunya aparat penegak hukum yang profesional dan memahami tujuan pidana kerja sosial terhadap anak.

Kata Kunci : Tujuan pemidanaan, pidana kerja sosial anak.

ABSTRACT

The purpose of sentencing to a juvenile delinquency must be adjusted with the requirement and necessity of their future, due to the unique characteristics that may not be discovered in a grown-up person. The present development of the purpose of punishment theory that has more restorative tendency leads logical consequences through the implementation of the types of punishment, particularly following to cautious judgements on the negative aspects of imprisonment (seizures of freedom). Social Service (punishment) has become one alternative for imprisonment. Therefore, in relation to the above theoretical development, implementation of the existing criminal punishment to a convicted juvenile shall be reformed.

Issues arise related to this matter are as to whether the Social Service is in accordance with or supporting the purposes of punishment and development of the convicted juvenile and the controlling concept of the Social Service to a convicted juvenile in Indonesia.

In order to resolve the above issues, the author applied a Normative Research Methodology by means of secondary source of data that are obtained from various literatures, and Comparative Methodology that was conducted through several relevant regulations from other countries.

Based on the result of the conducted research, it can be concluded that the policy regarding punishment to convicted juvenile by means of Social Service, as the alternative for imprisonment, is relevant to the purpose of punishment to a convicted juvenile. The reason for the above conclusion is that the Social Service provides an integrated protection between community and individual and simplification of controlling process by avoiding the negative effects of the imprisonment, which are stigmatization and dehumanization. With regard to the provision related to the Social Service for a convicted juvenile, it has been stipulated in Article 109, paragraph (1) of the draft of the new Indonesian Criminal Code, which is stated as a conditional principle punishment.

The role of the Social Service for a convicted juvenile may be implemented in the future time and it will not contradicted with the basic concept of the existing Socialization (*Pemasyarakatan*). However, age limitation will become an issue in view of the fact that this matter has not been clearly regulated in the draft of the new Indonesian Criminal Code. In view thereof, it is advisable that the provision related to age limitation shall also be adjusted with the juvenile psychological situation, particularly related to the responsibility of the juvenile in conducting the Social Service. In addition, the Social Service is also connected with facility, structure and infrastructure issues that has to be priory prepared, particularly related to the understanding of the purpose of the Social Service for a convicted juvenile by a professional law enforcement officer who will supervise and control the implementation of the Social Service.

Key Word : Purpose of punishment, Community service order for juvenile punishment

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir di bidang studi Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang berjudul **KEBIJAKAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK MELALUI SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA ANAK INDONESIA.**

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang dalam kepada:

1. Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, S.H., selaku pembimbing dalam penulisan tesis ini dan sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum (S2) Universitas Diponegoro untuk bantuan tak terhingga bagi kelancaran Program Kerjasama Kejaksaan RI dan UNDIP;
2. Para Guru Besar dan dosen yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan S2 di Universitas Diponegoro, khususnya kepada Dr. Paulus Hadisuprpto, S.H., M.H., dan Eko Soponyono, S.H., M.H. atas bantuan serta saran kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini. ;
3. Jaksa Agung R.I. beserta para Jaksa Agung Muda pada Kejaksaan Agung R.I., Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, para Asisten dan Kepala Bagian Tata Usaha beserta Staf;
4. Staf Tata Usaha pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro;

5. Orang tua Penulis, Emak Hj. Nani dan Babeh Buchari Syamsi atas ridho dan doanya yang ikhlas, juga untuk kakak dan adik Penulis : Adnan Taufik, SE. beserta istri Yayuk, Nyimas Hariyani beserta suami (Alm.) Tjatur Sudarmanto, Nyimas Hariyanti beserta suami Imam Sutrisno, Bambang Aryanto, SE., Aldi Kuswandi Rachman, SH, CN., dan Nyimas Riana T.S., SE. beserta suami Muhammad Reza, S.T.;
6. Istri Penulis yang terkasih, Nely Yunia Dewi, drg. untuk semangat, dorongan, cinta dan doanya serta untuk anakku Quinnashya Pradipta Early Folanda;
7. Rekan-rekan kelas khusus Kejaksaan Angkatan 2001 untuk kebersamaan dan dorongannya, rekan-rekan alumni FH UNPAD Angkatan 1993, khususnya Mbak Ekawati, Kang Gusman CS, juga Tete Widati untuk informasi dan bahan-bahan tesisnya, serta rekan-rekan Alumni SMUN 38 Jakarta, khususnya Ahmad Nurul Amri dan Medio (UNDIP), dan tidak lupa juga untuk Mbak Vica Risanty.

Pada kesempatan ini penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, karena itu penulis menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan tesis ini.

Akhirnya penulis berharap agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum Indonesia.

Semarang, Maret 2004

ERICH FOLANDA, SH

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Abstrak	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Maksud Dan Tujuan Penelitian	9
D. Kontribusi Penelitian	9
E. Kerangka Teoritis	10
F. Metode Penelitian	21
1. Objek dan Fokus yang diteliti	21
2. Metode Pendekatan Penelitian	23
3. Jenis dan Sumber Data	24
a. Jenis Data	24
b. Sumber Data	25
4. Teknik Pengumpulan Data	25
5. Analisis Data	26
G. Sistematika Penulisan	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Pidana dan Tujuan Pemidanaan	29
1. Pengertian Pidana dan Fungsinya dalam Politik Kriminal	30
2. Teori-Teori Tentang Tujuan Pemidanaan	37
2.1. Tujuan Penjatuhan Pidana	37
2.2. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Anak	51
B. Masalah Pidana Penjara dan Sistem Pemasyarakatan	65

	Hal .
C. Masalah Pidana Kerja Sosial	77
1. Pengertian dan Perkembangan Pidana Kerja Sosial	79
2. Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif dari Pidana Penjara ...	85
D. Perlindungan Hukum Anak dalam Proses Pidana	88
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	99
A. Ide Dasar Pidana Kerja Sosial dalam Menunjang Tujuan Pemidanaan dan Pembinaan Terhadap Terpidana Anak	99
1. Tujuan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak ...	102
2. Kebijakan Pemidanaan Terhadap Anak Melalui Pidana Kerja sosial	115
2.1. Pidana Kerja Sosial Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan Anak	115
2.2. Pembinaan Terhadap Anak Melalui Pidana Kerja Sosial	135
B. Kebijakan Pengaturan Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Terpidana Anak di Indonesia	167
1. Upaya Penerapan Pidana Kerja Sosial Terhadap Terpidana Anak Di Indonesia dan Di Beberapa Negara Lain	167
1.1. Pidana Kerja Sosial Menurut Beberapa KUHP Asing	172
a. Portugal	172
b. Denmark	177
c. Perancis	179
d. Republik Czech	182
e. Inggris	183
f. Amerika Serikat	185
g. Mauritius	189
h. Belanda	191
1.2. Pidana Kerja Sosial Menurut Rancangan KUHP Indonesia	201
2. Prospek Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Anak Indonesia	208

	Hal .
BAB IV PENUTUP	223
A. Kesimpulan	223
B. Saran	225

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan masyarakat dunia yang semakin maju sekarang ini yang beriringan pula dengan perkembangan kejahatan yang semakin canggih dan para pelakunya tidak saja oleh orang dewasa tetapi juga oleh anak-anak, perkembangan pertumbuhan masyarakat yang tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi serta penataan wilayah yang baik dan analisis terhadap dampak dari pembangunan yang sering dikesampingkan oleh pemerintah membuat semakin sulitnya sebagian besar masyarakat untuk hidup layak sebagaimana mestinya. Hal ini pun dirasakan juga oleh anak-anak, himpitan permasalahan yang kebanyakan adalah masalah ekonomi keluarga, kemajuan teknologi dan informasi yang diserap oleh anak-anak tanpa ada pengawasan dari orang tua, membuat anak-anak terutama bagi mereka yang hidup di wilayah perkotaan semakin bingung dalam menemukan jati dirinya.

Perbuatan menyimpang dari adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakatpun akhirnya dilakukan oleh sebagian besar anak-anak, terutama bagi mereka yang hidup di kota-kota besar. Dari perbuatan sebatas kenakalan remaja yang akhirnya menjurus pada perbuatan kriminal yang membutuhkan penanganan hukum secara serius. Banyak dari para pengamat sosial menyatakan bahwa kejahatan tersebut semakin

muncul dan merajalela dikarenakan faktor ekonomi yang semakin memburuk. Padahal kemajuan ekonomi dalam perkembangan masyarakat yang sesungguhnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatpun, ternyata tidak melenyapkan kejahatan dengan sendirinya. **Howard Jones** mengemukakan bahwa justru seolah-olah kemajuan tersebut disertai secara membandel oleh kemajuan dari aktivitas kejahatan, bahkan dapat dikatakan bahwa kemajuan ekonomi itu sendiri merupakan biang dari perkembangan kejahatan.¹

Pemerintah selalu berupaya memujudkan kesejahteraan masyarakat agar tercipta suasana aman, tentram dan makmur seperti yang tersirat dalam tujuan nasional bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alenia IV yakni mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. Hal tersebut mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat baik individu maupun kelompok, baik individu yang sudah dewasa maupun yang masih anak-anak yaitu perlindungan terhadap perkembangan anak-anak dengan mencantumkan ketentuan Pasal 28B Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

¹ Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 32.

Perlindungan yang diberikan terhadap anak harus diberikan secara menyeluruh, tidak hanya pada saat anak-anak hidup dalam keadaan normal, yaitu menjalani kehidupan seperti anak-anak lainnya yang hidup dalam suatu keteraturan seperti ke sekolah, bermain dan lain sebagainya yang mendapat pengawasan dari orang tua dan masyarakat secara langsung. Terhadap anak-anak yang sedang bermasalah dengan hukum pun harus diperhatikan oleh pemerintah, dengan membuat suatu aturan yang dapat memberikan perlindungan dan arahan kepada anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Apa yang dilakukan oleh seorang anak pada saat ia menjalani suatu hukuman pidana, haruslah diupayakan apa yang dia dapat dari pembedaan tersebut menjadi sesuatu hal yang dapat mendukung perkembangan seorang anak ke arah yang lebih baik dan berguna bagi dirinya.

Dalam ketetapan pemerintah melalui Undang Undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), disebutkan pula bahwa arah kebijakan pemerintah, khususnya di bidang penegakan hukum, termasuk pula di dalamnya masalah pembaharuan hukum dan kebijakan terhadap masalah sistem pembinaan para warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut memperlihatkan keinginan pemerintah di masa yang akan datang untuk memperbaiki sistem pembinaan para narapidana dan tentunya melalui pembaharuan perundang-undangan dalam penerapan sanksi pidana bagi para pelaku kejahatan, baik dewasa maupun anak-anak.

Perkembangan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak atau remaja, telah mendorong negara-negara di dunia untuk membuat perundang-undangan khusus bagi mereka, karena seharusnya aturan hukum terhadap anak-anak dibedakan dengan orang dewasa pada umumnya.

Sistem pemidanaan yang baik yang dapat diterapkan bagi para pelaku tindak pidana oleh anak-anak sudah saatnya disesuaikan dengan perkembangan jaman dengan melihat bahwa seorang anak adalah harapan masa depan bangsa dan dalam masa proses pertumbuhan yang harus dibina dan dibimbing secara baik agar dapat berguna kelak di dalam masyarakat. Melakukan perbandingan dengan negara lain ataupun didasarkan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah disepakati dapat dijadikan bahan bagi para pembuat kebijakan, dalam hal ini badan legislatif dalam membentuk suatu perundang-undangan tentang kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak tersebut.

Dalam pertimbangan resolusi Kongres PBB ke-6 Tahun 1980 mengenai *"crime trends and crime prevention strategies"* salah satunya dikemukakan bahwa :

"The crime problem impedes progress towards the attainment of an acceptable quality of life for all people"

(masalah kejahatan telah merintangi kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang).²

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 11.

Dalam resolusi tersebut, PBB mengimbau kepada seluruh negara-negara anggotanya supaya mengambil tindakan dalam kekuasaan mereka untuk menghapus kondisi-kondisi kehidupan yang menurunkan martabat kemanusiaan dan menyebabkan kejahatan.

Terhadap masalah kejahatan yang terjadi pada masing-masing negara, PBB meminta perhatian khusus terhadap kecenderungan dimensi perkembangan kejahatan. Dalam Kongres PBB mengenai *The Prevention of crime and the Treatment of Offenders*, khususnya pada kongres ke-5 Tahun 1975 di Geneva, salah satu masalahnya ditekankan pada perbuatan kekerasan antara perorangan (*inter personal violence*), khususnya di kalangan remaja/anak-anak.³

Seluruh segi struktur sosial kita pada dasawarsa terakhir ini juga dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang dahsyat disertai dengan munculnya problema-problema baru dalam masyarakat. Tetapi, walaupun demikian kehidupan masyarakat sedikit banyaknya harus tetap berjalan dengan tertib dan teratur dengan didukung oleh adanya suatu tatanan. Sub-sub tatanan itu adalah : kebiasaan, hukum dan kesusilaan,⁴ maka kehidupan anak-anak pun seyogianya diarahkan pada teladan yang mereka perlu dapatkan dari masyarakat itu sendiri.

Pada tahun 1989, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah mengesahkan Konvensi Hak Anak pada tanggal 20 November 1989, maka gerakan perlindungan dan penegakan hak-hak anak makin gencar

³ Ibid, hal. 16

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 14.

dilakukan keseluruh dunia. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional sekaligus anggota PBB telah meratifikasi Konvensi Hak Anak tersebut pada tahun 1990 dengan mengeluarkan Keputusan Presiden R.I. Nomor : 36 Tahun 1990. Terhadap ratifikasi konvensi tersebut maka pemerintah Indonesia berkewajiban menegakkan hak-hak anak dalam hukum anak dan program-programnya untuk anak. **Maiyasyak Johan** dari Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LAAI) mengemukakan bahwa semua pihak menyetujui peranan anak (*role of the child*) adalah sebagai harapan masa depan, sebagaimana komitmen politik pemerintah dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).⁵

Praktik perlakuan salah terhadap anak (*child abuse*) melalui kebijakan serta hukum yang tidak pro terhadap hak anak, dan perlakuan aparaturnya penegak hukum yang dalam praktek penegakan hukum anak cenderung memidana anak dengan tidak memberikan kesempatan yang lebih baik kepada anak yang sedang menjalani pemidanaan dengan mengabaikan hak-hak anak seperti penempatan dalam lembaga pemasyarakatan yang tidak memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak secara menyeluruh seperti pendidikan dan pelatihan kemampuan diri (*Skill*) yang tentunya dapat bermanfaat bagi diri anak-anak tersebut ketika mereka telah selesai menjalani hukuman.

Terpidana anak di Indonesia seringkali penanganannya disamakan dengan orang dewasa dengan memasukan anak ke penjara walaupun

⁵ Kata sambutan dalam bukunya : Muhamad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999.

sebenarnya dalam Undang Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, penjatuhan sanksi pidana pokok tidak hanya pidana penjara atau kurungan, tetapi juga ada pidana denda dan pidana pengawasan. Di samping pidana pokok tersebut ada pula sanksi pidana berupa tindakan, tetapi hakim kadangkala jarang menjatuhkan pidana di luar pidana pokok yaitu pidana penjara. Padahal dalam salah satu pasal yang terdapat pada Beijing Rules yaitu Pasal 19 dikemukakan bahwa penempatan pada lembaga pemasyarakatan atau penjara bagi anak adalah pilihan yang terakhir (*the last resort*).

Oleh karena itu penanggulangan pembinaan terhadap anak-anak yang bermasalah dengan hukum pidana diupayakan melalui pembaharuan hukum pidana, khususnya yang menyangkut hukum pidana anak terutama masalah sanksi pidana berupa penjara dengan maksud untuk meneguhkan tatanan, sistem dan konstruksi struktural yang berpihak pada anak/hak-hak anak, sehingga sekembalinya anak-anak yang bermasalah setelah menjalani hukumannya ke masyarakat menjadi manusia yang lebih berguna dengan memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat sekitar. Upaya ini sejalan dengan upaya reformasi hukum yang mengikis tesis hukum yang *eksploitatif-destruktif* terhadap anak.

Hal tersebut mulai diwujudkan oleh pemerintah melalui Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (baru) yang sampai saat ini masih dalam pembahasan tim pembuat rancangan tersebut. Dalam Pasal 109

ayat (1) huruf b dinyatakan bahwa salah satu pidana pokok bagi anak yaitu pidana dengan syarat yang salah satunya adalah pidana Kerja Sosial. Pidana Kerja Sosial ini dapat dijatuhkan terhadap anak dengan memperhatikan beberapa kriteria yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pidana Kerja Sosial ini merupakan suatu bentuk pemidanaan baru dalam hukum pidana Indonesia. Segala bentuk pro dan kontra tentang pidana Kerja Sosial ini, terutama terhadap terpidana anak pastinya akan menimbulkan pro dan kontra, mengingat bentuk dari penerapan sanksi pidana Kerja Sosial ini belum pernah ada sebelumnya, serta sistem pembinaan bagi para narapidana khususnya narapidana anak dalam lembaga pemasyarakatan selama ini dirasakan kurang memuaskan dan akhir-akhir ini sering mendapat sorotan masyarakat melalui media massa seperti yang tertulis dalam Surat Kabar *Pikiran Rakyat* yang mengkritisi masalah nasib anak-anak penghuni Rutan di Lampung.⁶

Sehubungan dengan dasar pemikiran tersebut di atas, maka peneliti mengambil judul penelitian tentang **"Kebijakan Pemidanaan Terhadap Anak Melalui Sanksi Pidana Kerja Sosial Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Anak Indonesia"**.

B. Permasalahan

Dari uraian pendahuluan di atas, penulis mencoba untuk merumuskan dan kemudian mencoba mengkaji lebih lanjut mengenai

⁶ Harian *Pikiran Rakyat*, *Nasib Anak-anak di Lampung yang Terpenjara*, Bandung, Selasa 13 Agustus 2002.

Kebijakan Pemidanaan Terhadap Anak Melalui Sanksi Pidana Kerja Sosial Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Anak Indonesia tersebut dengan permasalahan sebagai berikut :

1. Sejauhmanakah ide pidana kerja sosial untuk anak sesuai atau menunjang tujuan pemidanaan dan pembinaan terhadap terpidana anak ?
2. Bagaimanakah konsep pengaturan sanksi pidana Kerja Sosial terhadap terpidana anak di Indonesia ?

C. Maksud Dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui sejauhmana ide pidana kerja sosial untuk anak ini sesuai atau dapat menunjang tujuan dari pemidanaan dan pembinaan terhadap terpidana anak.
2. Mengetahui bagaimana konsep pengaturan sanksi pidana Kerja Sosial yang nantinya akan diberikan terhadap terpidana anak, termasuk perkembangan pidana kerja sosial di masa yang akan datang dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

D. Kontribusi Penelitian

Sebagai suatu kegiatan ilmiah sebuah penelitian tentu diharapkan dapat dimanfaatkan dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu. Secara umum dapat dikemukakan bahwa tujuan penelitian adalah untuk dapat

memberikan masukan pengetahuan terhadap pembaharuan hukum pidana terutama terhadap sanksi hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak.

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. **Manfaat praktis**

Yang dimaksud dengan manfaat praktis di sini adalah keseluruhan data dan informasi yang disajikan dalam bentuk laporan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi himpunan peraturan di bidang hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan hukum pidana anak.

2. **Manfaat teoritis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk peningkatan dan pengembangan serta pembaharuan ilmu hukum pidana khususnya hukum pidana anak bagi para pemegang kewenangan dan pengambil kebijakan dalam memformulasikan peraturan-peraturan yang terkait dalam proses sistem peradilan pidana terhadap anak.

E. Kerangka Teoritis

Menurut **Sudarto** adalah suatu kenyataan bahwa antara pembangunan dan kejahatan atau pelanggaran hukum ada hubungan yang erat, oleh karena itu perencanaan pembangunan harus meliputi juga perencanaan perlindungan masyarakat terhadap pelanggaran hukum,

maka pembaharuan hukum pidana adalah hal yang mutlak namun harus disadari akan keterbatasan pengaruh dan kemampuan hukum pidana.⁷

Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial) dan dalam setiap kebijakan terkandung pula pertimbangan nilai, oleh karena itu pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai.⁸

Pengertian kenakalan anak-anak/remaja lebih sering digunakan untuk melukiskan sejumlah besar tingkah laku anak-anak dan remaja yang tidak baik atau yang tidak disetujui. Dalam pengertian ini hampir segala sesuatu yang dilakukan oleh anak-anak/remaja yang tidak disukai oleh orang lain disebut dengan kenakalan anak-anak/remaja.

Menurut UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa **anak nakal** adalah :

- a. anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

⁷ Sudarto, 1983, *Op. Cit.*, hal. 38.

⁸ Barda Nawawi Arief, 1996, *Op. Cit.*, hal. 167-168..

Menurut Sri Widoyati WS, pada umumnya terdapat empat macam kenakalan remaja, yaitu :⁹

1. Kenakalan yang menjurus pada perbuatan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak/remaja;
2. Perbuatan kenakalan lain yang tidak dicantumkan dalam peraturan-peraturan yang berlaku bagi orang dewasa;
3. Kenakalan yang merupakan *Pre-delinquency*, yaitu pelanggaran terhadap norma-norma edukatif;
4. Kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak yang berada dalam suatu pengawasan dan batas toleransi orang tua.

Dengan memahami problematik yang dihadapi oleh kehidupan anak, maka di sinilah pentingnya peranan pembentuk undang-undang untuk mengkaji segala problematik tersebut dengan membuat peraturan khusus bagi anak-anak dan mengutamakan aspek perlindungan bagi kehidupan anak.

Ada beberapa faktor yang berhubungan dengan prosedur penentuan dan perlakuan/tindakan terhadap anak-anak/remaja nakal, yaitu :¹⁰

1. Masalah pilihan undang—undang/peraturan;
2. *Overacting* penegak hukumnya;
3. Perlakuan dalam lembaga-lembaga pembinaan (*intitutional treatment*), yaitu dalam lembaga pemasyarakatan.

Merupakan hal yang sulit ketika pemerintah berupaya mengajukan suatu rancangan perundang-undangan kepada lembaga legislatif dalam rangka mewujudkan suatu peraturan yang merupakan prosedur dalam

⁹ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1989, hal.

¹¹.

¹⁰ Ibid.

penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Segala kajian serta analisis telah dilakukan secara mendalam, tetapi tetap saja ada kritik terhadap upaya penanganan masalah tersebut yang menyatakan bila terlalu banyak peraturan/larangan akan menambah kenakalan. Ada persepsi terhadap kemungkinan apabila banyak perbuatan yang dianggap sebagai tindakan kenakalan, dan anak-anak tersebut juga dianggap dan diperlakukan sebagai anak nakal, maka anak-anak akan menjadi lebih nakal lagi.

Kemungkinan itu dapat diperbesar lagi apabila para remaja atau anak-anak yang nakal diisolasi dari masyarakat dan diperlakukan dalam suatu lembaga. Hal-hal seperti ini banyak mendapat sorotan dari para psikolog, sosiolog dan kriminolog.

Dalam Konsiderans Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengenai Pengadilan Anak, dikatakan bahwa "anak adalah bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa". Dalam kedudukan demikian, anak memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus.¹¹ Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Dalam bidang pelaksanaan hukum pidana, faktor perkembangan masyarakat dapat digunakan untuk mendatangkan keputusan hakim yang

¹¹ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 2.

dapat memberikan kepuasan kepada pihak-pihak yang bersangkutan karena sesuai dengan rasa keadilan.¹²

Putusan hakim dalam sidang pengadilan anak dapat berupa menjatuhkan pidana atau tindakan kepada terdakwa anak nakal. Pidana itu dapat berupa (Pasal 23 UU No. 3 Tahun 1997) :

A. Pidana Pokok :

1. Pidana Penjara;
2. Pidana Kurungan;
3. Pidana Denda; atau
4. Pidana Pengawasan.

B. Pidana Tambahan :

1. Perampasan barang tertentu; dan/atau
2. Pembayaran ganti kerugian.

Sedangkan tindakan yang dijatuhkan kepada anak nakal, dapat berupa (Pasal 24 UU No. 3 Tahun 1997) :

a. Mengembalikan anak kepada :

1. Orang tua;
2. Wali; atau
3. Orang tua asuh.

b. Menyerahkan anak kepada negara (anak negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja;) atau

¹² Sudarto, 1983, *Op. Cit.*, hal. 38.

- c. Menyerahkan anak nakal kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Dalam Pasal 109 ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) 1999, disebutkan mengenai Pidana Pokok bagi anak terdiri atas : (a) Pidana Nominal, terdiri dari : Pidana peringatan dan Pidana Teguran; (b) Pidana dengan syarat, yaitu : Pidana pembinaan di luar lembaga, **Pidana Kerja Sosial**, atau Pidana pengawasan; (c) Pidana denda; atau (d) Pidana Pembatasan Kebebasan, yaitu : Pidana Pembinaan di dalam lembaga, Pidana penjara; atau Pidana tutupan. Dalam Pasal 109 Ayat (2) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) 1999 disebutkan mengenai Pidana Tambahan yang terdiri atas : (a) Perampasan barang-barang tertentu dan atau tagihan; (b) Pembayaran ganti kerugian; atau (c) Pemenuhan kewajiban adat.

Pidana dengan syarat berupa Pidana Kerja Sosial (*community service order*) bagi terpidana anak merupakan bentuk sanksi pidana baru yang dimasukkan dalam konsep Rancangan KUHP 2000 sebagai bentuk dari perlindungan bagi pelaku anak (*offender*) yang melakukan tindak pidana sehingga dapat diberikan sanksi selain pidana penjara yang merupakan pidana pembatasan kemerdekaan.

Pidana kerja sosial merupakan pidana kerja secara sukarela dengan tanpa bayaran, dengan waktu tertentu yang dikenakan kepada terpidana atas permintaannya dengan adanya pertimbangan-

pertimbangan lainnya yang berkaitan dengan keadaan diri pelaku yang harus diperhatikan oleh hakim sebelum menjatuhkan pidana tersebut, dan dikenakan sebagai alternatif dari pidana penjara pendek ataupun denda yang tidak dapat dibayar.

Dalam konsep RKUHP, Pidana Kerja Sosial dikenakan paling lama 240 jam untuk terpidana yang telah berumur 18 tahun, dan 120 jam untuk terpidana yang berumur di bawah 18 tahun dan paling pendek 7 jam.¹³

Dalam masalah upaya perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak, pemerintah pada tanggal 25 Agustus 1990 telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang **Pengesahan *Convention on The Rights of The Child***. Dengan demikian, dalam upaya melakukan perlindungan anak melalui hukum pidana, sewajarnya kitapun patut memperhatikan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Konvensi Hak-Hak Anak tersebut.¹⁴

Mengenai hak terhadap perlindungan (*protection rights*) dalam Konvensi Hak Anak, disebutkan dalam Pasal 37 mengenai larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, hukuman mati, penjara seumur hidup dan penahanan semena-mena untuk perampasan kebebasan terhadap anak, serta dalam Pasal 40 Konvensi Hak Anak mengenai hak bagi anak-anak yang didakwa ataupun yang diputuskan telah melakukan pelanggaran, untuk tetap dihargai hak asasinya dan

¹³ Barda Nawawi Arief, 1996, *Op. Cit.*, hal. 120.

¹⁴ *Ibid.*

khususnya untuk dapat menerima manfaat dari segenap proses hukum bagi dirinya.¹⁵

Masalah prosedural mengenai sanksi pidana terhadap anak sangat perlu diperhatikan agar pembatasan hak anak tidak mengakibatkan keadaan anak menjadi lebih tertekan sehingga menyulitkan pengembalian perilaku mereka ke dalam masyarakat dan keluarga nantinya. Salah satu prinsip hak anak dalam Konvensi Hak Anak yaitu mengedepankan kepentingan yang terbaik untuk anak (*the best interest of the child*), dengan mengutip pendapat dari Irwanto bahwa prinsip tersebut harus mendapat prioritas tertinggi (*paramount importance*) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak karena dalam banyak hal anak adalah “korban”, termasuk korban ketidak tahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya.¹⁶ Selanjutnya dikatakan bahwa :

“ Tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan tumbuh kembang anak, jika prinsip ini diabaikan maka masyarakat akan menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari ”

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak perlu diimplementasikan ke dalam berbagai bentuk kebijakan perundang-undangan dan kebijakan sosial lainnya. Tetapi upaya perlindungan hukum bagi anak tentunya tidak cukup hanya dengan menyiapkan “substansi hukum” (*legal substance*), tetapi juga perlu di dukung oleh pemantapan “struktur hukum” (*legal structure*) dan “budaya hukum” (*legal culture*).¹⁷

¹⁵ Muhamad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Op. Cit.*, hal. 41 – 42.

¹⁶ *Ibid*, hal. 106.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, 1997, *Op. Cit.*, hal. 71

Menurut **Marc Ancel** seperti yang dikutip oleh **Barda Nawawi Arief**, mengemukakan bahwa salah satu komponen dari *Modern Criminal science* adalah *Penal Policy* yaitu suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹⁸

Sedangkan **Colin Howard** berpendapat bahwa peranan badan pembuat undang-undang dalam hukum pidana sangat penting. Peranan legislatif dalam hal pemidanaan meliputi penentuan kebijakan dasar yang tidak hanya mengenai pidana yang tepat untuk tiap-tiap tindak pidana, tetapi juga mengenai tipe pidana yang disediakan untuk kekuasaan pemidanaan lainnya di tingkat bawah dan kadar kebijakan yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan pidana yang tepat untuk seseorang pelanggar tertentu.¹⁹

Menurut **Bagir Manan**, dalam usaha menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku menyimpang anak-anak, sekali-kali tidak boleh melupakan kedudukan anak dengan segala karakternya yang khusus. Walaupun anak pada dasarnya dan dalam batas wajar tidak menentukan sendiri langkah perbuatan berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi karena kondisinya sebagai anak, keadaan sekitarnya

¹⁸ Barda Nawawi Arief, 1996, *Op. Cit.*, hal. 23.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijaksanaan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2000, hal. 126.

dapat berpengaruh lebih besar dalam menentukan sikap dan nilai pribadinya.²⁰

Penanganan yang salah terhadap anak-anak bermasalah, dapat berpengaruh pada masa depan anak tersebut seterusnya. Isu di sekitar tukar pengalaman diantara sesama narapidana mengisyaratkan bahwa tingkah laku kriminal itu dapat dipelajari.²¹ Pemasyarakatan merupakan tempat berkumpulnya para pelanggar hukum. Berkumpulnya pelanggar hukum dengan berbagai karakteristik dan latar belakang kejahatannya memungkinkan mereka saling bertukar pengalaman mengenai cara-cara melakukan kejahatan.

Seperti dikatakan oleh **E. Sutherland**, dengan teorinya *differential association* yang menyatakan tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi.²² Berdasarkan pendapat tersebut, kekhawatiran akan sanksi pidana yang kurang tepat bagi terpidana anak, terutama hubungan pergaulan bagi anak dalam lingkungan penjara selama menjalani masa pembedaannya yang dapat membentuk anak menjadi lebih jahat lagi ketika ia selesai menjalani proses pembedaan tersebut. Hal ini menjadi bertolak belakang dari tujuan pembedaan seperti yang dikemukakan oleh **Ted Honderich** bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis

²⁰ Dalam tulisan Prof. Dr. Bagir Manan, SH., M.CL., *Pemikiran-Pemikiran Dalam Rancangan Undang-undang Tentang Peradilan Anak*, dalam buku Romli Atmasasmita (penyunting) *Peradilan Anak di Indonesia*, , Mandar Maju, Bandung, 1997, hal. 7.

²¹ Petrus Irwan Panjaitan, Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal. 44.

²² *Ibid*, hal. 45.

(*economical deterrents*) apabila : pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu dikenakan (cetak tebal penulis).²³

Dalam Rule 19.1 *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMR-JJ)* atau **The Beijing Rules** disebutkan bahwa "penempatan seorang anak dalam lembaga harus selalu ditetapkan sebagai upaya yang terakhir dan untuk jangka waktu minimal yang diperlukan".²⁴

Menurut **Barda Nawawi Arief**, tujuan dasar dari peradilan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial, tetapi tidak harus kemudian diartikan bahwa kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat, melainkan harus dilihat bahwa mendahulukan atau mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari mewujudkan kesejahteraan sosial.²⁵

Perhatian pada masalah perlunya perlindungan khusus bagi anak yang dijamin oleh hukum, berkaitan erat dengan prinsip kedua dari *Declaration of the Rights of the Child* yang lengkapnya berbunyi :²⁶

The child shall enjoy special protection, and shall be given opportunities and facilities, by law and other means, to enable him

²³ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, 1996, hal. 39.

²⁴ Barda Nawawi Arif, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, dalam buku Romli Atmasasmita (penyunting), *Peradilan Anak di Indonesia*, *Op. Cit.*, 1997, hal.77.

²⁵ lihat buku Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, 1992, Bandung, hal. 111.

²⁶ *Ibid*, hal. 109.

to develop physically, morally, spiritually and socially in healthy and normal manner in conditions of freedom and dignity. In the enactment of laws for this purpose the best interest of the child shall be the paramount consideration.

Tujuan dan dasar pemikiran untuk mengutamakan kesejahteraan anak ketika anak berhadapan dengan masalah hukum, ditegaskan pula dalam SMR-JJ1985 (*Beijing Rules*), khususnya dalam *Commentary Rule* 5.1 mengenai *Aims of Juvenile Justice*, yang menunjuk pada dua tujuan atau sasaran yang sangat penting, yaitu:²⁷

- a. memajukan kesejahteraan anak (*the promotion of the well being of the juvenile*) dan;
- b. prinsip proporsionalitas (*the principle of proportionality*).

F. Metode Penelitian

1. Objek dan Fokus yang diteliti

Objek dari penelitian ini terbatas pada konsep kebijakan legislatif dalam rangka merumuskan, menetapkan, membentuk dan memperbaharui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan pemidanaan terhadap anak melalui sanksi pidana kerja sosial.

Yang dimaksud dengan kebijakan di sini didasarkan atas pendapat **Robert R. Mayer** dan **Ernest Greenwood** yang berasal dari kata *policy*, dirumuskan sebagai suatu keputusan yang

²⁷ *Ibid*, hal. 112.

menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan secara kolektif.²⁸

Kebijakan pemidanaan terhadap anak ditekankan pada apa yang dilakukan oleh seorang anak pada saat ia menjalani suatu hukuman pidana, haruslah diupayakan apa yang dia dapat dari pemidanaan tersebut menjadi sesuatu hal yang dapat mendukung perkembangan seorang anak ke arah yang lebih baik dan berguna bagi dirinya.

Yang dimaksud dengan pidana Kerja Sosial (community service order) bagi terpidana anak berdasarkan pada konsep RKUHP, yaitu Pidana Kerja Sosial dikenakan paling lama 240 jam untuk terpidana yang telah berumur 18 tahun, dan 120 jam untuk terpidana yang berumur di bawah 18 tahun dan paling pendek 7 jam dengan memperhatikan usia layak kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ruang lingkup pidana Kerja Sosial bagi terpidana anak yang ingin diteliti lebih lanjut meliputi masalah yang berhubungan dengan sistem pemidanaan terhadap anak serta perumusan pemidanaan terhadap anak melalui sanksi pidana Kerja Sosial, perkembangan pidana penjara dan kecenderungan untuk menerapkan sanksi pidana selain pidana penjara yaitu melalui sanksi pidana Kerja Sosial bagi terpidana anak dan masalah sinkronisasi konsep

²⁸ Barda Nawawi Arief, 2000, **Op.Cit.**, hal 59.

pidana kerja sosial yang ada dengan berbagai ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan yang dapat dilakukan oleh anak-anak.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dalam mencari data yang digunakan dengan berpegang pada segi-segi yuridis.

Pendekatan normatif yang dilakukan didasari oleh pertimbangan bahwa penelitian ini terutama sekali bertujuan untuk membahas dan mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan Kebijakan Pemidanaan Terhadap Anak Melalui Penerapan Sanksi Pidana Kerja Sosial Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Anak Indonesia.

Pendekatan ini selaras dengan pandangan yang memahami bahwa hukum sebagai norma, kaidah dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum.²⁹

Selain itu pula digunakan metode komparatif, yaitu data-data yang ada dikaitkan pula dengan keadaan-keadaan yang terjadi tentang objek yang akan diteliti dengan cara melakukan

²⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, **Masalah Metodologi dalam Penelitian Hukum sehubungan dengan Masalah Keragaman Pendekatan Konseptualnya**, Makalah pada Pelatihan Metodologi Penelitian, FH. UNDIP, Mei, 1999, hal.30.

perbandingan dengan sumber-sumber data lainnya seperti peraturan-peraturan yang berlaku di negara lain (perbandingan hukum).³⁰

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang dibutuhkan meliputi data sekunder sebagai unsur utama.

Dalam hal ini sesuai dengan fokus utamanya yaitu penelitian yuridis normatif, maka data sekunder yang hendak dikumpulkan meliputi bahan-bahan hukum primer maupun sekunder.³¹

Bahan hukum primer di sini meliputi semua peraturan yang berkaitan dengan Kebijakan Pemidanaan Terhadap Anak Melalui Sanksi Pidana Kerja Sosial Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Anak Indonesia, baik itu undang-undang atau peraturan lain selain undang-undang yang lebih rendah tingkatannya.

Sedangkan untuk bahan hukum sekundernya dapat berupa rancangan peraturan perundang-undangan, makalah, hasil penelitian, literatur, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Suplemen Bahan Kuliah : Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang, 2001, hal. 3.

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hal. 11.

b. Sumber Data

Untuk memperoleh data sekunder tersebut di atas yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, ditentukan sumber data sebagai berikut :

- a. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. di Jakarta.
- b. Departemen Tenaga Kerja R.I. di Jakarta.
- c. Perpustakaan yang ada di wilayah kota Semarang maupun di luar kota Semarang.
- d. instansi lainnya yang terkait.
- e. Media internet.
- f. Media Massa, seperti : surat kabar, majalah dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data terutama ditempuh dengan menggunakan teknik berupa studi dokumentasi atau dengan penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan berbagai bahan hukum beserta catatan dan laporan data lainnya yang terdapat pada berbagai institusi tempat penelitian ini dilakukan serta melalui media lainnya.

Pengumpulan data tersebut meliputi pengumpulan data sekunder yang bersifat pribadi berupa dokumen-dokumen pribadi,

dan data sekunder yang bersifat publik, yaitu data arsip maupun data yang dipublikasikan,³² berupa peraturan dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah yang dibuat dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, termasuk juga peraturan negara asing serta data-data tentang sanksi pidana kerja sosial terhadap tindak pidana anak dan masalah ketenagakerjaan anak serta data-data yang berkaitan dengan masalah tindak pidana anak dan lembaga pemasyarakatan.

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan analisis normatif. Berkaitan dengan data sekunder, analisa yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum, khususnya yang berkaitan dengan Kebijakan Pemidanaan Terhadap Anak Melalui Penerapan Sanksi Pidana Kerja Sosial serta bagaimana taraf sinkronisasi peraturan yang satu dengan yang lainnya, baik secara vertikal ataupun horizontal. Dengan ini yang akan dianalisa adalah peraturan yang satu sinkron dan sejalan dengan peraturan lainnya baik yang lebih tinggi atau peraturan yang sederajat, namun mengatur bidang yang berlainan.³³ Dalam hal ini peraturan yang akan diteliti secara

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Hukum dan Jurimetri*, 1994, *Ibid*, hal. 11.

³³ *Ibid*, hal 16.

vertikal dan horizontal menyangkut penerapan pidana kerja sosial terhadap anak di masa datang sebagai bagian dari kebijakan pemidanaan terhadap anak, yaitu : UUD 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang No. 39 tahun 1999 Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 1 tahun 2000 tentang tentang Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Undang-undang No. 13 tentang Ketenagakerjaan, Keppres No. 36 tahun 1990 tentang konvensi PBB Tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan penelitian ini terdiri dari empat bab yang mencakup :

Bab I tentang pendahuluan yaitu memuat tentang latar belakang penulisan, permasalahan serta tujuan dari penelitian ini. Disamping itu juga diungkapkan metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini dan sistematika penulisan.

Bab II tentang tinjauan pustaka mengenai dasar teori dari permasalahan yang telah diutarakan terlebih dahulu, kemudian dikaji secara lebih spesifik dari permasalahan yang dikemukakan. Disini akan diuraikan masalah-masalah pokok yaitu : Pertama, hal-hal yang berkaitan dengan pidana dan tujuan pemidanaan. Kedua, mengenai pidana penjara dan sistem pemasyarakatan. Ketiga pembahasan mengenai perkembangan pidana penjara dan kecenderungan masyarakat internasional dalam membatasi penerapan pidana penjara, Keempat yang berkaitan dengan Pidana Kerja Sosial yang membahas masalah pengertian dan perkembangan pidana kerja sosial itu sendiri serta mengenai pidana kerja sosial sebagai alternatif dari pidana penjara, dan yang terakhir mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap anak dalam proses pidana.

Selanjutnya dalam **Bab III** diuraikan tentang hasil penelitian serta pembahasannya, terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai Kebijakan Pemidanaan Terhadap Anak Melalui Sanksi Pidana Kerja Sosial Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Anak Indonesia. Dengan demikian dalam bab ini akan termuat data yang dikumpulkan dari penelitian beserta penyajian dan analisisnya, serta penemuan penelitian ini.

Terakhir, **Bab IV** yang merupakan bab penutup memuat kesimpulan hasil penelitian serta rekomendasi yang telah dirumuskan dari hasil penelitian dan pembahasannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana Dan Tujuan Pemidanaan

Pemikiran modern yang berkembang akhir-akhir ini dalam hukum pidana semakin terlihat, terutama masalah sistem pemidanaan berupa penerapan sanksi pidana yang diberikan kepada seseorang yang melakukan pidana. Kecenderungan untuk tidak selalu menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara sudah mulai dilakukan oleh beberapa Negara di dunia dengan melakukan perubahan-perubahan dalam aturan hukum pidananya, teori klasik tentang tujuan pemidanaan berupa pembalasan nampaknya mulai ditinggalkan dengan mengedepankan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya mengenai pembalasan saja, tetapi harus dilihat secara menyeluruh dari seluruh aspek yang ada, tidak hanya memberikan perlindungan terhadap masyarakat saja tetapi juga termasuk memberikan perlindungan bagi para korban serta termasuk juga pelaku kejahatan dengan lebih memanusiawikan mereka, mengembalikan para pelaku kejahatan ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman untuk menjadi manusia yang lebih baik, baik dari segi moral pelaku maupun kemampuan diri sehingga dengan begitu mereka dapat hidup dengan baik di dalam masyarakat.

1. Pengertian Pidana dan Fungsinya dalam Politik Kriminal.

Pidana adalah sebuah konsep dalam hukum pidana, yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Guna mendapat gambaran yang lebih jelas dan tepat tentang arti dan hakekat pidana, akan diuraikan pendapat beberapa ahli hukum mengenai hal itu. Namun sebelumnya juga akan disinggung sedikit tentang istilah pidana itu sendiri.

Istilah lain bagi pidana, yang lebih dikenal oleh masyarakat umum adalah "hukuman". Dalam bidang hukum pidana "hukuman" adalah terjemahan untuk kata "*straf*" yang terdapat dalam KUHP 1915, atau kata "*punishment*" dalam literatur Anglo Saxon. Moeljatno seperti dikutip dari buku Muladi dan Barda Nawawi Arief, yang berjudul *Teori-teori dan Kebijakan Kriminal*, mengatakan tidak setuju dengan istilah "hukuman" untuk menggantikan kata "straf", karena "hukuman" dianggapnya istilah yang konvensional dan terlalu umum. Beliau menggunakan istilah "pidana" yang inkonvensional dan lebih khusus.³⁴

Walaupun kedua istilah ini mengandung persamaan arti, namun keduanya sebetulnya dapat dibedakan. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum, yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga putusan hakim dalam lapangan hukum perdata.³⁵ Sementara istilah pidana merupakan istilah yang lebih khusus, yang

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1998, hal. 1

³⁵ *Ibid.*

menunjukkan sanksi dalam bidang hukum pidana.³⁶ Jadi tidak semua hukuman merupakan pidana, akan tetapi setiap pidana merupakan "hukuman".³⁷ Karenanya istilah hukuman juga dikenal dalam bidang lainnya seperti pendidikan, moral, agama, dan sebagainya.

Pendapat beberapa sarjana tentang pengertian pidana seperti diternui dalam buku Muladi dan Barda Nawawi Arief tadi, di antaranya adalah sebagai berikut :³⁸

a. Sudarto :

Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

b. Roeslan Saleh :

Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat. delik itu.

c. Sir Rupert Cross :

Punishment means " the infliction of pain by the state on someone who has been convicted for an offence".

d. H.L.A. Hart :

Punishment must: :

- 1) *involve pain or other consequences normally considered unpleasant ;*
- 2) *be for an actual or supposed offender for his offence ;*
- 3) *be for an offence against rules ;*
- 4) *be intentionally administered by human beings other than the offender ;*
- 5) *be imposed and administered by an authority constituted by a legal system against with the offence is committed.*

Dari beberapa pengertian di atas, Muladi dan Barda Nawawi Arief mengambil kesimpulan, bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :³⁹

³⁶ *Ibid*, hal. 2.

³⁷ Packer, *The Limits of Criminal Sanctions*, Stanford, California : Stanford University, 1968, hal. 17.

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Op.Cit*, hal. 2 – 3.

³⁹ *Ibid*, hal. 4.

- a. pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat - akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. pidana itu diberikan dengan sengaja oleh negara atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Dengan melihat kepada pengertian pidana dari pendapat beberapa ahli hukum di atas, dan dengan mengingat perkembangan terakhir tentang konsep sanksi pidana, maka menurut penulis hakekat pidana adalah perlakuan tertentu yang dikenakan oleh negara (melalui aparatnya atau pejabat yang berwenang) kepada seseorang, sebagai pencelaan atau penistaan atas perbuatannya yang bertentangan dengan aturan-aturan hukum pidana.

Perkembangan terakhir tentang konsep sanksi pidana adalah, bahwa yang dipahami sebagai sanksi pidana tidak lagi hanya dalam bentuk "pidana" saja, tetapi juga dalam bentuk "tindakan",⁴⁰ yang jelas merupakan pengaruh dari aliran modern.

Menurut **Alf Ross**, *Concept of Punishment* bertolak pada dua syarat atau tujuan, yaitu:⁴¹

- a. pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan; dan
- b. pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.

⁴⁰ Muladi, *Perbandingan Sistem Pemidanaan dan Kemungkinan Aplikasinya di Indonesia*, Makalah pada Seminar Pembinaan Narapidana dalam Perspektif HAM, Jakarta, 13 Juli 1995.

⁴¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Op. Cit.*, hal. 4.

Karenanya tidaklah dipandang sebagai *punishment* (pidana), hal-hal seperti teguran, peringatan, atau langkah-langkah yang diambil untuk mendidik atau merawat/mengobati seseorang untuk membuatnya tidak berbahaya bagi masyarakat, seperti memasukkan seorang psikopat ke rumah sakit jiwa atau pelaku tindak pidana dibawah umur ke rumah pendidikan negara.

H.L. Packer mengatakan, bahwa perbedaan antara *punishment* (pidana) dengan *treatment* (tindakan) tidak terletak pada tingkatan atau derajat ketidak enakan atau kekejaman. Perbedaan itu harus dilihat dari tujuannya dan seberapa jauh peranan dari perbuatan si pelaku terhadap adanya pidana atau tindakan perlakuan.

Selanjutnya menurut **Packer**, tujuan utama dari *treatment* adalah untuk memberikan keuntungan atau untuk memperbaiki orang yang bersangkutan. Fokusnya bukan pada perbuatannya yang telah lalu atau yang akan datang, tetapi pada tujuan untuk memberikan pertolongan kepadanya. Jadi, dasar pembenaran dari *treatment* ialah pada pandangan bahwa orang yang bersangkutan akan atau mungkin menjadi lebih baik. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Sedangkan *punishment* pembenarannya didasarkan pada satu atau dua tujuan berikut :

- a. untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang melanggar (*the*

prevention of crime or undesired conduct or offending conduct) ;

- b. untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar (*the deserved infliction of suffering on evildoers/retribution for perceived wrong doing*).

Jadi dalam hal pidana fokusnya adalah pada perbuatan salah atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku. Dengan kata lain perbuatan itu mempunyai peranan yang besar, dan merupakan syarat yang harus ada untuk adanya *punishment*.

Packer juga menegaskan bahwa dalam hal *punishment*, kita memperlakukan seseorang karena ia telah melakukan suatu perbuatan salah, dengan tujuan, baik untuk mencegah terulangnya perbuatan itu maupun untuk mengenakan penderitaan atau untuk kedua-duanya. Dalam hal *treatment* tidak diperlukan adanya hubungan dengan perbuatan, kita memperlakukan orang itu karena kita berpendapat atau beranggapan bahwa ia akan menjadi lebih baik.

Kita juga boleh berharap atau berpikiran, bahwa orang yang dikenakan *punishment* akan menjadi lebih baik, tetapi bukan karena itu kita berbuat demikian, tujuan utamanya adalah melakukan pencegahan terhadap perbuatan salah itu dan bukan perbaikan terhadap diri si pelanggar. Sepanjang perhatian kita ditujukan pada :

- a. aktivitas seseorang di masa depan untuk sesuatu yang telah dilakukannya pada masa lalu (*a person's future activity to something he has done in the past*) ;
- b. perlindungan terhadap orang lain daripada perbaikan terhadap diri si pelaku (*the protection of other rather than the betterment of the person being dealt with*) ;

maka perlakuan yang demikian adalah *punishment*.

Dengan pendapatnya yang demikian, maka menurut **Packer**, tindakan memasukkan ke Rumah Sakit seorang penderita sakit jiwa adalah merupakan *treatment*, tetapi bila tindakan demikian itu atas tuntutan keluarganya (agar tidak terganggu) tanpa suatu gambaran bahwa ia akan menjadi lebih baik, maka tindakan demikian adalah *punishment*.⁴²

Setelah membahas pengertian pidana serta perkembangan pemahaman tentang konsep sanksi pidana, perlu penulis tegaskan sekali lagi bahwa yang dimaksud dengan pidana dalam tulisan ini adalah dalam pemahamannya sebagai sanksi pidana, yang berupa pidana dan tindakan. Selanjutnya akan dibahas secara singkat bagaimana fungsi pidana dalam politik kriminal.

Soedarto pernah mengemukakan tiga arti dari kebijakan kriminal (politik kriminal), yaitu :⁴³

- a. dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;

⁴² Packer, 1968, *Op. Cit.*, p 25-30

⁴³ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 113 – 114.

- b. dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. dalam arti paling luas (yang diambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Sementara itu **Muladi** mengemukakan secara ringkas, politik kriminal adalah suatu usaha sistematis dan rasional dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁴⁴ Sebagai usaha penanggulangan kejahatan, politik kriminal dapat mengejawantah dalam pelbagai bentuk. Bentuk yang **pertama** adalah bersifat *represif* yang menggunakan sarana penal, yang sering disebut dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Dalam hal ini secara luas sebenarnya mencakup pula proses kriminalisasi. **Kedua** adalah berupa usaha-usaha *prevention without punishment* yaitu suatu bentuk upaya pencegahan kejahatan tanpa menggunakan sarana penal, dan yang **ketiga** adalah mendayagunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui *mass-media* secara luas.⁴⁵

Karena sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan salah satu bentuk pengejawantahan dari politik kriminal, maka kebijakan apapun yang diambil demi berjalannya roda sistem peradilan pidana itu, termasuk pemilihan jenis pidana apa yang akan digunakan, mestilah merupakan cerminan dari politik kriminal, dan tujuan

⁴⁴ Muladi, *Diktat Kuliah Politik Kriminal*, UI, Jakarta, 1994.

⁴⁵ Lihat tulisan Muladi, *Politik Kriminal dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan dalam Kerangka Tindak Pidana Ekonomi*, dalam buku : Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Op.Cit.* hal. 8.

apa pun yang hendak dicapai oleh suatu sistem peradilan pidana di suatu negara, adalah juga (sebagian dari) tujuan dari politik kriminal.

Sementara itu **Barda Nawawi Arief** mengemukakan, bahwa untuk mencapai tujuan dari pemidanaan yang telah ditetapkan dalam politik kriminal, diperlukan sarana atau alat, yang salah satunya adalah pidana.⁴⁶ Ini berarti bahwa pidana adalah alat atau sarana untuk mencapai tujuan pemidanaan, yang pada akhirnya juga merupakan bagian alat untuk mencapai tujuan dari politik kriminal. Dengan kata lain dalam politik kriminal, pidana berfungsi sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan dari politik kriminal atau sarana/alat untuk menanggulangi kejahatan.

2. Teori-Teori Tentang Tujuan Pemidanaan.

2.1. Tujuan Penjatuhan Pidana

Tujuan Pemidanaan yang merupakan pembenaran atas penggunaan atau penjatuhan mempunyai banyak variasi dengan dasar-dasar pembenarannya (*rechtvaardigingsgrond*) sendiri-sendiri.

Sebagai dasar pembenaran (*rechtvaardigingsgrond*) dari tujuan penjatuhan pidana lahirah teori-teori sebagai dasar pembenaran tersebut. Secara tradisional dikenal tiga golongan utama yaitu :

a. Teori Absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia*

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, 1996, Op.Cit., hal. 98.

peccatume).⁴⁷ Pidana tidak usah mempunyai tujuan lain selain dari pada pidana saja. Karena kejahatan tidak dibolehkan, dan tidak diizinkan menurut susila dan menurut hukum, maka tidak boleh terjadi, maka kejahatan itu seharusnya dipidana. Pidana mempunyai fungsi sendiri yaitu bantahan terhadap kejahatan. Hanya dengan membalas kejahatan itu dengan penambahan penderitaan, dapat dinyatakan bahwa perbuatan itu tidak dapat dihargai.⁴⁸

Nigel Walker membagi penganut teori retributif dalam beberapa golongan, yaitu :⁴⁹

- 1) Penganut teori retributif yang murni, yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat.
- 2) Penganut teori retributif yang tidak murni (dengan modifikasi), yang dibagi lagi :
 - (a) Penganut teori retributif yang terbatas, yang berpendapat : pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok atau sepadan dengan kesalahan terdakwa.

⁴⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Op.Cit*, hal. 10.

⁴⁸ Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1, Terjemahan*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hal. 25.

⁴⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Op.Cit*, hal. 12-13

- (b) **Penganut teori retributif yang distributif, atau disingkat teori distributif**, yang berpendapat : pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok atau sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “tiada pidana kesalahan” dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian, misalnya dalam hal *strict liability*.

Kebanyakan KUHP disusun sesuai dengan penganut golongan teori retributif yang terbatas, yaitu dengan menetapkan pidana maksimum sebagai batas atas, tanpa mewajibkan pengadilan untuk mengenakan batas maksimum tersebut.

Menurut **Johannes Andenaes** secara historis atau secara psikologis ada hubungan erat antara balas dendam (*revenge*) dengan pidana. Hukum pidana modern dilihat dari sejarahnya bersumber pada pembalasan dendam pribadi dan secara psikologis konsep tentang retribution secara sadar atau tidak dapat digunakan sebagai suatu kamuflase (penyamaran) dari hasrat untuk balas dendam.⁵⁰

Menurut **Sudarto**, sekarang sebenarnya sudah tidak ada lagi penganut ajaran pembalasan yang klasik, dalam arti pidana merupakan suatu keharusan demi keadilan belaka. Penganut teori pembalasan sekarang dikatakan sebagai penganut teori

⁵⁰ *ibid*, hal. 14.

pembalasan yang modern seperti van Bemmelen, Pompe dan Enschede. Disini pembalasan bukanlah sebagai tujuan sendiri, melainkan sebagai pembatasan dalam arti harus ada keseimbangan antara perbuatan dan pidana, maka dikatakan ada asas pembalasan yang negatif. Hakim hanya menetapkan batas-batas dari pidana, pidana tidak boleh melampaui batas dari kesalahan si pembuat.⁵¹

Van Bemmelen mengatakan bahwa untuk hukum pidana dewasa ini, pencegahan main hakim sendiri tetap merupakan fungsi yang penting sekali dalam penerapan hukum pidana. Yakni memenuhi keinginan akan pembalasan. Namun penderitaan yang diakibatkan oleh pidana harus dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit dan pidana harus menyumbang pada proses penyesuaian kembali terhukum pada kehidupan masyarakat sehari-hari (prevensi spesial) dan disamping itu beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan dengan alasan prevensi general apapun.

CHR. J. Enschede menganggap pembalasan sebagai batas atas (*bovengrens*) dari beratnya pidana. Ia berpendapat bahwa tidak perlu pembalasan merupakan suatu tuntutan dan beratnya tindakan penguasa dalam lingkungan kebebasan individu

⁵¹ *ibid* hal. 14-15.

ditentukan oleh tuntutan kemanfaatan di dalam batas-batas pembalasan.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*utilitarian/doeltheorien*)

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang sangat bermanfaat. Karena itu teori ini sering disebut teori tujuan. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan), melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Van Bemmelen membaginya dalam :

1) Prevensi Umum / Pencegahan Umum

Dengan prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana pada masyarakat pada umumnya. Pencegahan kejahatan ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Dalam disertasinya **Van Veen** mengemukakan tiga fungsi : menegakkan kewibawaan, menegakkan norma, dan membentuk norma.⁵²

Menurut **Johannes Andenaes** ada tiga bentuk pangaruh dalam pengertian "*general prevention*", yaitu : pengaruh

⁵² Van Bemmelen, 1987, *Op. Cit.*, hal. 27.

pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral, dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum. Jadi dalam teori tidak hanya tercakup adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), tetapi juga termasuk pengaruh moral atau pengaruh bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social pedagogical influence of punishment*).⁵³

2) Prevensi Khusus (pencegahan khusus)

Bertolak dari pendapat pelaku tindak pidana di kemudian hari akan menahan diri supaya jangan berbuat seperti itu lagi, karena ia belajar bahwa perbuatannya menimbulkan penderitaan. Jadi pidana akan berfungsi mendidik dan memperbaiki. Teori tujuan serupa ini dikenal dengan sebutan *Reformation* atau *Rehabilitation Theory*.⁵⁴

Dikatakan oleh Van Hamel,⁵⁵ prevensi khusus dari suatu pidana adalah :

- a. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.

⁵³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Op.Cit.*, hal. 18.

⁵⁴ Van Bemmelen, 1987, *Op.Cit.*, hal. 27.

⁵⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal. 31.

- b. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
- c. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
- d. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

3) Teori Perlindungan

Dengan pidana pencabutan kemerdekaan selama beberapa waktu, masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang mungkin dilakukannya jika ia bebas. Jadi terdapat daya untuk mengamankan (*de beveiligende werking*).⁵⁶

Dikatakan **J. Andenaes**, pembalasan tidak mempunyai nilai tapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Untuk itu ia menyebutnya sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*).

c. Teori Gabungan (*verenigings theorieen*)

Teori ini pertama kali diperkenalkan dengan jelas oleh **Pellegrino Rossi** (1787-1848), dalam bukunya *Traite de Droit Penal*, tahun 1828. Ia beranggapan pembenaran pidana terletak dalam pembalasan dan beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya kejahatan. Namun ia juga berpendapat pidana bertujuan memperbaiki tata tertib masyarakat. Hakim harus memperhatikan manfaat apa yang diberikan pidana terhadap tata tertib masyarakat.

⁵⁶ Van Bémmlen, 1987, *Op.Cit.*, hal. 27.

Tujuan penting yang lain adalah prevensi umum. Akibat dari pidana adalah pelajaran (teguran) yang diberikan kepada seluruh rakyat dan menimbulkan rasa takut, begitu pula perbaikan penjahat.

Selain teori-teori di atas, **Ruslan Saleh**⁵⁷ dalam bukunya "*Suatu Reorientasi dalam hukum pidana*", mengemukakan bahwa pada hakekatnya ada dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana, yaitu :

- 1) **Segi prevensi**, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- 2) **Segi pembalasan**, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus pula penentuan hukum, merupakan koreksi dari dan reaksi atas sesuatu yang bersifat melawan hukum

Jadi pada hakekatnya pidana adalah selalu perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan atas perbuatan melawan hukum. Pidana juga mengandung hal-hal lain, yaitu diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan, dan pidana adalah proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.

Menurut **J. Sahetapy**⁵⁸ tidak dapat disangkal bahwa dalam pengertian pidana tersimpul unsur penderitaan. Tetapi penderitaan dalam tujuan membebaskan bukanlah semata-mata untuk penderitaan

⁵⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, **Op.Cit**, hal. 22.

⁵⁸ **Ibid.**

agar si pelaku menjadi takut atau merasa menderita akibat suatu pembalasan dendam melainkan derita itu harus dilihat sebagai obat atau kunci jalan keluar yang membebaskan dan yang memberi kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan.

Sedang **Bismar Siregar**⁵⁹ dalam kertas kerjanya "*Tentang Pemberian Pidana*", pada simposium Pembaharuan hukum pidana nasional di Semarang tahun 1980, menyatakan :

".....yang pertama-tama patut diperhatikan dalam pemberian pidana, bagaimana caranya agar hukuman badaniah mencapai sasaran, mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat perbuatan si tertuduh, karena tujuan penghukuman tiada lain mewujudkan kedamaian dalam kehidupan manusia".

Dari berbagai variasi teori-teori tentang tujuan penjatuhan pidana sebagai alasan pembenar pemidanaan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan oleh penulis bahwa dalam perkembangannya, tujuan pemidanaan itu tidak hanya sekedar untuk pembalasan saja tetapi juga harus diperhatikan tuntutan kemanfaatan di dalam batas-batas pembalasan dan harus dapat memberikan sumbangan pada proses penyesuaian kembali terhukum pada kehidupan masyarakat sehari-hari seperti yang dikatakan oleh **CHR. J. Enschede** dan **Van Bamellen**, seperti yang dikutip oleh **Muladi** dan **Barda Nawawi Arief**.⁶⁰

Jadi dalam pemberian sanksi pidana, tidak hanya memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan mengupayakan agar perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tidak terulang, tetapi juga di

⁵⁹ **Ibid**, hal. 23-24

⁶⁰ **Ibid**, hal. 15.

dalamnya mencakup pula masalah perlindungan terhadap pelaku dengan memperbaiki si pelaku itu sendiri.⁶¹

Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana, tentunya juga harus dibedakan antara pidana terhadap pelaku dewasa dan pidana terhadap pelaku anak-anak. Dari kalimat tersebut, tersirat permasalahan mengapa antara pelaku dewasa dan pelaku anak-anak harus dibedakan dalam pemberian pidana tersebut. Jika memang harus dibedakan, maka tujuan pemidanaan terhadap pelaku dewasa dan pelaku anak-anak pun haruslah diberi garis batasan agar tujuan dari pemidanaan dimana pidana digunakan untuk memperbaiki diri dari pelaku tindak pidana dapat tercapai.

Masalah Pidana (sanksi pidana) adalah masalah mendasar dalam hukum pidana. (Packer mengatakan bahwa permasalahan utama dari hukum pidana terletak pada tiga konsep, yaitu kejahatan, kesalahan dan pidana).⁶² Bahkan sejarah hukum pidana pada dasarnya merupakan sejarah dari pidana dan pemidanaan.⁶³

Seminar Kriminologi Ke-tiga tahun 1976 dalam kesimpulannya antara lain mengatakan:

"hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defence* dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (rehabilitasi) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat/pelaku) dan masyarakat."

⁶¹ Hal ini sesuai dengan tujuan pemidanaan yang integratif yaitu berusaha menyeimbangkan kepentingan beberapa pihak sekaligus, kepentingan pelaku, masyarakat dan negara serta kepentingan korban. Lihat Barda Nawawi Arief, 2000, *Op.Cit*, hal. 92.

⁶² Packer, 1968, *Op. Cit.*, p. 17.

⁶³ Soedarto, 1981, *Op.Cit.*, hal. 23.

Demikian pula Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional tahun 1980, dalam salah satu laporannya menyatakan :⁶⁴

- a. sesuai dengan politik hukum pidana maka "tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan - kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku ;
- b. atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat :
 - 1) kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
 - 2) edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai jiwa positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
 - 3) keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.

Dari kedua kesimpulan di atas jelaslah bahwa tujuan utama yang ingin dicapai oleh "pidana" dan "hukum pidana" sebagai salah satu

⁶⁴ *Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Laporan, BPHN, Dep-Keh, Jakarta, 1980, hal. 6-7.

sarana/alat dari politik kriminal adalah "perlindungan masyarakat". Tujuan pidana yang demikian menurut **Barda Nawawi Arief** adalah tujuan umum yang sangat luas.⁶⁵ Tujuan umum itu merupakan induk dari keseluruhan pendapat atau teori-teori mengenai tujuan pidana. Dengan kata lain semua pendapat dan teori yang berhubungan dengan tujuan pidana dan pemidanaan sebenarnya hanya merupakan perincian atau penqidentifikasi dari tujuan umum itu.

Lebih jelasnya aspek-aspek dari perlindungan masyarakat itu adalah sebagai berikut :⁶⁶

- a. Perlindungan masyarakat dari perbuatan anti sosial/kejahatan;
- b. Perlindungan masyarakat terhadap sifat berbahaya orang (si pelaku);
- c. Perlindungan masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam menggunakan sanksi pidana atau reaksi terhadap pelanggar pidana;
- d. Aspek lain dari perlindungan masyarakat ini adalah perlunya mempertahankan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu oleh adanya kejahatan.

Dari uraian tadi maka menurut **Barda Nawawi Arief**, suatu teori yang hanya melihat salah satu aspek dari tujuan umum tersebut sebenarnya terlalu bersifat sepihak. Dilihat dari pendirian yang demikian, maka wajarlah bila pembuat Konsep KUHP Baru, dalam merumuskan

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, 2000, hal. 92.

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 93 – 95.

tujuan pemidanaan berusaha merumuskan keseluruhan aspek dari tujuan umum tersebut. Dalam Konsep KUHP Tahun 1991/1992 yang telah diperbaiki oleh Tim Kecil hingga Maret 1993, tujuan pemidanaan dirumuskan sebagai berikut :

Pasal 51 : Tujuan Pemidanaan

(1) Pemidanaan bertujuan untuk:

- ke-1 mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat ;
- ke-2 memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna ;
- ke-3 menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ;
- ke-4 membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Tujuan pemidanaan yang berusaha untuk merumuskan semua aspek perlindungan masyarakat seperti di atas yang dimaksudkan sebagai tujuan pemidanaan yang integratif, karena tujuan pemidanaan itu berusaha untuk menyeimbangkan kepentingan beberapa pihak sekaligus, yaitu kepentingan pelaku, masyarakat dan negara, serta kepentingan korban.

Salah satu rumusan tujuan pemidanaan yang integratif lainnya adalah yang dikemukakan oleh **Muladi**. Beliau berpendapat bahwa pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan tujuan mana yang merupakan titik berat sifatnya kasuistik.

Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah:

- a. pencegahan (umum & khusus);
- b. perlindungan masyarakat?
- c. memelihara solidaritas masyarakat; dan
- d. pengimbalan/pengimbangan.⁶⁷

Sehubungan dengan tujuan pemidanaan ini perlu diperhatikan apa yang dikemukakan oleh **Roeslan Saleh**, bahwa:

"Hakim harus memperhitungkan semua tujuan pemidanaan itu. Ia tidak bisa hanya memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat saja, atau kepentingan-kepentingan pembuat saja, atau juga hanya memperhatikan perasaan korban dan keluarganya. Namun dia juga tidak perlu memuaskan sekaligus semua tujuan pemidanaan itu, dan memang juga tidak mungkin ia berbuat demikian. Dalam kejadian-kejadian konkrit hakim dapat memberi tekanan-tekanan pada hal tertentu"⁶⁸

Dengan demikian di dalam praktek, dalam tiap kasus akan sulit untuk mencapai tujuan pemidanaan yang integratif itu sekaligus, dan pada akhirnya terpulang pada hakimlah untuk mengambil kebijaksanaan dengan hati nurani dan rasa keadilannya, untuk menentukan mana tujuan

⁶⁷ Muladi, 1995, *Op.Cit.*, hal 61.

⁶⁸ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hal. 5.

yang mestinya diutamakan tercapai dalam kasus tersebut. apakah gunanya hakim memaksakan diri untuk menjatuhkan pidana bila hanya akan menimbulkan konflik baru, misalkan terlantarnya kehidupan keluarga terpidana karena dia harus masuk penjara dan lain-lain akibat dipidanya pelaku tindak pidana itu. Hanya masalahnya adalah bagaimanakah formula atau rumusan putusan hakim itu akan diambil untuk mendapatkan suatu putusan pidana yang kita inginkan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang baik seperti yang sering dijadikan patokan dalam pembaharuan hukum pidana saat ini dimana selain untuk melindungi masyarakat luas, juga diharapkan tujuan pemidanaan tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap korban sekaligus pelaku itu sendiri.

2.2. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Anak

Perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak mau tidak mau harus ada, mengingat latar belakang dari anak itu sendiri yang memang tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Oleh karena itu, perlu kiranya penulis membahas masalah pengertian dari anak tersebut dan mengapa ada yang dikhususkan dalam hukum pidana terhadap pelaku anak-anak, betapa pentingnya arti seorang anak bagi perkembangan suatu bangsa sehingga diperlukan suatu peraturan pidana khusus untuk anak, hal ini dapat digambarkan seperti

yang dikatakan oleh **Javier Perez de Cuellar**, mantan Sekretaris Jenderal PBB, yang mengatakan :⁶⁹

“Cara suatu masyarakat memperlakukan anak, tidak hanya mencerminkan kualitas rasa iba, hasrat untuk melindungi dan memperhatikan anak, namun juga mencerminkan kepekaannya akan rasa keadilan, komitmennya pada masa depan dan peranan penting anak sebagai generasi penerus bangsanya.”

Pengertian anak sebagai pelaku tindak pidana menurut **Paulus Hadisuprpto** dalam disertasi yang berjudul *Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)*, dikemukakan bahwa di dalamnya terkandung adanya unsur, siapakah yang dimaksudkan sebagai anak dan anak yang mana yang dapat dikualifikasikan sebagai anak pelaku tindak pidana. Unsur yang pertama berkaitan dengan tingkat usia dan kondisi kejiwaan seseorang, sementara unsur yang kedua biasanya berkaitan dengan masalah hukum pidana yaitu masalah pertanggungjawaban pidana, dimana pengertiannya menyangkut masalah sampai seberapa jauh seorang anak (dengan tingkat usia tertentu) dianggap mampu bertanggungjawab.⁷⁰

Hal ini berkaitan dengan pengertian pemidanaan itu sendiri berdasarkan Teori Tujuan dimana menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pidana bukanlah

⁶⁹ Paulus Hadisuprpto, *Hak-Hak Asasi Anak dan Implementasinya (Tinjauan Yuridis Sosiologis)*, Makalah, Pertemuan Ilmiah tentang “Kejahatan yang Dilakukan oleh Pelaku Usia Muda, Dewasa dan Penanggulangannya”, BPHN, Jakarta, 1994, hal. 1.

⁷⁰ Paulus Hadisuprpto, *Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)*, Disertasi, UNDIP, Semarang, 2003, hal. 50

sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang sangat bermanfaat. Jika pidana dikenakan hanya sebagai pembalasan, maka menurut penulis, tidaklah harus suatu pengenaan sanksi pidana dibedakan antara pelaku dewasa atau anak-anak, karena tentunya aspek pencelaan maupun penjeraan dari sifat pidana menurut tuntutan absolut itu sudah dapat dilaksanakan, apalagi jika hal tersebut dikenakan terhadap anak-anak, tentunya pidana sebagai alat pencegahan dengan teori absolut tersebut dapat efektif.

Tetapi seperti telah disinggung di atas bahwa pidana mempunyai tujuan-tujuan tertentu yaitu memperbaiki si pelaku, dan terhadap anak dengan adanya kondisi kejiwaan khusus yang berbeda dengan dewasa, tentunya adanya pidana terhadap anak-anak pun harus dibedakan pula dengan yang dikenakan kepada pelaku dewasa. Oleh karena itu, penentuan batasan usia pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan membedakannya dengan pelaku dewasa perlu dibahas lebih lanjut.

Di Indonesia, pengertian tentang kapan seseorang dengan tingkat usia tertentu dapat dikualifikasikan sebagai anak secara yuridis dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), dalam Pasal 330 ayat (1), menyatakan batasan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan sebelumnya tidak

pernah kawin. Dari pengertian pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa bagi anak yang belum mencapai umur genap 21 tahun tetapi sudah kawin maka dianggap sudah dewasa, dan jika perkawinan dibubarkan sebelum umur anak tersebut genap 21 tahun maka status anak tersebut sudah dewasa. Tetapi dalam Pasal 420 BW disebutkan bahwa seorang anak dapat dikatakan dewasa walaupun belum genap berumur 21 tahun dengan cara *venia aetatis* atau surat pernyataan dewasa dari pemerintah setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung, syarat dari permohonan tersebut adalah seorang anak yang sudah berumur 18 tahun (Pasal 426 BW) atau sudah berumur 20 tahun (Pasal 421 BW).

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa batas usia anak dibawah kekuasaan atau dibawah perwalian yaitu belum mencapai 18 tahun (Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1));
3. Undang Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 butir 2 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah samapai batas usia sebelum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin;
4. Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia tanggal 26 Januari 1990 melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 menyatakan

bahwa yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku, bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal;

5. Undang Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dalam Pasal 1 butir 1 disebutkan yang dimaksud dengan anak adalah orang yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
6. Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 butir 5 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
7. Dalam Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam Pasal 1 butir 26 disebutkan yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun.

Dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, jelas nampak bahwa di Indonesia, batasan usia dari seseorang yang dapat dikategorikan sebagai seorang anak (orang yang belum dewasa) berbeda-beda, yaitu :

- Seseorang yang berusia di bawah 21 tahun.
- Seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.

- Seseorang yang berumur antara di bawah 18 tahun dan di bawah 21 tahun tetapi **belum pernah menikah** atau tidak ada penetapan dewasa dari pemerintah.

Dalam Rancangan KUHP – Baru Tahun 2000, disebutkan dalam Pasal 106 ayat (2), bahwa batasa usia pertanggungjawaban pidana anak adalah 12 – 18 tahun. Dalam Pasal 106 ayat (1) RKUHP tersebut, juga ditegaskan bahwa terhadap anak yang belum mencapai usia 12 tahun, maka anak tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya. Kiranya batasan usia pertanggungjawaban pidana anak dalam RKUHP dengan batas minimum 12 tahun didasarkan pada pertimbangan psikologis yaitu kematangan emosional, intelektual dan mental anak.⁷¹

Pengertian anak dari aspek kejiwaan, secara psikologis digambarkan lewat batasan-batasan usia yang dikaitkan dengan rentang perkembangan jiwa seseorang. Menurut **Elizabeth B Hurlock**, seperti yang dikutip oleh **Paulus Hadisuprpto** dalam disertasinya,⁷² mengemukakan pendapatnya mengenai pengkategorian tahapan usia seseorang dikaitkan dengan perkembangan jiwanya menjadi empat tahapan yaitu :

- a. Anak, seseorang yang berusia di bawah 12 tahun;
- b. Praremaja, seseorang yang berusia antara 12-15 tahun;
- c. Remaja, seseorang yang berusia antara 15-18 tahun; dan

⁷¹ lihat lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 106 RKUHP Tahun 1999-2000, BPHN, Jakarta, hal. 52 – 53.

⁷² Dikutip dari buku Elizabeth, B. Hurlock, *Development Psychology, A life Span Approach*, terjemahan Istiwidayanti dan Sudjarwo, *Psikologi Perkembangan*. Lihat Paulus Hadisuprpto, *Disertasi*, 2003, *Op.Cit.*, hal. 52.

- d. Dewasa, seseorang yang berusia di atas 18 tahun.

Demikian pula yang dikemukakan oleh **Singgih Gunarso** yang dikutip dari pendapat **J. Pikunas** dan **Havighurst** ⁷³, mengenai pengklasifikasian tahapan usia dengan perkembangan jiwa seseorang bahwa setiap tahapan usia psikologis menunjukkan karakteristiknya sendiri dengan tugas-tugas perkembangan kejiwaan yang dialami pada setiap tahapan usia seseorang yang secara umum dikemukakan sebagai berikut :

- a. Golongan **Anak**, adalah seseorang yang berusia di bawah 12 tahun, cenderung dalam tahapan serba belajar, mulai belajar mengenai : membedakan salah dan benar; belajar keterampilan fisik untuk permainan-permainan umum; belajar menyesuaikan diri dengan teman sebaya; belajar mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan untuk kehidupannya sehari-hari; belajar mengembangkan pengertian moral, tata nilai dan tingkatan nilai kemasyarakatan; belajar mengembangkan sikap terhadap kelompok-kelompok sosial dan lembaga-lembaga kemasyarakatan.
- b. Golongan **Remaja Dini** adalah seseorang yang berusia 12 – 15 tahun. Tahapan ini sering juga disebut sebagai masa puber, dimana seorang anak memiliki kecenderungan antara lain : sibuk menguasai tubuhnya, karena ketidakseimbangan postur tubuhnya dan kekurangnyamanan tubuhnya; emosi tinggi dan mudah tersinggung, gelisah dan suka marah-marah; hilang percaya diri, cenderung rendah diri, takut gagal; memiliki konsep diri tak realistik, sulit dimengerti, egosentris, kehilangan dukungan sosial dan cenderung bersikap anti sosial; merasa bosan terhadap kegiatan sekolah dan kemasyarakatan, prestasi merosot disegala bidang.
- c. Golongan **Remaja Lanjut**, dimana seseorang berusia 15 – 18 tahun, dalam tahapan ini, seorang anak menunjukkan kecenderungan kejiwaan antara lain : berada dalam situasi anomie, anak harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan

⁷³ Dikutip oleh **Paulus Hadisuprpto** dari makalah Singgih Gunarso yang berjudul *Perubahan Sosial dalam Masyarakat*, dalam seminar nasional tentang “Keluarga dan Budaya Remaja Perkotaan”, **Ibid**, hal. 52.

kekanak-kanakan dan mulai belajar mengenai nilai-nilai dan pola-pola perilaku baru (orang dewasa); mengalami keraguan peran dalam keluarga dan kemasyarakatan; bersikap ambivalen, menuntut kebebasan tetapi takut bertanggung jawab; mengalami kepekaan sosial yang tinggi, solidaritas pada teman tinggi dan besar kecenderungannya untuk mencari popularitas, di dalam fase ini seorang anak sibuk mengorganisasikan dirinya, untuk menggapai nilai-nilai dan pola-pola perilaku orang dewasa dan mulai timbul dorongan untuk bergaul dengan lawan jenis (pergaulan heteroseksual); minat keluar rumah tinggi dan kecenderungan untuk "mencoba-coba sesuatu" (*trial an error*) pun tinggi.

Menurut Soerjono Soekanto dalam suatu tulisannya yang berjudul "*Kehidupan Remaja dan Masalahnya*" membagi dua golongan bagi seseorang dikatakan seorang remaja, ada golongan remaja muda dan golongan remaja lanjut.⁷⁴ Golongan remaja muda (*early adolescence*) adalah para gadis berusia 13 – 17 tahun. Bagi laki-laki, yang disebut remaja muda, berusia 14 – 17 tahun. Mereka inilah yang disebut dengan *teenagers*. Apabila remaja muda sudah menginjak 17 – 18 tahun, remaja tersebut lazim disebut golongan muda atau pemuda-pemudi (*youth*). Sikap tindak mereka rata-rata sudah mendekati pola sikap tindak orang dewasa, walaupun dari sudut perkembangan mental belum sepenuhnya demikian. Biasanya mereka berharap agar dianggap dewasa oleh masyarakat.

Masalah kondisi moralitas juga sangat berkaitan erat dengan keadaan jiwa seorang anak dalam kehidupannya karena secara psikologis, di dalam rentang kehidupan anak terjadi apa yang disebut

⁷⁴ Kumpulan Artikel dalam Buku **Mengenal dan Memahami Masalah Remaja**, Penyunting : Sanusi, Badri dan Syafrudin, Pustaka Antara, Jakarta, 1993, hal. 9.

perkembangan moral.⁷⁵ Perkembangan moral anak merupakan salah satu wujud proses sosialisasi anak. Sosialisasi sebagai proses belajar seorang anak untuk menyesuaikan moralitasnya dengan harapan kultural dimana ia dapat tumbuh dan berkembang. Dalam proses sosialisasi tersebut, seorang anak tidak hanya belajar mengenai adaptasi diri terhadap lingkungannya, tetapi juga akan menginternalisasikan standard moral kultural tersebut dan menerimanya sebagai hal yang benar dan menjadi cermin atas nilai-nilai personal mereka.

Dari sudut batas usia saja sudah tampak bahwa golongan remaja sebenarnya tergolong kalangan yang *transisional* (masa peralihan), artinya, keremajaan bagi seorang anak merupakan gejala sosial yang bersifat sementara, oleh karena berada antara usia kanak-kanak dan dewasa. Sifat sementara dari kedudukannya tersebut mengakibatkan remaja masih mencari identitasnya; karena oleh anak-anak, mereka sudah dianggap dewasa, sedangkan oleh orang dewasa mereka masih dianggap sebagai anak kecil. Sikap mereka masih belum mantap dalam menemukan identitasnya maka dengan sendirinya diperlukan panutan untuk membimbing mereka untuk mencapai cita-citanya.⁷⁶

Setelah membahas masalah aspek-aspek kejiwaan dalam diri seorang anak, kemudian pembahasan selanjutnya masalah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dalam arti kapan seseorang dengan tingkat usia tertentu dianggap mampu

⁷⁵ Paulus Hadisuprpto, Disertasi, 2003, *Op.Cit*, hal. 54.

⁷⁶ Soerjono Soekanto, *Kehidupan Remaja dan Masalahnya*, artikel dalam buku : **Mengenal dan Memahami Masalah Remaja**, Pustaka Antara, Jakarta, 1993, hal. 10.

mempertanggungjawabkan perbuatan (pidana) nya. Untuk membahas hal tersebut di atas, maka kiranya perlu diketahui batasan-batasan masalah tingkat usia seorang anak yang dapat dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Dalam kesimpulan yang diambil pada Kongres PBB ke VI di Caracas tahun 1981, menyimpulkan bahwa meskipun ada perbedaan-ukuran dalam menentukan batas umur minimum dan maksimum (*minimum age and maximum age floor*) anak yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana namun telah dicapai kesepakatan, ialah : dalam menentukan umur tersebut janganlah terlalu rendah (muda) serta harus mengingat kematangan emosional, mental dan intelektual.⁷⁷ Sebagai gambaran adanya batasan umur tersebut dapat dilihat dari peraturan-peraturan yang berlaku yang mengatur tentang masalah pertanggungjawaban pidana anak diberbagai negara.

Di negara-negara Timur Tengah, menentukan batas usia pertanggungjawaban pidana anak adalah 7 – 15 tahun (Mesir, Irak, Libanon, Syria), 9 –18 tahun (Yordania), 11 –18 tahun (Iran, Turki); di Amerika Serikat sebagian besar negara-negara bagian menentukan batas usia pertanggungjawab pidana anak, antara 8 – 18 tahun; di negeri Belanda, menentukan batas usia pertanggungjawaban pidana anak antara 12 – 18 tahun; Di Inggris batasan umur anak antara 12 – 16 tahun; di Australia di kebanyakan negara bagian batasan umur antara 8 – 16 tahun;

⁷⁷ Budiarti, *Masalah Peradilan Anak di Indonesia*, Makalah, Seminar “Masalah Hukum Perlindungan anak”, BPHN, Jakarta, 1993.

di negara-negara Asia menunjukkan keanekaragaman yaitu : Srilanka antara 8 – 16, Korea antara 14 – 18 tahun, di Jepang antara 14 – 20 tahun, negara Philipina dan Singapura membatasi usia pertanggungjawaban pidana anak antara 11 – 16 tahun, di Kamboja batasan usia antara 15 – 18 tahun, di Taiwan 14 – 18 tahun, sedangkan Malaysia membatasi antara 7 – 18 tahun.⁷⁸ Sementara Indonesia membatasi usia pertanggungjawaban pidana anak antara 8 – 18 tahun (Pasal 1 (angka 1) Undang Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

Apabila ketentuan dalam perundang-undangan Indonesia masalah batas usia anak dan batas usia pertanggungjawaban pidana anak tersebut dikaitkan dengan pemahaman yang menyangkut masalah kejiwaan seorang anak dan masalah latar belakang lainnya tentang anak seperti yang telah dibahas sebelumnya, maka untuk pertanggungjawaban pidana anak dalam pengaturannya di Indonesia, terlihat kesesuaian diantara ketentuan perundnag-undangan yaitu UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan dalam kaitannya dengan pemahaman kejiwaan/psikologis pun ada kesesuaian yaitu batas usia 18 tahun. Menurut **Paulus Hadisuprpto**, atas hal tersebut beliau menyimpulkan dalam disertasinya, bahwa batasan atas usia anak pelaku tindak pidana adalah 18 tahun. Batasan atas usia anak tersebut sesuai

⁷⁸ Paulus Hadisuprpto, Disertasi, 2003, hal. 57. Lihat juga batasan umur dalam buku Sri Widoyati wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, 1989, *Op. Cit.*, hal. 10.

dengan Resolusi PBB No. 40/33 tentang *United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)*, yang memberikan pedoman usia pertanggungjawaban pidana anak dengan batasan 7 – 18 tahun.⁷⁹

Tetapi untuk batasan bawah usia anak menurut **Paulus Hadisuprpto** harus memerlukan pembicaraan secara khusus lagi dengan tetap mengingat himbauan Resolusi PBB No. 40/33 tentang SMR-JJ dan pertimbangan psikologis pada anak, maka batasan usia minimal anak 8 tahun dalam perundang-undangan nasional perlu dipertimbangkan lagi seperti yang dikemukakan dalam disertasinya tersebut yaitu :⁸⁰

“mengingat bahwa anak usia 6 – 12 tahun (dimana usia 8 tahun ada diantaranya) secara psikologis (temuan penelitian psikologis anak lintas budaya seperti telah disinggung dimuka), ternyata menunjukkan kecenderungan kejiwaan *serba belajar* (belajar membangun sikap sehat untuk diri sendiri, belajar sesuaikan diri dengan teman sebaya, belajar mengembangkan peran sosial dimasyarakat, belajar mengembangkan pengertian tentang tata nilai kemasyarakatan, belajar mengembangkan sikap sosial terhadap kelompok dan kelembagaan sosial)”.

Atas dasar tersebut, maka batasan usia anak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana minimal berusia 8 tahun kiranya perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Untuk membedakan pelanggaran pidana dan pelanggaran biasa, tentunya harus diberikan batasan mengenai hal tersebut, dan dalam hal ini penulis lebih memilih pelanggaran pidana sebagai suatu perbuatan pidana atau perbuatan tindak pidana untuk membedakannya dengan perbuatan berupa pelanggaran biasa. Perbuatan pidana yang dilakukan

⁷⁹ Paulus Hadisuprpto, 2003, *Ibid*, hal. 59.

⁸⁰ *Ibid*, hal. 59

oleh anak-anak sering pula disebut dengan istilah delikueni anak atau dalam disertasinya **Paulus Hadisuprpto** yang berjudul *Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Delinkueni Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)* dipakai istilah perilaku delikueni anak yang berasal dari istilah *Juvenile Delinquency*.⁸¹

Penulis menganggap tidak terlalu prinsip untuk membedakan istilah antara perbuatan pidana/tindak pidana dengan pengertian perilaku delikueni anak, karena dasar dari pengertian tersebut tertuju pada masalah pertanggungjawaban pidana oleh anak-anak.

Juvenile Delinquency atau *Juvenile Offender* sendiri diartikan dalam Resolusi PBB 40/33 tentang *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, dalam Rule 2.2 menetapkan :

"A juvenile a child or young person who, under the respective legal systems, may be dealt with for an offence in manner which is different from an adult. An offence is any behavior (act or commision) that is punishable by law under the respective legal sistem. A juvenile offender is a child or young person who is alleged to have committed or who has been found to have committed an offence."

Dikemukakan dalam *The Beijing Rules (SMRJJ)* di atas, pengertian *Juvenile* adalah perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang anak atau orang muda yang menurut sistem hukum masing-

⁸¹ Dalam Disertasinya tersebut, **Paulus Hadisuprpto** mengemukakan bahwa pengertian *Juvenile Delinquency* (untuk istilah dalam bahasa Inggris bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak – penulis) merupakan istilah yang padanannya dalam bahasa Indonesia memunculkan berbagai istilah dengan latar belakang pertimbangan sendiri-sendiri. *Juvenile Delinquency*, secara etimologis adalah kejahatan anak. Istilah ini dirasakan sangat tajam dan memiliki konotasi negatif secara kejiwaan pada diri anak. Mengutip pendapat **Simanjuntak** yang lebih suka memakai istilah kenakalan anak, sementara **Fuad Hasan** memasukan remaja dalam pengertian anak sehingga muncul istilah kenakalan remaja. **Paulus Hadisuprpto**, Disertasi, 2003, *Op.Cit.*, hal. 28.

masing dapat diperlakukan atas suatu pelanggaran hukum dengan cara yang berbeda dari perlakuan terhadap orang dewasa. Suatu pelanggaran hukum adalah suatu perilaku apapun (tindakan atau kelalaian) yang dapat dihukum oleh hukum menurut sistem-sistem hukum masing-masing. Seorang pelanggar hukum berusia remaja adalah anak-anak atau orang muda yang di duga telah melakukan atau yang telah ditemukan melakukan suatu pelanggaran hukum.

Dalam Pasal 1 angka (2) Undang Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dipakai istilah anak nakal yaitu : (a) anak yang melakukan tindak pidana atau (b) anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan, maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dari beberapa pengertian di atas, dapatlah disimpulkan secara garis besar bahwa perbuatan pidana anak atau *Juvenile delinquensi* berarti seorang anak yang melakukan tindak pidana dan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lainnya yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Pengertian ini didasarkan pada gambaran perilaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai perwujudan *criminal*

offence dan *status offence*.⁸² *Criminal offence* adalah perilaku perbuatan anak yang merupakan tindak pidana apabila hal tersebut juga dilakukan oleh orang dewasa, dan *status offence* adalah perilaku perbuatan anak yang erat berkaitan dengan statusnya sebagai anak, perilaku-perilaku tersebut biasanya tidak dikategorikan sebagai tindak pidana bila dilakukan oleh orang dewasa seperti meninggalkan rumah tanpa ijin dari orang tua, membolos sekolah, tak mematuhi nasehat orang tua dan sebagainya.⁸³

B. Masalah Pidana Penjara dan Sistem Pemasyarakatan

Pada bagian terdahulu telah diuraikan bahwa pidana berfungsi sebagai sarana/alat untuk mencapai tujuan politik kriminal. Apapun jenis pidana yang telah ditetapkan untuk digunakan sebagai sarana politik kriminal, tentunya mesti mendukung tercapainya tujuan dari politik kriminal itu.

Adapun jenis-jenis sanksi pidana yang dapat kita jumpai dalam Pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut :

Pidana terdiri dari:

1. pidana pokok, meliputi :
 - a. pidana mati ;
 - b. pidana penjara ;
 - c. pidana kurungan ;
 - d. pidana denda ;

⁸² Paulus Hadisuprpto, *Ibid*, hal. 29.

⁸³ Paulus Hadisuprpto, *Ibid*, hal. 30.

2. pidana tambahan, meliputi :

- a. pencabutan atas hak-hak tertentu ;
- b. perampasan barang-barang tertentu ;
- c. pengumuman putusan hakim.

Kemudian dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 ditambahkan pula pidana pokok lain, yaitu pidana tutupan. Sementara sanksi pidana yang berupa tindakan, selain diatur dalam Pasal 44 dan 45 KUHP juga terdapat di dalam Stb 1936 Nomor : 160. Bentuk-bentuk tindakan itu diantaranya adalah:

1. Penempatan di Rumah Sakit Jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena sakit jiwa (Pasal 44 aya-t (2) KUHP).
2. Bagi anak yang belum berumur 16 tahun yang melakukan tindak pidana :
 - a. dikembalikanpada orang tuanya, walinya, atau pengasuhnya ; atau
 - b. menyerahkan anak tersebut pada pemerintah (Pasal 45 KUHP).
3. penempatan di tempat kerja (Stb. 1936 Nomor : 160).

Dari sini terlihat bahwa salah satu jenis pidana yang digunakan sebagai sarana/alat politik kriminal adalah pidana penjara. Jika diperhatikan pasal-pasal dalam KUHP dan perundang-undangan pidana lainnya di luar KUHP, posisi pidana penjara memang sangat dominan,

karena banyaknya tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara.⁸⁴ Dengan kata lain dapat kita simpulkan bahwa pidana penjara menjadi sarana/alat utama dari politik kriminal dalam upaya menanggulangi kejahatan.

Kritik sering dilontarkan terhadap pidana penjara ini terutama masalah efektivitasnya, serta akibat-akibat negatif yang ditimbulkan oleh oleh pidana penjara. Tentang efektivitas pidana penjara ini **R.M. Jackson** misalnya mengemukakan, bahwa pidana penjara termasuk jenis pidana yang relative kurang efektif. Berdasarkan hasil studi perbandingan efektivitas pidana dikemukakan olehnya, bahwa angka perbandingan rata-rata pengulangan atau penghukuman kembali (*reconviction rate*) bagi orang yang pertama kali melakukan kejahatan berbanding terbalik dengan usia si pelaku. Dikemukakan oleh **Jackson** selanjutnya, bahwa data *reconviction rate* itu menjadi lebih tinggi lagi apabila sebelumnya si pelaku pernah dipidana. Untuk anak-anak yang telah dua kali dijatuhi pidana penjara, *reconviction rate*-nya menjadi 100 %.⁸⁵

Angka perbandingan residivisme dengan usia pelaku dikemukakan pula oleh **T. Wilkins** yang mengemukakan bahwa angka perbandingan residivisme (*recidivism rate*) untuk pelaku pertama dalam kelompok usia antara 8 – 16 tahun sekitar 65 %, antara 17 – 29 tahun sekitar 55 % dan untuk kelompok 30 tahun ke atas sekitar 28 %.⁸⁶

⁸⁴ Barda Nawawi Arief, 2000, **Op.Cit.**, hal. 3

⁸⁵ Lihat Barda Nawawi Arief, 2000, hal 148.

⁸⁶ **Ibid.**

Dari kedua hasil penelitian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa *reconviction rate* atau angka pengulangan kembali untuk orang yang dijatuhi pidana penjara berbanding terbalik dengan usia si pelaku, makin rendah usia si pelaku yang dijatuhi pidana penjara, makin besar kemungkinannya melakukan kejahatan lagi. Kesimpulan demikian terlihat juga dalam kesimpulan yang dikemukakan oleh **Sutherland** mengenai perbandingan usia dalam melakukan kejahatan (*the age ratios in crime*). Dua diantara sebelas kesimpulan yang dikemukakan antara lain mengatakan :

1. semakin muda usia seseorang ketika pertama kali dipidana untuk suatu kejahatan, semakin besar kemungkinan untuk dipidana lagi dan ia akan terus melakukan kejahatan dalam jangka waktu yang lama;
2. semakin muda usia seseorang, akan semakin pendek jarak antara kejahatan yang pertama dilakukan dengan kejahatan-kejahatan berikutnya.⁸⁷

Masalah efektivitas pidana penjara ini pun menjadi pusat perhatian Kongres PBB kelima tahun 1975 mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Dalam salah satu laporannya antara lain dinyatakan, bahwa efektivitas pidana penjara ini menjadi perdebatan sengit di kebanyakan Negara. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa di banyak Negara terdapat krisis kepercayaan terhadap efektivitas pidana

⁸⁷ *Ibid*, hal. 149.

penjara, dan ada kecenderungan untuk mengabaikan kemampuan lembaga-lembaga kepenjaraan dalam menunjang pengendalian atau pengurangan kejahatan.⁸⁸

Di samping masalah efektivitas, sering pula dipersoalkan akibat-akibat negatif dari pidana penjara. Kritik terhadap akibat negatif yang sering dilontarkan pada umumnya menyatakan, bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homo seksual dan masturbasi di kalangan terpidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu, yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Akibat lain yang sering disoroti adalah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.

Stigmatisasi atau pandangan sekaligus penilaian negatif masyarakat terhadap para narapidana yang dipenjarakan sampai saat ini dirasakan tetap melekat dan terus ada. Masyarakat Indonesia sering menganggap bahwa seseorang yang telah atau pernah masuk penjara adalah orang yang jahat dan tidak akan pernah menjadi baik lagi. Hal ini

⁸⁸ Fifth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment for Offender, "Report", New York: 1976, hal. 32, nomor 256.

merupakan bahan kritikan pula yang cukup menarik jika dilihat dari sudut politik criminal, yaitu adanya pernyataan bahwa orang tidak akan menjadi lebih baik tetapi justru menjadi lebih jahat setelah menjalani pidana penjara; terutama bila pidana penjara ini dikenakan kepada anak-anak atau para remaja. Sehubungan dengan hal ini sering diungkapkan bahwa rumah penjara merupakan perguruan tinggi kejahatan atau pabrik kejahatan.

Atas pertimbangan kemanusiaan, pidana penjara yang merupakan salah satu jenis dari pidana perampasan kemerdekaan semakin tidak disukai oleh karena jenis pidana ini mempunyai dampak negatif yang tidak kecil, yang tidak saja berdampak terhadap narapidana, tetapi juga terhadap keluarga serta orang-orang yang kehidupannya bergantung kepada narapidana tersebut. Beberapa dampak negatif pidana perampasan kemerdekaan terhadap narapidana antara lain :⁸⁹

- a. seorang narapidana dapat kehilangan kepribadian atau identitas diri, akibat peraturan dan tata cara hidup di Lembaga Pemasyarakatan (*loose of personality*).
- b. Selama menjalani pidana, narapidana selalu dalam pengawasan petugas, sehingga ia merasa kurang aman, merasa selalu dicurigai atas tindakannya. (*loose of security*).
- c. Dengan dikenai pidana perampasan kemerdekaan, jelas kemerdekaan individualnya terampas, hal ini dapat menyebabkan perasaan terteka, pemurung, mudah marah, sehingga dapat menghambat proses pembinaan (*loose of liberty*).
- d. Dengan menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan, maka kebebasan untuk berkomunikasi dengan siapapun juga dibatasi (*loose of personal communication*).

⁸⁹ C.I. Harsono, **Sistem Baru Pembinaan Narapidana**, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1995, hal. 60.

- e. Selama di dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana dapat merasa kehilangan pelayanan yang baik karena semua harus dikerjakan sendiri (*loose of good and service*).
- f. Dengan pembatasan bergerak dan penempatan narapidana menurut jenis kelamin, jelas narapidana akan merasakan terampasnya naluri seks, kasih sayang dan kerinduan pada keluarga (*loose of heterosexual*).
- g. Selama dalam lembaga pemasyarakatan dan munculnya perlakuan yang bermacam-macam baik dari petugas maupun sesama narapidana lainnya, dapat menghilangkan harga dirinya (*loose of prestige*).
- h. Akibat dari berbagai perampasan kemerdekaan di dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana dapat menjadi kehilangan akan rasa percaya diri (*loose of belief*).
- i. Narapidana selama menjalani pidananya di dalam lembaga pemasyarakatan, karena perasaan tertekan dapat kehilangan daya kreativitasnya, gagasan-gagasannya dan imajinasinya (*loose of creativity*).

Sementara itu terjadi transformasi konseptual dalam sistem pidana dan pemidanaan yang terjadi di dunia pada umumnya dari konsep retribusi kearah konsepsi reformasi ikut mendorong munculnya semangat untuk mencari alternative pidana yang lebih manusiawi, dengan kata lain konsep pemidanaan yang hanya berorientasi pada pembalasan (*punishment to punishment*) telah ditinggalkan dan muncul konsep baru yaitu konsep pembinaan (*treatment philosophy*).⁹⁰ Kecenderungan untuk selalu mencari alternative pidana perampasan kemerdekaan juga bertolak dari kenyataan secara ekonomis bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan sangat besar seperti untuk biaya hidup narapidana yakni makan, pakaian dan

⁹⁰ Jimly Asshiddiqie, **Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia : Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional**, Penerbit Angkasa, Bandung, 1996, hal. 161.

sebagainya yang dari waktu ke waktu menunjukan angka yang relatif besar.

Kritik mengenai segi negatif dari pidana penjara tidak hanya dilontarkan terhadap pidana penjara menurut pandangan retributif yang tradisional, tetapi juga terhadap konsepsi modern yang lebih menekankan pada unsur perbaikan pada diri pelanggar (reformasi, rehabilitasi dan resosialisasi). **Sutherland** dan **Cressey** misalnya menyatakan bahwa keberhasilan pidana penjara sebagai sarana untuk reformasi adalah sangat kecil, walaupun hal ini sulit ditentukan secara tepat. Malahan ditegaskan, bahwa sesungguhnya tidaklah diketahui apakah pengulangan (*residivisme*) itu menurun disebabkan oleh rumah-rumah penjara yang telah mengembangkan metode pembinaan secara individual. Metode-metode reformasi telah gagal dalam mengurangi angka kejahatan.⁹¹

Penilaian Terakhir adalah yang cukup memprihatinkan dari PBB pada kongres kelima tahun 1975 tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Dalam salah satu laporannya dinyatakan bahwa pengalaman penjara demikian membahayakan sehingga merusak atau menghalangi secara serius kemampuan si pelanggar untuk mulai lagi ke keadaan patuh pada hukum setelah ia dikeluarkan dari penjara.⁹²

Kritik terhadap akibat negatif dari pidana penjara juga lebih keras lagi terhadap pidana penjara jangka pendek. **D. Schaffmeister** dalam

⁹¹ Barda Nawawi Arief, 2000, **Op.Cit.**, hal. 48 – 49.

⁹² Fifth United Nation Congress, 1976, **Op.Cit.**, hal. 32.

bukunya yang berjudul : *Pidana Badan Singkat sebagai Pidana di Waktu Luang* menyatakan antara lain : ⁹³

"Secara umum dinyatakan bahwa bilamana pidana badan singkat diperbandingkan dengan pidana badan yang lama (penjara biasa), maka pidana badan singkat memiliki semua kelemahan pidana penjara, tetapi tidak memiliki satupun aspek-aspek positif darinya. Argument-argumen lain yang diajukan lebih rinci pada dasarnya menyatakan hal yang sama seperti di atas. Penulis merangkumkan berbagai kritikan tersebut sebagai berikut : 1) relasi-relasi sosial yang dimiliki terpidana dapat terputus atau setidaknya terganggu : hilangnya pekerjaan, gangguan terhadap hubungan keluarga, menyulitkan dibangunnya relasi-relasi baru karena merupakan "bekas narapidana"; 2) waktu pemidanaan terlalu singkat baik untuk dapat memberikan pengaruh positif bagi terpidana maupun untuk menjalankan proses resosialisasi; 3) pengenalan dengan penjara membuka kemungkinan terpidana tercemar oleh perilaku criminal terpidana lainnya. Lebih jauh lagi, dapat terjadi, penjara tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan bagi terpidana; 4) menghindari penggunaan pidana badan singkat dapat menghemat pengeluaran biaya karena pelaksanaan pidana penjara dalam dirinya sendiri memakan biaya cukup tinggi. Terlebih lagi anggaran yang harus dikeluarkan berkaitan erat dengan tunjangan sosial yang kemudian harus dikeluarkan; dan 5) sesungguhnya resume dari keempat poin di atas, biaya tinggi yang dikeluarkan bagi pelaksanaan pidana ini tidak sebanding dengan efek pidana yang diharapkan. Sekitar dua pertiga terpidana yang dikenakan pidana badan singkat dalam waktu singkat setelah mereka dibebaskan akan masuk penjara kembali.; penjatuhan pidana badan singkat tampak sebagai "jalan tidak berujung".

⁹³ D. Scaffmeister, *Pidana Badan Singkat sebagai Pidana di Waktu Luang*, Terjemahan Tristam Pascal Moeljono, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1981, hal. 15 – 16.

Terhadap pidana penjara jangka pendek kongres PBB kedua tahun 1960 di London, tentang *The Prevention Crime and the Treatment of Offenders* dalam laporannya menyatakan :⁹⁴

1. Dalam banyak hal pidana penjara jangka pendek boleh jadi berbahaya, dan oleh karena itu penggunaannya yang luas tidak dikehendaki. Akan tetapi Kongres mengakui bahwa dalam beberapa hal tujuan keadilan mungkin memerlukan penenaan pidana penjara jangka pendek.
2. Penghapusan menyeluruh dari pidana penjara jangka pendek dalam prakteknya tidaklah mungkin, dan pemecahan yang realistic hanya dapat dicapai dengan mengurangi jumlah penggunaannya.
3. Pengurangan secara berangsur-angsur ini harus dihasilkan terutama dengan meningkatkan penggunaan bentuk-bentuk pengganti dari pidana penjarajangka pendek, seperti misalnya pidana bersyarat (*suspended sentence*), pengawasan (*probation*), denda (*fine*), pekerjaan/tugas di luar sekolah (*extramural labour*), dan tindakan-tindakan lain yang tidak mengandung perampasan kemerdekaan.
4. Dalam hal pidana penjara jangka pendek merupakan satu-satunya penetapan yang (dianggap) sesuai untuk si pelanggar, pidana itu harus dijalankan atau dilaksanakan di dalam lembaga-lembaga yang tepat, dengan ketentuan adanya pemisahan dari orang-orang yang dijatuhi pidana penjara untuk jangka waktu yang lama, dan pembinaan harus sejauh mungkin bersifat konstruktif dan bersifat pribadi. Se jauh dapat dilaksanakan, pilihan harus diberikan kepada lembaga terbuka (*open institution*) sebagai tempat untuk melaksanakan pidana itu.

Dalam Kongres PBB kedua Tahun 1960 tersebut, dikeluarkan suatu rekomendasi tentang pembatasan atau pengurangan penggunaan yang luas dari pidana penjara pendek. Resolusi ini jelas berkaitan erat dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan dari *Standard Minimum Rules* (SMR) yang disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB dalam resolusinya No. 663 C (XXIV) Tahun 1957, yaitu untuk dapat menampung, mengawasi dan membina para narapidana dengan membatasi jumlah

⁹⁴ Barda Nawawi Arief, 2000, *Op.Cit.*, hal. 196.

narapidana tidak boleh melampaui kapasitas lembaga yang pada umumnya disebabkan karena besarnya jumlah narapidana yang dijatuhi hukuman pidana penjara jangka pendek.⁹⁵

Dalam Rule 19 *Standar Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (SMR-JJ) Tahun 1985 (*The Beijing Rules*), memberikan pedoman mengenai penggunaan sekecil mungkin dari penempatan pada lembaga pemasyarakatan. Dalam Rule 19.1 SMR-JJ tersebut dinyatakan bahwa penempatan seorang remaja pada suatu lembaga akan senantiasa merupakan pelulusan dari pilihan terakhir dan untuk jangka waktu sesingkat mungkin.⁹⁶

Dalam *Commentary* Rule 19.1 tersebut disebutkan bahwa ilmu kriminologi yang progresif menyokong penggunaan "perlakuan" non-kelembagaan di atas perlakuan kelembagaan. Banyaknya pengaruh-pengaruh merugikan terhadap seorang individu yang tampak tak terhindarkan di dalam wadah kelembagaan ketika melakukan upaya-upaya pembinaan. Hal ini terutama berlaku bagi anak-anak yang rawan terhadap pengaruh-pengaruh negatif. Lebih jauh lagi, pengaruh-pengaruh negatif tersebut tidak hanya berupa kehilangan kebebasan saja, tetapi juga pemisahan dari lingkungan sosial sehari-hari yang hal tersebut dapat menjadi lebih parah lagi ketika dirasakan oleh para anak-anak dibandingkan bagi orang dewasa karena tahap pertumbuhannya yang

⁹⁵ *Ibid*, hal. 47.

⁹⁶ "Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Remaja (Beijing Rules), Disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No. 40/33 tanggal 29 November 1985", UNICEF.

masih awal, maka sedapat mungkin dihindarkan pengenaan hukuman berupa penjara kecuali tidak terdapat alternatif lain yang memadai bagi perbuatan yang telah dilakukannya.⁹⁷

Di Indonesia sendiri sekalipun usaha-usaha untuk memperbaiki perlakuan terhadap para narapidana sudah dimulai sejak tahun 1955, namun baru tahun 1964 diterima pandangan Dr. Sahardjo tentang Konsep Pemasyarakatan. Konsep pemasyarakatan dari Sahardjo ini diterima dalam Konferensi Dinas Direktur-Direktur Penjara di seluruh Indonesia di Lembang, Bandung pada tahun 1964, sebagai sistem pembinaan napi di penjara (Sistem Pemasyarakatan) dengan menetapkan pula 10 prinsip dasarnya, yang dikenal dengan *Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan*.

Seperti dikatakan oleh **Sahardjo**, bahwa penghukuman bukanlah hanya untuk melindungi masyarakat semata-mata melainkan harus pula berusaha membina si pelanggar hukum⁹⁸. Dengan ini maka dapat dikatakan bahwa sistem pemasyarakatan menolak secara tegas prinsip retributif dan sebaliknya menerima tujuan pemidanaan yang bersifat rehabilitatif dan reformatif. Dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan itu diharapkan sistem pemasyarakatan akan mencapai tujuan yang utama yaitu mencegah pengulangan pelanggaran hukum, aktif, produktif serta berguna bagi masyarakat, dan mampu hidup bahagia di dunia dan akhirat.

Romli Atmasasmita mengatakan, dengan berpegang pada asumsi bahwa arti pemasyarakatan : "memasyarakatkan kembali narapidana

⁹⁷ Penjelasan dari Rule 19 SMR-JJ, Ibid.

⁹⁸ Sahardjo, **Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila Manipol Usdek**, Pidato Pengukuhan Gelar Doktor Honoris Causa di Fakultas Hukum UI, Jakarta, 5 Juli 1963, hal. 21-22.

sehingga menjadi warga yang baik dan berguna" atau "healthy reentry into the community" yang pada hakekatnya atau intinya adalah resosialisasi.⁹⁹ Sementara yang menjadi titik persoalan resosialisasi adalah "mengubah tingkah laku terpidana agar sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat bebas pada umumnya.

Maka dalam kaitan dengan pembahasan hal tersebut di atas, maka menurut penulis, pemasyarakatan di dalam lembaga (penjara) kiranya kurang menguntungkan jika dibandingkan dengan proses pemasyarakatan yang dilakukan di luar lembaga. Karenanya perlu didayagunakan bentuk pidana di luar lembaga (*non-custodial sentence*) seperti misalkan pidana kerja sosial, yang pembinaan terpidananya dapat dilakukan di luar lembaga.

C. Masalah Pidana Kerja Sosial

Perkembangan terakhir dalam hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan persoalan pidana yang menjadi trend/kecenderungan internasional adalah berkembangnya konsep untuk mencari alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan (*alternative to imprisonment*) dalam bentuknya sebagai sanksi alternatif (*alternative sanction*).¹⁰⁰ Upaya pencarian sanksi pidana alternatif tersebut berdasarkan atas suatu kenyataan bahwa di dalam perkembangannya pemberian pidana

⁹⁹ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 30.

¹⁰⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 132.

perampasan kemerdekaan seperti pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana kurungan semakin tidak disukai, baik atas pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan filosofis pemidanaan maupun atas pertimbangan ekonomis.

Pidana kerja sosial (*community service order*) merupakan salah satu jenis pidana yang berdasarkan kajian baik teoritis maupun praktis yang dilakukan oleh negara-negara eropa dan dapat menjadi alternatif dari pidana perampasan, yang kemudian kecenderungan masyarakat internasionalpun menerima pidana kerja sosial tersebut sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan dalam suatu resolusi PBB yang dikenal dengan nama *The Beijing Rules*. Kecenderungan inipun juga oleh bangsa Indonesia sudah ditransformasikan dalam bentuk konsep dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia, yaitu di dalam Rancangan KUHP Baru Indonesia (R. KUHP).

Diadopsinya pidana kerja sosial dalam sistem hukum pidana Indonesia itu tidak terlepas dari tekad untuk menjadikan hukum pidana Indonesia yang tidak saja berorientasi pada perbuatan saja, tetapi juga berorientasi pada pelaku sekaligus (*daad dader strafrecht*).¹⁰¹ Selain itu diadopsinya pidana kerja sosial tersebut juga merupakan upaya untuk menjadikan hukum pidana lebih fungsional dan manusiawi, disamping sangat relevan dengan falsafah pemidanaan yang saat ini sedang dianut yaitu falsafah pembinaan (*treatment philosophy*). Oleh karena itu, dengan

¹⁰¹ Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002, hal. 2.

pidana kerja sosial diharapkan dapat menjadi jenis alternatif pidana yang efektif tanpa menghilangkan esensi dari pidana itu sendiri karena diharapkan dengan pidana kerja sosial tersebut, dampak negatif dari penerapan pidana perampasan kemerdekaan seperti stigmatisasi, dehumanisasi dan dampak negatif lain dapat dihindari.

1. Pengertian dan Perkembangan Pidana Kerja Sosial

Pidana kerja sosial dalam wacana ilmu hukum pidana diterjemahkan dari bahasa Inggris dengan istilah *Community Service Order*. Pidana kerja sosial merupakan bentuk pidana di mana pidana tersebut dijalani oleh terpidana dengan melakukan pekerjaan sosial yang ditentukan.¹⁰² Berbeda dengan jenis pidana perampasan kemerdekaan, pidana ini merupakan jenis pidana yang harus dijalani oleh terpidana di luar lembaga (*non custodial*) dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial.

Dalam kamus hukum Oxford, pengertian dari Pidana Kerja Sosial (*community service order*) adalah:

*"an order that requires an offender (who must consent and be aged at least 16) to perform unpaid work for between 40 and 240 hours under the supervision of probation officer. Such an order replaces any other form of punishment (e.g. imprisonment); it is usually based on a probation officer's report and carried out within 12 months (unless extended). Breach of the order may be dealt with by fine or by revocation of the order and the imposition of any punishment that could originally have been imposed for the offence"*¹⁰³

¹⁰² Ibid, hal. 7

¹⁰³ Dictionary of Law, Oxford University Press, Market House Books Ltd, 1997.

Jadi pidana kerja sosial merupakan suatu pidana yang dikenakan kepada para pelaku kejahatan dengan melakukan suatu pekerjaan atas permintaannya, dengan adanya kriteria atau syarat-syarat tertentu seperti pelaku haruslah cakap atau mampu melakukan pekerjaan tersebut dan berusia minimal 16 tahun. Pekerjaan yang dilakukan itu tidak dibayar (sukarela) dengan lamanya waktu bekerja antara 40 – 240 jam dibawah pengawasan. Pidana kerja sosial merupakan pidana pengganti selain pidana penjara dan dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan, setelah itu bisa ditambah kembali waktunya. Jika ada pelanggaran ketika menjalankan pidana kerja sosial tersebut maka dapat digantikan dengan pidana denda atau pidana lainnya. Dalam konsep RKUHP, Pidana Kerja Sosial dikenakan paling lama 240 jam untuk terpidana yang telah berumur 18 tahun, dan 120 jam untuk terpidana yang berumur di bawah 18 tahun dan paling pendek 7 jam.¹⁰⁴

Secara teoritis pidana kerja sosial mengandung beberapa dimensi sebagaimana yang terurai dibawah ini :¹⁰⁵

1. Pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek.

Sesuai dengan dasar pemikiran yang melatar belakangi lahirnya jenis pidana kerja sosial yaitu upaya untuk alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek, maka dalam praktiknya di negara-negara eropa pidana kerja sosial dipakai

¹⁰⁴ Barda Nawawi Arief, 1996, *Op. Cit.*, hal. 120.

¹⁰⁵ Tongat, *Op.Cit.*, hal. 8 - 9

sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek sekalipun dengan cara penerapan yang berbeda sebagai pidana mandiri atau sebagai syarat yang berkaitan dengan penjatuan pidana bersyarat.

2. Pidana kerja sosial sebagai alternatif sanksi apabila denda tidak dibayar.

Di beberapa negara seperti Italia, Jerman dan Swiss, pidana kerja sosial dapat menggantikan pidana penjara pengganti apabila terpidana denda gagal membayar dendanya. Jadi apabila ada seorang terdakwa oleh hakim dijatuhi pidana denda kemudian tidak dapat membayar denda tersebut, maka terpidana harus menjalani pidana pengganti, bisa berupa pidana penjara atau pidana kerja sosial.

3. Pidana kerja sosial dalam kerangka grasi.

Di beberapa negara eropa, pidana kerja sosial ini dapat menjadi syarat diterapkannya grasi. Di negara Belanda misalnya, grasi dapat dijatuhkan atau diterapkan kepada seorang terpidana dengan syarat bahwa terpidana harus melaksanakan pidana kerja sosial. Demikian pula pula di Jerman, pidana kerja sosial dapat menjadi alternatif pidana perampasan kemerdekaan sebagai akibat denda tidak terbayar dengan melalui grasi. Dalam perkembangannya, pidana kerja sosial ini bahkan dapat menjadi syarat untuk dapat dilakukan pelepasan bersyarat bagi narapidana.

Perkembangan ini sudah terjadi di Jerman berdasarkan Pasal 153a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jerman.

Sebenarnya tidak dalam semua klasifikasi tindak pidana ataupun dalam tiap jenis tindak pidana dapat diterapkan pidana kerja sosial, pidana kerja sosial hanya dapat diterapkan atau dijatuhkan dengan syarat-syarat tertentu, mengutip dari pendapat **Muladi** ada berbagai syarat yang dapat memungkinkan penjatuhan pidana kerja sosial antara lain dikemukakan sebagai berikut : ¹⁰⁶

1. Yang berkaitan dengan tindak pidana

Secara umum, khususnya dinegara-negara eropa yang sudah menerapkan jenis pidana ini, pidana kerja sosial hanya dapat diterapkan dalam jenis tindak pidana tertentu dengan beberapa persyaratan yaitu :

- a. Pidana kerja sosial hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang tidak terlalu berat.
- b. Diterapkan terhadap jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda (*crimes against property*) dengan syarat, bahwa pidana penjara yang akan diterapkan tidak melebihi waktu tertentu.
- c. Masalah pertimbangan usia pelaku dan *criminal record* dari pelaku itu sendiri. Berkaitan dengan usia pelaku, penerapan pidana kerja sosial juga harus mempertimbangkan adanya

¹⁰⁶ **Ibid**, hal. 9

larangan bagi pelaku yang masih di bawah umur yang berdasarkan hukum perburuhan dilarang untuk melakukan kerja. Maka penerapan pidana kerja sosial terhadap pelaku anak-anak harus diperhatikan hak-hak pelaku tersebut. Sementara yang berkaitan dengan *criminal record* dari pelaku, maka pidana kerja sosial biasanya tidak akan diterapkan pada pelaku kejahatan yang memiliki catatan kejahatan yang tidak baik (*residivis*), seperti di negara Perancis. Pidana kerja sosial dapat diterapkan pada *residivis* apabila dikaitkan dengan pidana bersyarat dan bukan sebagai pidana yang mandiri.

2. Jumlah jam pidana kerja sosial

Pada umumnya ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan tentang pidana kerja sosial juga menyangkut pengaturan tentang minimum dan maksimum jam kerja pidana kerja sosial, disamping jangka waktu maksimum pelaksanaan pidana kerja sosial.

3. Persetujuan terpidana

Ketentuan lain mengenai pidana kerja sosial yang berlaku di berbagai negara adalah adanya penegasan bahwa penerapan pidana kerja sosial harus didasarkan atas persetujuan terpidana. Hal ini dibutuhkan untuk menghindari konflik dengan berbagai konstitusi dan traktat yang melarang kerja paksa (*force labour*), disamping itu juga dibutuhkan agar hakim dapat menjamin bahwa terpidana memang mempunyai motivasi untuk melakukan pidana kerja sosial.

4. Isi pidana kerja sosial

Hakim yang menjatuhkan pidana kerja sosial di Pengadilan hanya menetapkan jumlah jam dan jangka waktu yang harus dipenuhi. Sementara pelaksanaannya secara teknis, misalnya berkaitan dengan tempat dimana pidana kerja sosial harus dijalani, berapa jam terpidana harus menjalani pidana kerja sosial dalam setiap harinya dan sebagainya harus dilakukan oleh *probation service*.

5. Kegagalan menjalani pidana kerja sosial

Dalam hal seorang terpidana gagal menjalani pidana kerja sosial, maka kegagalan tersebut akan membawa akibat tertentu bagi terpidana. Akibat tersebut dapat berupa :

- a. Apabila pidana kerja sosial tersebut berupa pidana yang mandiri maka akibatnya dapat berupa dijatuhi denda sampai batas jumlah tertentu (misalnya di Inggris \$ 100), mengulangi lagi pelaksanaan pidana kerja sosial atau dikenakan pidana alternatif lain. Bahkan di Perancis, kegagalan pidana kerja sosial dikualifikasikan sebagai tindak pidana sendiri yang dapat dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan antara 2 bulan sampai 2 tahun.
- b. Apabila pidana kerja sosial ditetapkan dalam kaitannya dengan pidana bersyarat (*suspended sentences*), maka kegagalan terpidana menjalani pidana kerja sosial dapat mengakibatkan

diterapkannya pidana penjara yang ditunda seperti yang berlaku di Belanda, Norwegia dan Perancis. Akibat kegagalan tersebut, terpidana juga dapat diharuskan untuk mengulangi pidana kerja sosial itu.

Selain itu apabila pidana kerja sosial dikaitkan dengan alternatif pidana perampasan kemerdekaan sebagai konsekuensi tidak dibayarnya denda, kegagalan atas pelaksanaan pidana kerja sosial dapat mengakibatkan ditetapkannya pidana yang asli (*original penalty*).

2. Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif dari Pidana Penjara

Upaya untuk mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan sudah berlangsung sejak lama yang dilakukan dalam kerangka politik kriminal, dan hal tersebut telah dikemukakan dalam sub bab sebelumnya di atas. Sejak akhir abad ke-19 dalam berbagai Kongres PBB dan Konvensi Internasional serta pendapat para ahli hukum pidana yang membicarakan mengenai pencarian alternatif pidana perampasan kemerdekaan. Salah satu contoh pidana perampasan kemerdekaan yang sering diterapkan adalah pidana penjara. Selain itu ada pidana perampasan kemerdekaan lain seperti pidana kurungan dan pidana tutupan.

Perkembangan upaya mencari alternatif pidana kemerdekaan juga diwarnai dengan munculnya perbedaan konseptual berkaitan

dengan makna dan hakikat alternatif pidana perampasan kemerdekaan itu sendiri. Dalam konteks ini muncul dua pemahaman, yaitu :¹⁰⁷

1. Alternatif terhadap pidana perampasan kemerdekaan (*alternative to custodial sentences*) diartikan sebagai sanksi alternatif, yaitu sanksi yang dapat menggantikan pidana perampasan kemerdekaan (*sanction which can replace custodial sentence*). Sanksi ini hanya diterima apabila dapat melayani tujuan dan kegunaan pidana perampasan kemerdekaan.
2. Alternatif terhadap pidana perampasan kemerdekaan diartikan sebagai usaha mencapai tujuan alternatif (*alternative goals*) yang tidak dapat dicapai dengan pidana perampasan kemerdekaan. Dengan kata lain dapat dinyatakan, bahwa pidana perampasan kemerdekaan berada pada tujuan yang salah. Tujuan akhirnya adalah menggantikan pidana perampasan kemerdekaan dengan sistem yang disebut *non-punitive measures*. Dengan demikian *alternatives sanctions* diartikan sebagai *alternative objectives*.

Menurut Muladi, upaya untuk mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan harus tetap realistis, maksudnya tetap harus berpijak pada realitas yang ada.¹⁰⁸ Menurut pandangan kaum abolisionis yang bersifat sangat radikal tidak mungkin dapat terwujud, dimana upaya untuk menggantikan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dengan *system based on mediation (conflict solving)*

¹⁰⁷ Muladi, 1995, *Op.Cit.*, hal. 133.

¹⁰⁸ *Ibid*, hal. 133.

yang tidak memberikan tempat sama sekali pada pidana perampasan kemerdekaan sebagaimana yang dikehendaki kaum abolisionis jadi sangat sulit diwujudkan.

Menurut Muladi, yang terpenting adalah bagaimana penggunaan pidana perampasan kemerdekaan dapat dibatasi terutama pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek, inilah hakekatnya yang dimaksud dengan upaya mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan.¹⁰⁹ Pemahaman ini sejalan dengan kecenderungan internasional yang sedang terjadi saat ini seperti yang terlihat dalam Kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime an The Treatment of Offenders* yang menghendaki kemungkinan untuk membatasi penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek.

Kemudian muncul suatu alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan tersebut yaitu dengan pidana kerja sosial. Dilihat dari sejarah dan perkembangannya, pada awalnya pidana kerja sosial dilaksanakan dalam bentuk melakukan pekerjaan yang bermanfaat untuk masyarakat guna menghindari pidana perampasan kemerdekaan yang berkembang di negara-negara eropa. Kemudian pada akhir abad ke-19 dan awal permulaan abad ke-20, pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana denda mulai dicantumkan dalam

¹⁰⁹ Tongat, 2003, *Op.Cit.*, hal.15

perundang-undangan di beberapa negara eropa seperti Jerman, Swiss, Italia dan Norwegia.

Namun demikian, sampai pada permulaan abad ke-20 pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan masih menampilkan dirinya sebagai kerja paksa (*force labour*). sekalipun dilakukan dengan tanpa perampasan kemerdekaan, *work as penalty* dengan ciri tersebut di atas lebih memperlihatkan sebagai kerja paksa dari pada sebagai kerja sosial, tetapi kemudian dalam perkembangan selanjutnya mulai dimodernisir sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan sehingga dapat meninggalkan sifat kerja pakasanya (*force labour*) seperti yang banyak diterapkan di negara-negara eropa dewasa ini merupakan jenis pidana yang manusiawi dan benar-benar menampilkan dirinya sebagai *avoluntarily undertaken obligation*, yaitu suatu kewajiban dari pekerjaan yang telah ditetapkan didasarkan atas keinginan secara sukarela.¹¹⁰

D. Perlindungan Hukum Anak Dalam Proses Pidana

Anak merupakan elemen yang mempunyai arti penting bagi suatu negara. Anak adalah bagian dari generasi muda, sebagai salah satu dari sumber daya manusia serta merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa dengan segala ciri dan karakteristiknya yang khas dan khusus. Dalam kedudukan demikian tersebut anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan

¹¹⁰ Ibid, hal. 17-18.

perkembangannya, baik fisik, mental maupun sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Perlindungan anak pada dasarnya merupakan persoalan yang bersifat universal, mencakup berbagai aspek serta mempunyai ruang lingkup yang cukup kompleks dan luas. Perlindungan anak dapat mempunyai arti sebagai usaha perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹¹¹ Termasuk juga masalah pertumbuhan dan perkembangan anak pada saat ini dan di masa yang akan datang, mengingat pentingnya seorang anak sebagai generasi penerus bangsa.

Menurut **Bagir Manan**, dalam usaha menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku menyimpang anak-anak, sekali-kali tidak boleh melupakan kedudukan anak dengan segala karakternya yang khusus. Walaupun anak pada dasarnya dan dalam batas wajar tidak menentukan sendiri langkah perbuatan berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi karena kondisinya sebagai anak, keadaan sekitarnya dapat berpengaruh lebih besar dalam menentukan sikap dan nilai pribadinya.¹¹²

Penanganan yang salah terhadap anak-anak bermasalah, dapat berpengaruh pada masa depan anak tersebut seterusnya. Isu di sekitar

¹¹¹ Barda Nawawi Arief, **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 153.

¹¹² Dalam tulisan Prof. Dr. Bagir Manan, SH., M.CL., dalam buku **Peradilan Anak di Indonesia**, penyunting : Romli Atmasasmita, Mandar Maju, Bandung, 1997, hal. 7.

tukar pengalaman diantara sesama narapidana mengisyaratkan bahwa tingkah laku kriminal itu dapat dipelajari.¹¹³ Pemasyarakatan merupakan tempat berkumpulnya para pelanggar hukum. Berkumpulnya pelanggar hukum dengan berbagai karakteristik dan latar belakang kejahatannya memungkinkan mereka saling bertukar pengalaman mengenai cara-cara melakukan kejahatan.

Seperti dikatakan oleh **E. Sutherland**, dengan teorinya *differential association* yang menyatakan tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi.¹¹⁴ Berdasarkan pendapat tersebut, kekhawatiran akan sanksi pidana yang kurang tepat bagi terpidana anak, terutama hubungan pergaulan bagi anak dalam lingkungan penjara selama menjalani masa pembedanaannya yang dapat membentuk anak menjadi lebih jahat lagi ketika ia selesai menjalani proses pembedanaan tersebut. Hal ini menjadi bertolak belakang dari tujuan pembedanaan seperti yang dikemukakan oleh **Ted Honderich** bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila : *pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu dikenakan.*¹¹⁵

Menurut **Barda Nawawi Arief**, tujuan dasar dari peradilan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan

¹¹³ Petrus Irwan Panjaitan, Pandapotan Simorangkir, **Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana**, Pustaka sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal. 44.

¹¹⁴ *Ibid*, hal. 45.

¹¹⁵ Barda Nawawi Arief, 1996, **Op. Cit.**, hal. 39.

kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial, tetapi tidak harus kemudian diartikan bahwa kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat, melainkan harus dilihat bahwa mendahulukan atau mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari mewujudkan kesejahteraan sosial.¹¹⁶

Perhatian pada masalah perlunya perlindungan khusus bagi anak yang dijamin oleh hukum, berkaitan erat dengan prinsip kedua dari *Declaration of the Rights of the Child* yang lengkapnya berbunyi :¹¹⁷

The child shall enjoy special protection, and shall be given opportunities and facilities, by law and other means, to enable him to develop physically, morally, spiritually and socially in healthy and normal manner in conditions of freedom and dignity. In the enactment of laws for this purpose the best interest of the child shall be the paramount consideration.

Tujuan dan dasar pemikiran untuk mengutamakan kesejahteraan anak ketika anak berhadapan dengan masalah hukum, ditegaskan pula dalam SMR-JJ1985 (*Beijing Rules*), khususnya dalam *Commentary Rule* 5.1 mengenai *Aims of Juvenile Justice*, yang menunjuk pada dua tujuan atau sasaran yang sangat penting, yaitu :¹¹⁸

- a. memajukan kesejahteraan anak (*the promotion of the well being of the juvenile*) dan;
- b. prinsip proporsionalitas (*the principle of proportionality*)

Masalah perlindungan hukum anak telah cukup lama menjadi pusat perhatian dunia internasional, yaitu berawal dari lahirnya Deklarasi

¹¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Op.Cit.*, hal. 111.

¹¹⁷ *Ibid*, hal. 109.

¹¹⁸ *Ibid*, hal. 112.

Jenewa tentang Hak-Hak Anak Tahun 1924 yang diakui dalam *Universal Declaration of Human Rights* pada tahun 1948 dan kemudian disahkan oleh Majelis Umum PBB menjadi *Declaration of the Rights of the Child* (Deklarasi Hak-Hak Anak) pada tanggal 20 November 1958.¹¹⁹ Dalam beberapa Kongres PBB tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* yang memfokuskan pada persoalan *Juvenile Delinquency*; yaitu Kongres PBB ke-1 tahun 1955 di Jenewa, Swiss antara lain dibicarakan tentang *Prevention of Juvenile Delinquency*, dalam Kongres ke-2 tahun 1960 di London, Inggris antara lain dibicarakan masalah *New Forms of Juvenile Delinquency* dan *Special Police Services for the Prevention of Juvenile Delinquency*. Demikian pula dalam Kongres PBB ke-3 tahun 1965 di Stockholm, Swedia juga dibicarakan mengenai *Juvenile Delinquency*.

Pusat perhatian usaha perlindungan hukum anak tersebut dalam perkembangannya telah diarahkan pada masalah *Juvenile Justice* (Peradilan Anak), antara lain pada Kongres PBB ke-VI tahun 1980 di Caracas, Venezuela yang membicarakan tentang *Juvenile Justice : Before and After the Onset of Delinquency* dan menghasilkan sebuah Resolusi mengenai *Development of Minimum Standards of Juvenile Justice* yang meletakkan prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggaraan peradilan anak dalam rangka melindungi kepentingan dan hak-hak asasi anak yang terlibat dalam persoalan hukum. Resolusi inilah yang kemudian menjadi

¹¹⁹ Supriyadi, *Kebijakan Legislatif Mengenai Perlindungan Hukum Anak Dalam Proses Peradilan*, *Majalah Mimbar Hukum Fakultas Hukum UGM*, Edisi No. 42/X/2002, hal. 87.

embrio lahirnya *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau yang dikenal dengan *The Beijing Rules* yang disetujui dalam Kongres PBB ke-VII tahun 1985 di Milan, Italia dan kemudian dikukuhkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/33 tanggal 29 November 1985.

Demikian pula dalam Kongres PBB ke-IX mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offender* tahun 1995 di Kairo, Mesir juga diajukan dua *draft resolution*. Kedua draft resolution tersebut memuat tentang *Application of United Standards and Norms in Juvenile Justice* dan *Elimination of Violence Against Children*.¹²⁰

Perlindungan hukum anak telah dilakukan pula di Indonesia, dimana terdapat berbagai macam peraturan perundang-undangan yang di dalamnya memuat ketentuan yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Misalnya dalam Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 45, 46 dan 47 yang memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, yang kemudian oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pasal tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, Undang-undang No. 12 Tahun

¹²⁰ *Ibid*, hal. 88.

1995 tentang Pemasyarakatan, serta Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan sebagainya.

Dalam *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* 1985 (SMR-JJ) digariskan prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan dan seharusnya diimplementasikan dalam penyelenggaraan peradilan anak. Salah satu prinsip dasar yang digariskan dalam SMR-JJ tersebut adalah tujuan atau dasar pemikiran dari peradilan anak sebagaimana disebutkan dalam Rules 5.1 mengenai *Aims of Juvenile Justice*, yaitu bahwa :

"The juvenile justice system shall emphasize the well being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offender and the offence".

Dari Rules 5.1 di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa sistem peradilan anak seyogianya mengutamakan kesejahteraan anak dan harus menjamin bahwa sanksi apapun terhadap pelaku anak seyogianya selalu dalam keseimbangan antara keadaan pelaku dan tindak pidana yang dilakukannya. Selanjutnya dalam *Commentary Rules 5.1*, dijelaskan bahwa Rules 5.1. tersebut menunjukkan dua tujuan atau sasaran yang sangat penting dalam penyelenggaraan peradilan anak,. Pertama, *the promotion of the well being of the juvenile* (memajukan kesejahteraan anak) yang merupakan *"the main focus of those legal system in which juvenile offenders"* dan menunjang prinsip *"the avoidance of merely punitive sanction"*. Kedua, *the principle of proportionality* (prinsip proporsionalitas) yang merupakan *"an instrument for curbing punitive*

sanctions". Dalam hubungannya dengan hal ini makareaksi terhadap *young offenders* harus didasarkan pada keseimbangan antara "*the gravity of the offence*" dan "*the individual circumstances of offender*".

Rule 10 SMR-JJ mengatur tentang *Initial Contact* (kontak awal) dalam penyidikan dan penuntutan yang mengandung beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan yaitu :¹²¹

1. Orang tua atau walinya harus segera diberitahu dalam waktu yang sesingkat mungkin setelah penangkapan atau penahanan dilakukan terhadap anak. (Rule 10.1);
2. Hakim atau lembaga yang berwenang, tanpa menunda-nunda waktu, harus mempertimbangkan masalah pengeluaran anak tersebut (dari penangkapan atau penahanan). (Rule 10.2);
3. Kontak antara aparat penegak hukum dengan pelaku anak (*juvenile offender*) harus dilakukan dengan cara *respect the legal status of the juvenile* (menghormati kedudukan hukum anak) dan *avoid harm to her or him* (menghindarkan hal-hal yang merusak atau merugikan anak). (Rule 10.3).

Dari Rule 10 tersebut dapat digambarkan bahwa dalam penanganan masalah anak dalam proses hukum perlu diperhatikan hal-hal yang kiranya dapat mengganggu mental si anak itu sendiri dengan memposisikan anak tetap dalam keadaan "netral", maksudnya keadaan si anak tidak dalam tekanan. Mengingat proses penyidikan oleh penyidik

¹²¹ *Ibid*, hal. 90.

polisi atau penuntutan oleh Jaksa sering dilakukan dengan cara-cara seperti perlakuan terhadap orang dewasa. Aturan ini menunjukkan bahwa penanganan terhadap pelaku pidana anak harus dilakukan dengan sangat hati-hati sekali.

Penghindaran penahanan dalam sel maupun penjara sedini mungkin bagi para pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak jelas-jelas sangat diharapkan dan menjadi bagian yang sangat penting untuk diperhatikan. Seperti juga diatur dalam Rule 13 SMR-JJ yang memberikan pedoman penahanan sementara selama menunggu proses pemeriksaan pengadilan atau *detention pending trial* kiranya sebagai tindakan terakhir dan dilakukan sesingkat mungkin (*as measure of last resort and for the shortest possible periode of time*) (Rule 13.1). Dan jika dapat, sejauh mungkin diganti dengan “tindakan alternatif” seperti *close supervision, intensive care* atau *placement with a family or in an educational setting or home* (Rule 13.2)

Menurut penjelasan (*Commentary*) Rule 13 SMR-JJ dinyatakan bahwa penekanan terhadap perlunya tindakan-tindakan alternatif tersebut mengingat bahaya yang dapat ditimbulkan selama anak dalam penahan sementara, yaitu bahwa “*the danger to juvenile of criminal contamination while in detention pending trial must not be underestimated*”.

Usaha untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku anak sangat diperhatikan, terutama masalah penahanan ataupun bentuk usaha perampasan kemerdekaan lainnya terhadap anak. Selain dalam

masa ketika dalam proses penyidikan atau penuntutan samapi pada prosedur ketika proses peradilan. Demikian juga dalam masalah pemberian putusan dalam hal pembedaan. Seperti yang tercantum dalam Rule 17 SMR-JJ tersebut, digariskan mengenai "*guiding principles*", yaitu pedoman yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan oleh hakim, yakni :

1. bahwa sanksi yang dijatuhkan harus diseimbangkan dengan *the circumstances and the gravity of the offence, the circumstances and the needs of the juvenile* dan *the needs of the society*;
2. bahwa pengenaan *restrictions on the personal liberty of the juvenile* harus dilakukan dengan hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin;
3. bahwa penjatuhan *deprivation of personal liberty* tidak boleh dilakukan, kecuali terhadap tindak pidana yang serius, residivis dan karena tidak ada bentuk sanksi yang tepat;
4. bahwa penanganan kasus anak harus mempertimbangkan *the well being of the juvenile* sebagai *guiding factor*.

Selain prinsip atau pedoman dalam SMR-JJ 1985 (*The Beijing Rules*) tersebut di atas, terdapat juga beberapa prinsip dalam *Convention on the Rights of the Child* 1989 yang juga perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan peradilan anak, seperti dalam Artikel 37 *Convention on the Rights of the Child*, 1989 dinyatakan beberapa prinsip sebagai berikut : ¹²²

¹²² *Ibid*, hal. 92.

1. Tidak seorangpun anak akan menjadi sasaran penganiayaan atau perlakuan lain atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merusak. Demikian pula pidana mati dan pidana penjara tanpa kemungkinan dibebaskan, tidak akan dikenakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang berusia dibawah 18 tahun.
2. Tidak seorangpun anak akan, secara tidak sah atau sewenang-wenang dirampas kemerdekaannya. Penangkapan, penahanan atau pemidanaan terhadap anak akan dilakukan sesuai dengan hukum dan hanya dikenakan sebagai tindakan terakhir dan untuk masa yang sesingkat mungkin;
3. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dihargai martabatnya sebagai manusia, dan dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan orang seusianya. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisahkan dari tahanan dewasa kecuali dengan mempertimbangkan demi kepentingan terbaik anak dan berhak untuk tetap berkomunikasi dengan keluarganya;
4. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak mendapat bantuan hukum, berhak melakukan pembelaan atas dasar hukuman perampasan kemerdekaannya di muka sidang pengadilan atau terhadap pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapatkan keputusan dengan segera atas tindakan yang dikenakan terhadap si anak.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ide Dasar Pidana Kerja Sosial Dalam Menunjang Tujuan Pemidanaan dan Pembinaan Terhadap Terpidana Anak.

Menetapkan sanksi pidana kerja sosial dalam perundang-undangan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan merupakan salah satu bagian dari kebijakan kriminal atau politik kriminal. Melaksanakan politik kriminal antara lain berarti membuat perencanaan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi atau menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan kejahatan.¹²³

Menurut **Karl O. Christiansen**, seperti yang dikutip oleh **Barda Nawawi Arief**, termasuk dalam perencanaan ini adalah disamping merumuskan perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, tetapi juga menetapkan sanksi-sanksi apa yang dikenakan terhadap si pelanggar.¹²⁴

Sebagai salah satu bagian dari politik kriminal, maka kebijakan apa yang selama ini ditempuh (*what is*) dan kebijakan yang bagaimana yang seharusnya ditempuh oleh pembuat undang-undang (*what ought to be*) dalam menetapkan suatu sanksi pidana,¹²⁵ termasuk dalam hal ini adalah masalah penetapan sanksi pidana kerja sosial yang dikenakan terhadap terpidana anak di Indonesia.

¹²³ Barda Nawawi Arief, 2000, **Op.Cit.**, hal. 2

¹²⁴ **Ibid.**

¹²⁵ **Ibid.**

Peninjauan terhadap kedua masalah tersebut sangatlah fundamental dalam rangka usaha pembaharuan hukum, karena ada pendapat bahwa pembaharuan hukum bukan merupakan suatu usaha yang bersifat *vast leggen van wat is* (menetapkan apa yang sudah berlaku), tetapi lebih merupakan suatu usaha *vast leggen hoort te zijn* (penetapan apa yang seharusnya atau sebaiknya berlaku).¹²⁶

Pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan strategis. Termasuk dalam klasifikasi masalah ini antara lain masalah kebijakan dalam menetapkan sanksi pidana, termasuk pidana kerja sosial terhadap anak. Kebijakan menetapkan pidana dalam perundang-undangan, yang juga dapat disebut sebagai tahap kebijakan legislatif, merupakan tahapan yang paling strategis dilihat dari keseluruhan proses kebijakan untuk mengoperasionalisasikan sanksi pidana. Pada tahap inilah dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana dan pemidanaan yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap selanjutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan (tahap yudikatif) dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana (tahap eksekusi/administrasi).

Melakukan pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya adalah membangun/memperbaharui pokok-pokok pemikiran/konsep/ide dasarnya, bukan sekedar memperbaharui perumusan pasal-pasal nya

¹²⁶ Ibid.

secara tekstual saja,¹²⁷ walaupun menurut penulis sendiri, masalah tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karena penerapan pasal-pasal merupakan cerminan dari ide dasar/konsep yang melatar belakangi ditetapkannya pasal-pasal tersebut.

Menurut **Barda Nawawi Arief**, materi dalam RKUHP (yang juga di dalam salah satu pasalnya memuat masalah penerapan sanksi pidana kerja sosial terhadap anak, penulis), ingin disusun dengan bertolak pada berbagai pokok pemikiran yang secara garis besar dapat disebut "ide keseimbangan", yang mencakup :¹²⁸

- a. keseimbangan monodualistik antara "kepentingan umum/masyarakat" dan "kepentingan individu/perorangan"; dalam ide keseimbangan "kepentingan umum/individu" itu tercakup juga ide perlindungan/kepentingan korban dan ide individualisasi pidana;
- b. keseimbangan antara unsur/faktor "objektif" (perbuatan/lahiriah) dan "subjektif" (orang/batiniah/sikap batin);
- c. keseimbangan antara kriteria "formal" dan "materil";
- d. keseimbangan antara "kepastian hukum, "kelenturan/elastisitas/fleksibilitas" dan "keadilan".

Bertolak dari pemikiran pokok-pokok di atas (ide kesatuan sistem; ide keseimbangan; ide perlindungan masyarakat; ide pemidanaan yang berorientasi pada individu/individualisasi pidana, ide elastisitas/fleksibilitas dan beberapa ide/pokok pemikiran lain), konsep RKUHP menetapkan kebijakan formulasi bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposive system*) dan pidana hanya merupakan alat sarana untuk mencapai tujuan, maka konsep

¹²⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 47 – 48.

¹²⁸ *Ibid*, hal. 48.

merumuskan tujuan pemidanaan yang bertolak pada keseimbangan 2 (dua) sasaran pokok, yaitu "perlindungan masyarakat" dan "perlindungan/pembinaan individu".¹²⁹

Ide dasar dari sanksi pidana kerja sosial bagi penerapannya terhadap terpidana anak, jika dilihat dari uraian tersebut di atas mempunyai sasaran pokok yang berkonsep dari keseimbangan monodualistik antara kepentingan perlindungan masyarakat dan kepentingan perlindungan/pembinaan individu yang merupakan ide dasar dari materi konsep RKUHP. Hal ini dikarenakan pengaturan masalah sanksi pidana kerja sosial terhadap anak tersebut, terdapat pula dalam RKUHP.

1. Tujuan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak

Dari berbagai variasi teori-teori tentang tujuan penjatuhan pidana sebagai alasan pembenar pemidanaan, bahwa dalam perkembangannya, tujuan pemidanaan itu tidak hanya sekedar untuk pembalasan saja tetapi juga harus diperhatikan tuntutan kemanfaatan di dalam batas-batas pembalasan dan harus dapat memberikan sumbangan pada proses penyesuaian kembali ter hukum pada kehidupan masyarakat sehari-hari seperti yang dikatakan oleh **CHR. J. Enschede** dan **Van Bamellen**, seperti yang dikutip oleh **Muladi** dan **Barda Nawawi Arief**.¹³⁰

Jadi dalam pemberian sanksi pidana, tidak hanya memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan mengupayakan agar perbuatan

¹²⁹ **Ibid**, hal. 48.

¹³⁰ **Muladi**, **Barda Nawawi Arief**, 1998, **Op.Cit.**, hal. 15.

yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tidak terulang, tetapi juga di dalamnya mencakup pula masalah perlindungan terhadap pelaku dengan memperbaiki si pelaku itu sendiri.¹³¹

Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana, tentunya juga harus dibedakan antara pidana terhadap pelaku dewasa dan pidana terhadap pelaku anak-anak. Dari kalimat tersebut, tersirat permasalahan mengapa antara pelaku dewasa dan pelaku anak-anak harus dibedakan dalam pemberian pidana tersebut. Apabila memang harus dibedakan, maka tujuan pemidanaan terhadap pelaku dewasa dan pelaku anak-anak pun haruslah diberi garis batasan agar tujuan dari pemidanaan dimana pidana digunakan untuk memperbaiki diri dari pelaku tindak pidana dapat tercapai.

Mengenai masalah pemberian sanksi pidana tersebut, Seminar Kriminologi Ke-tiga tahun 1976 dalam kesimpulannya antara lain mengatakan:

"Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defence* dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (rehabilitasi) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat/pelaku) dan masyarakat."

Demikian pula Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional tahun 1980, dalam salah satu laporannya menyatakan :¹³²

¹³¹ Hal ini sesuai dengann tujuan pemiidanaan yang integratif yaitu berusaha menyeimbangkan kepentingan beberapa pihak sekaligus, kepentingan pelaku, masyarakat dan negara serta kepentingan korban. Lihat Barda Nawawi Arief, 2000, *Op.Cit*, hal. 92.

¹³² *Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Laporan, BPHN, Dep-Keh, Jakarta, 1980, hal. 6-7.

- a. sesuai dengan politik hukum pidana maka "tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan - kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku ;
- b. atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat :
 - 1) kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
 - 2) edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai jiwa positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
 - 3) keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.

Dari kedua kesimpulan di atas jelaslah bahwa tujuan utama yang ingin dicapai oleh "pidana" dan "hukum pidana" sebagai salah satu sarana/alat dari politik kriminal adalah "perlindungan masyarakat". Menurut **Barda Nawawi Arief**, aspek-aspek dari perlindungan masyarakat itu terdiri dari :¹³³

- a. Perlindungan masyarakat dari perbuatan anti sosial/kejahatan;
- b. Perlindungan masyarakat terhadap sifat berbahaya orang (si pelaku);
- c. Perlindungan masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam menggunakan sanksi pidana atau reaksi terhadap pelanggar pidana;

¹³³ **Ibid.**, hal. 93 – 95.

- d. Aspek lain dari perlindungan masyarakat ini adalah perlunya mempertahankan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu oleh adanya kejahatan.

Dari uraian tersebut maka menurut **Barda Nawawi Arief**, suatu teori yang hanya melihat salah satu aspek dari tujuan umum tersebut sebenarnya terlalu bersifat sepihak. Dilihat dari pendirian yang demikian, maka wajarlah bila pembuat Konsep KUHP Baru, dalam merumuskan tujuan pidana berusaha merumuskan keseluruhan aspek dari tujuan umum tersebut. Dalam Konsep RKUHP Tahun 1991/1992 yang telah diperbaiki oleh Tim Kecil hingga Maret 1993, yang kemudian tercantum dalam konsep RKUHP 2000, maka tujuan pidana dirumuskan sebagai berikut :

Pasal 50 (RKUHP 2000) : Tujuan Pidana

(1) Pidana bertujuan untuk:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat ;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna ;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ;

d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

- (2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Tujuan pidana yang berusaha untuk merumuskan semua aspek perlindungan masyarakat seperti di atas yang dimaksudkan sebagai tujuan pidana yang integratif, karena tujuan pidana itu berusaha untuk menyeimbangkan kepentingan beberapa pihak sekaligus, yaitu kepentingan pelaku, masyarakat dan negara, serta kepentingan korban. Salah satu rumusan tujuan pidana yang integratif lainnya adalah yang dikemukakan oleh **Muladi**. Beliau berpendapat bahwa pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Dengan memahami problematik yang dihadapi oleh kehidupan anak seperti yang telah diungkapkan sebelumnya dalam Bab II tentang Tinjauan Pustaka dalam tesis ini, maka di sinilah pentingnya peranan pembentuk undang-undang untuk mengkaji segala problematik tersebut dengan membuat peraturan khusus bagi anak-anak dan mengutamakan aspek perlindungan bagi kehidupan anak, khususnya terhadap kebijakan formulasi dalam pembentukan undang-undang hukum pidana anak, terutama dalam hal perumusan kebijakan pidana terhadap anak.

Perlindungan yang diberikan terhadap anak harus diberikan secara menyeluruh, tidak hanya pada saat anak-anak hidup dalam keadaan normal, yaitu menjalani kehidupan seperti anak-anak lainnya yang hidup

dalam suatu keteraturan seperti ke sekolah, bermain dan lain sebagainya yang mendapat pengawasan dari orang tua dan masyarakat secara langsung. Terhadap anak-anak yang sedang bermasalah dengan hukum pun harus diperhatikan oleh pemerintah, dengan membuat suatu aturan yang dapat memberikan perlindungan dan arahan kepada anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Apa yang dilakukan oleh seorang anak pada saat ia menjalani suatu hukuman pidana, haruslah diupayakan apa yang dia dapat dari pembedaan tersebut menjadi sesuatu hal yang dapat mendukung perkembangan seorang anak kearah yang lebih baik dan berguna bagi dirinya. Hal ini seperti yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28B Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Dalam Konsiderans Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengenai Pengadilan Anak, dikatakan bahwa "anak adalah bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa". Dalam kedudukan demikian, anak memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus.¹³⁴ Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Oleh karena itu, pemberian sanksi

¹³⁴ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 2.

pidana terhadap anak harus melihat kedudukan dan keadaan anak beserta aspek-aspek yang melekat dalam dirinya seperti yang telah digambarkan di atas.

Ada beberapa faktor yang berhubungan dengan prosedur penentuan dan perlakuan/tindakan terhadap anak-anak/remaja nakal, yaitu :¹³⁵

1. Masalah pilihan undang—undang/peraturan;
2. *Overacting* penegak hukumnya;
3. Perlakuan dalam lembaga-lembaga pembinaan (*intitutional treatment*), yaitu dalam lembaga pemasyarakatan.

Merupakan hal yang sulit ketika pemerintah berupaya mengajukan suatu rancangan perundang-undangan kepada lembaga legislatif dalam rangka mewujudkan suatu peraturan yang merupakan prosedur dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Segala kajian serta analisis telah dilakukan secara mendalam, tetapi tetap saja ada kritikan terhadap upaya penanganan masalah tersebut yang menyatakan bila terlalu banyak peraturan/larangan akan menambah kenakalan. Ada persepsi terhadap kemungkinan apabila banyak perbuatan yang dianggap sebagai tindakan kenakalan, dan anak-anak tersebut juga dianggap dan diperlakukan sebagai anak nakal, maka anak-anak akan menjadi lebih nakal lagi.

Kemungkinan itu dapat diperbesar lagi apabila para remaja atau anak-anak yang nakal diisolasi dari masyarakat dan diperlakukan dalam suatu lembaga, khususnya lembaga pemasyarakatan seperti penjara.

¹³⁵ **Ibid.**

Mengenai hak terhadap perlindungan (*protection rights*) dalam Konvensi Hak Anak, disebutkan dalam Pasal 37 mengenai larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, hukuman mati, penjara seumur hidup dan penahanan semena-mena untuk perampasan kebebasan terhadap anak, serta dalam Pasal 40 Konvensi Hak Anak mengenai hak bagi anak-anak yang didakwa ataupun yang diputuskan telah melakukan pelanggaran, untuk tetap dihargai hak asasinya dan khususnya untuk dapat menerima manfaat dari segenap proses hukum bagi dirinya.¹³⁶

Dalam kertas kerja yang berjudul *A Guide for Non-Governmental Organizations Reporting to The Committee on The Rights of The Child*, dirinci beberapa pasal dalam Konvensi Hak Anak yang mengatur tentang perlindungan khusus (*special protection measures*) terhadap anak-anak. Salah satu perlindungan khusus tersebut mengenai anak-anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*), dan salah satu masalah yang dikedepankan mengenai anak-anak yang berada dalam penekanan terhadap kebebasan (*vide* Pasal 37).¹³⁷

Masalah prosedural mengenai sanksi pidana terhadap anak sangat perlu diperhatikan agar pembatasan hak anak tidak mengakibatkan keadaan anak menjadi lebih tertekan sehingga menyulitkan pengembalian perilaku mereka ke dalam masyarakat dan keluarga nantinya. Salah satu prinsip hak anak dalam Konvensi Hak Anak yaitu mengedepankan

¹³⁶ Muhamad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Op. Cit.*, hal. 41 – 42.

¹³⁷ *Ibid*, hal. 43.

kepentingan yang terbaik untuk anak (*the best interest of the child*), dengan mengutip pendapat dari **Irwanto** bahwa prinsip tersebut harus mendapat prioritas tertinggi (*paramount importance*) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak karena dalam banyak hal anak adalah “korban”, termasuk korban ketidak tahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya.¹³⁸ Selanjutnya dikatakan bahwa : “ Tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan tumbuh kembang anak, jika prinsip ini diabaikan maka masyarakat akan menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari ”

Menurut **Barda Nawawi Arief**, tujuan dasar dari peradilan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial, tetapi tidak harus kemudian diartikan bahwa kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat, melainkan harus dilihat bahwa mendahulukan atau atau mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari mewujudkan kesejahteraan sosial.¹³⁹

Perhatian pada masalah perlunya perlindungan khusus bagi anak yang dijamin oleh hukum, berkaitan erat dengan prinsip kedua dari *Declaration of the Rights of the Child* yang lengkapnya berbunyi :¹⁴⁰

The child shall enjoy special protection, and shall be given opportunities and facilities, by law and other means, to enable him

¹³⁸ **Ibid**, hal. 106.

¹³⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, **Op.Cit.**, hal. 111.

¹⁴⁰ **Ibid**, hal. 109.

to develop physically, morally, spiritually and socially in healthy and normal manner in conditions of freedom and dignity. In the enactment of laws for this purpose the best interest of the child shall be the paramount consideration.

Tujuan dan dasar pemikiran untuk mengutamakan kesejahteraan anak ketika anak berhadapan dengan masalah hukum, ditegaskan pula dalam SMR-JJ1985 (*Beijing Rules*), khususnya dalam *Commentary Rule* 5.1 mengenai *Aims of Juvenile Justice*, yang menunjuk pada dua tujuan atau sasaran yang sangat penting, yaitu :¹⁴¹

- a. memajukan kesejahteraan anak (*the promotion of the well being of the juvenile*) dan;
- b. prinsip proporsionalitas (*the principle of proportionality*)

Dalam Rule 10 SMR-JJ (*Beijing Rules*) digambarkan bahwa dalam penanganan masalah anak dalam proses hukum perlu diperhatikan hal-hal yang kiranya dapat mengganggu mental si anak itu sendiri dengan memposisikan anak tetap dalam keadaan “netral”, maksudnya keadaan si anak tidak dalam tekanan. Mengingat proses penyidikan oleh penyidik polisi atau penuntutan oleh Jaksa sering dilakukan dengan cara-cara seperti perlakuan terhadap orang dewasa. Aturan ini menunjukkan bahwa penanganan terhadap pelaku pidana anak harus dilakukan dengan sangat hati-hati sekali.

Penghindaran penahanan dalam sel maupun penjara sedini mungkin bagi para pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak jelas-jelas sangat diharapkan dan menjadi bagian yang sangat penting untuk diperhatikan. Seperti juga diatur dalam Rule 13 SMR-JJ yang memberikan

¹⁴¹ *Ibid*, hal. 112.

pedoman penahanan sementara selama menunggu proses pemeriksaan pengadilan atau *detention pending trial* kiranya sebagai tindakan terakhir dan dilakukan sesingkat mungkin (*as measure of last resort and for the shortest possible periode of time*) (Rule 13.1). Apabila dapat, sejauh mungkin diganti dengan “tindakan alternatif” seperti *close supervision*, *intensive care* atau *placement with a family or in an educational setting or home* (Rule 13.2)

Menurut penjelasan (*Commentary*) Rule 13 SMR-JJ dinyatakan bahwa penekanan terhadap perlunya tindakan-tindakan alternatif tersebut mengingat bahaya yang dapat ditimbulkan selama anak dalam penahan sementara, yaitu bahwa “*the danger to juvenile of criminal contamination while in detention pending trial must not be underestimated*”.

Usaha untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku anak sangat diperhatikan, terutama masalah penahanan ataupun bentuk usaha perampasan kemerdekaan lainnya terhadap anak. Selain dalam masa ketika dalam proses penyidikan atau penuntutan samapi pada prosedur ketika proses peradilan. Demikian juga dalam masalah pemberian putusan dalam hal pemidanaan. Seperti yang tercantum dalam Rule 17 SMR-JJ tersebut, digariskan mengenai “*guiding principles*”, yaitu pedoman yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan oleh hakim, yakni :

1. bahwa sanksi yang dijatuhkan harus diseimbangkan dengan *the circumstances and the gravity of the offence, the circumstances and the needs of the juvenile dan the needs of the society*;
2. bahwa pengenaan *restrictions on the personal liberty of the juvenile* harus dilakukan dengan hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin;
3. bahwa penjatuhan *deprivation of personal liberty* tidak boleh dilakukan, kecuali terhadap tindak pidana yang serius, residivis dan karena tidak ada bentuk sanksi yang tepat;
4. bahwa penanganan kasus anak harus mempertimbangkan *the well being of the juvenile* sebagai *guiding factor*.

Selain prinsip atau pedoman dalam SMR-JJ 1985 (*The Beijing Rules*) tersebut di atas, terdapat juga beberapa prinsip dalam *Convention on the Rights of the Child* 1989 yang juga perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan peradilan anak, seperti dalam Artikel 37 *Convention on the Rights of the Child*, 1989 dinyatakan beberapa prinsip sebagai berikut : ¹⁴²

1. Tidak seorangpun anak akan menjadi sasaran penganiayaan atau perlakuan lain atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merusak. Demikian pula pidana mati dan pidana penjara tanpa kemungkinan dibebaskan, tidak akan dikenakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang berusia dibawah 18 tahun.
2. Tidak seorangpun anak akan, secara tidak sah atau sewenang-wenang dirampas kemerdekaannya. Penangkapan, penahanan atau

¹⁴² *Ibid*, hal. 92.

pemidanaan terhadap anak akan dilakukan sesuai dengan hukum dan hanya dikenakan sebagai tindakan terakhir dan untuk masa yang sesingkat mungkin;

3. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dihargai martabatnya sebagai manusia, dan dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan orang seusiaanya. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisahkan dari tahanan dewasa kecuali dengan mempertimbangkan demi kepentingan terbaik anak dan berhak untuk tetap berkomunikasi dengan keluarganya;
4. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak mendapat bantuan hukum, berhak melakukan pembelaan atas dasar hukuman perampasan kemerdekaannya di muka sidang pengadilan atau terhadap pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapatkan keputusan dengan segera atas tindakan yang dikenakan terhadap si anak.

Oleh karena itu tujuan pemidanaan terhadap anak, khususnya dalam hal pengenaan sanksi pidana, diharapkan dapat disesuaikan dengan keperluan dan kebutuhan anak tersebut demi masa depannya serta bertujuan untuk kesejahteraan anak tersebut. Hal ini pun menurut penulis, sesuai dengan tujuan pemidanaan yang integratif, dimana salah satu tujuannya yaitu perlindungan terhadap pelaku dapat diwujudkan sejalan dengan tujuan pidana itu sendiri yaitu perbaikan diri pada pelaku kejahatan agar mereka sadar dan memiliki bekal untuk menjadi lebih baik ketika kembali ke dalam masyarakat dan tidak melakukan kejahatan lagi. Dengan begitu, pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak kejahatan dapat berjalan dengan efektif.

2. Kebijakan Pemidanaan Terhadap Anak Melalui Pidana Kerja Sosial

2.1. Pidana Kerja Sosial Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Anak

Tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana oleh anak merupakan bagian dari kebijakan kriminal, tetapi asas-asas yang mendasari kebijakan penanggulangan perbuatan pidana anak berbeda penanggulangannya dengan perbuatan pidana orang dewasa. Seringkali disebutkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak hanya dianggap sebagai bentuk pelanggaran yang biasa dilakukan oleh anak-anak sebelum memasuki usia dewasa (atau kedewasaan).¹⁴³

Secara garis besar bahwa perbuatan pidana anak atau *Juvenile delinquensi* berarti seorang anak yang melakukan tindak pidana dan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lainnya yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Pengertian ini didasarkan pada gambaran perilaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai perwujudan

¹⁴³ Masalah perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak tersebut sering menjadi perdebatan, tetapi jika melihat latar belakang secara kejiwaan (telah dibahas sebelumnya), kecenderungan anak-anak untuk melakukan perbuatan yang melanggar norma menurut Soerjono Soekanto dalam tulisannya yang berjudul "*Kehidupan Remaja dan Masalahnya*", merupakan gejala yang biasa timbul pada kebanyakan remaja/anak-anak oleh karena periode pada saat usia mereka itu banyak dihiiasi oleh faktor-faktor emosional yang sangat kuat, dan Menurut Zainul B. Biran dalam tulisannya yang berjudul "*Sebab-Sebab dan Penanggulangan Kenakalan Anak dan Remaja*" mengatakan bahwa kenakalan menunjuk pada perilaku yang berupa penyimpangan dari atau pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, ditinjau dari segi hukum (lazimnya disebut *delikuensi*) merupakan pelanggaran terhadap hukum yang dilakukan oleh seseorang yang belum dapat dikenai hukum pidana sehubungan dengan usianya (terkait dengan masalah pertanggungjawaban pidana-*penulis*), kenakalan yang tidak terkait pada pelanggaran norma-norma hukum yang berlaku umumnya tidak digolongkan sebagai kenakalan, melainkan pelanggaran biasa, sekalipun apa yang dilakukan dapat merupakan pelanggaran moral. (lihat Sanusi, Badri dan Syafrudin, edit., *Mengenal dan Memahami Masalah Remaja*, Pustaka Antara, 1993, Op.Cit. hal. 11 dan hal. 77).

criminal offence dan status offence.¹⁴⁴

Tujuan pemidanaan anak yang melakukan perbuatan pidana secara substantif harus difahami melalui pendekatan kebijakan integral, yaitu suatu pendekatan kebijakan yang memadukan antara kondisi faktual gejala perbuatan pidana anak dilakukan di masyarakat dan kepentingan pembangunan hukum pidana (anak) serta pembangunan hukum pada umumnya. Menurut **Barda Nawawi Arief** dikemukakan bahwa :¹⁴⁵

“ada dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) yaitu : (a) masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan (b) masalah penentuan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar, dan penganalisisan dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah – masalah di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial-politik yang telah ditetapkan. Dengan demikian kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

Dari pendapat di atas, jika dikaitkan dengan masalah perilaku tindak pidana pada anak, maka pendekatan kebijakan itu erat berkaitan dengan keputusan politik yang diambil terhadap anak dan kaum muda atau remaja di suatu masyarakat bangsa tertentu. Keputusan politik dalam menentukan suatu kebijakan biasanya diwujudkan dalam suatu kebijakan legislatif.

¹⁴⁴ *Criminal offence* adalah perilaku perbuatan anak yang merupakan tindak pidana apabila hal tersebut juga dilakukan oleh orang dewasa, dan *status offence* adalah perilaku perbuatan anak yang erat berkaitan dengan statusnya sebagai anak. Lihat Paulus Hadisuprpto, 2003, **Op.Cit**, hal. 29 – 30.

¹⁴⁵ Barda Nawawi Arief, 1996, **Op.Cit**, hal. 32-33.

Tahap kebijakan legislatif atau kebijakan perundang-undangan merupakan tahap yang paling strategis, dibandingkan tahap-tahap perwujudan (fungsionalisasi) pidana lainnya.¹⁴⁶ Dari tahap ini diharapkan adanya suatu garis pedoman untuk tahap-tahap berikutnya. Lebih lanjut juga dikatakan oleh **Barda Nawawi Arief**¹⁴⁷ :

“Sebagai salah satu bagian dari mata rantai perencanaan penanggulangan kejahatan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat itu, maka tahap penetapan pidana hemat kami justru harus merupakan tahap perencanaan yang matang mengenai kebijakan-kebijakan tindakan apa yang seharusnya diambil dalam hal pemidanaan apabila terjadi suatu pelanggaran hukum. Dengan perkataan lain, tahap ini harus merupakan tahap perencanaan strategis di bidang pemidanaan yang diharapkan dapat memberi arah pada tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana”.

Kebijakan legislatif mengenai pidana kerja sosial haruslah mencakup keseluruhan sistem pidana kerja sosial itu sendiri. Tidak hanya menentukan besaran jumlah jam kerja yang akan dilaksanakan atau jenis – jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan, tetapi mencakup aturan-aturan yang dapat menjamin terlaksananya penjatuhan pidana kerja sosial. Kebijakan Legislatif inilah yang menjadi titik awal efektif tidaknya penggunaan sanksi pidana kerja sosial dalam penerapannya nanti.

Kebijakan legislatif mengenai pemidanaan atau penalisasi pada umumnya menyangkut masalah penetapan jenis-jenis sanksi pidana

¹⁴⁶ *Ibid*, hal. 173.

Perwujudan suatu sanksi pidana dapat dilihat sebagai suatu proses perwujudan kebijakan melalui tiga tahap:

1. tahap penetapan pidana dari pembuat Undang-undang (formulasi)
2. tahap pemberian atau penjatuhan pidana oleh pengadilan (aplikasi), dan
3. tahap pelaksanaan pidana (eksekusi).

Ketiga tahap ini biasa juga disebut fungsionalisasi (hukum) pidana, dan Barda Nawawi Arief menyebut Tahap formulasi sebagai Kebijakan Legislatif.

¹⁴⁷ *Ibid*, hal. 92-93.

(*strafsoort*), masalah penetapan ukuran berat ringannya pidana (*strafmaat*) dan masalah penetapan pelaksanaan pidana (*straf modus*).¹⁴⁸

Penetapan jenis-jenis ancaman pidana di dalam hukum pidana, merupakan suatu bagian dari keseluruhan kebijakan kriminal. Hal ini dipandang penting karena disamping untuk menyediakan seperangkat sarana penanggulangan tindak pidana yang dapat dipergunakan hakim, sekaligus untuk membatasi kewenangannya dalam penggunaan sarana pidana lain, selain jenis-jenis pidana yang telah disediakan.

Semakin banyak jenis sanksi pidana yang tersedia semakin baik, karena dengan demikian hakim menjadi lebih leluasa untuk memilih di antara sanksi pidana yang ada. Lebih-lebih jika jenis sanksi pidana tersebut, merupakan jenis sanksi pidana alternatif dari pidana pencabutan kemerdekaan, berupa pidana non institusional atau berupa tindakan.

Dalam Rancangan KUHP Baru (RKUHP) Tahun 1999 - 2000 dalam Pasal 60 disebutkan :

(1) Pidana pokok terdiri atas :

- a. pidana penjara;
- b. pidana tutupan;
- c. pidana pengawasan;
- d. pidana denda; dan
- e. pidana kerja sosial.

¹⁴⁸ Dalam penetapan *strafsoort*, *strafmodus*, dan *strafmaat*, terkandung juga di dalamnya masalah falsafah tujuan pemidanaan (aliran hukum pidana), pedoman pemberian pidana dan sebagainya. Lihat Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP, Semarang, 2002, hal. 152.

- (2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menentukan berat ringannya pidana.

Apabila melihat ketentuan dalam Pasal 60 ayat (2) RKUHP tersebut, maka tersirat bahwa pidana penjara merupakan pidana terberat dan teringan adalah pidana kerja sosial. Pidana kerja sosial adalah jenis pidana baru yang dimasukkan dalam RKUHP dan sebelumnya dalam KUHP tidak ada. Dengan adanya ketentuan Pasal 60 ayat (2) tersebut dapat dikatakan pula bahwa pidana kerja sosial merupakan pidana alternatif dari pidana lainnya yang disebutkan dalam ayat (1), terutama sebagai alternatif pidana penjara. Jenis sanksi pidana kerja sosial ini dikenakan pula dalam Pasal 109 ayat (1) RKUHP yang mengatur masalah jenis-jenis pidana pokok khusus bagi terpidana anak, dimana jenis pidana kerja sosial dicantumkan sebagai jenis pidana dengan syarat.

Dalam Pasal 56 ayat (1) RKUHP disebutkan bahwa : "Jika suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tujuan pemidanaan". Dari Pasal 56 ayat (1) RKUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa pengutamaan jenis sanksi pidana yang lebih ringan menjadi hal yang pokok, maka pengenaan pidana kerja sosial sebagai jenis pidana yang paling ringan dari beberapa pidana yang tertera dalam Pasal 60 ayat

(1) RKUHP, menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi pidana kerja sosial harus diutamakan jika pidana kerja sosial tersebut dipandang telah sesuai dan menunjang tujuan pemidanaan.

Dalam KUHP Indonesia tidak ditetapkan mengenai tujuan diadakannya pemidanaan. Namun dalam Rancangan KUHP, Departemen Hukum Dan Perundang-undangan Tahun 1999-2000 telah ditetapkan masalah tujuan pemidanaan. Dalam Pasal 50 Rancangan KUHP disebutkan :

(1) Pemidanaan bertujuan :

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna ;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ; dan
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Penetapan tujuan pemidanaan ini sangat penting. Dikatakan oleh **Antony Allot**, suatu sistem hukum merupakan sistem yang bertujuan (a

purposive system). Oleh karena itu untuk menilai efektifitas sanksi pidana harus dilihat seberapa jauh sistem hukum itu dapat mencapai tujuan-tujuannya.¹⁴⁹ Demikian juga dikatakan **Muladi**, bahwa pidana yang akan ditetapkan adalah pidana yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan. Efektivitas pidana harus diukur berdasarkan tujuan atau hasil yang ingin dicapai.¹⁵⁰

Efektivitas sering dijadikan salah satu tolak ukur pula untuk memberikan dasar pembenaran pada suatu sanksi pidana dilihat sebagai suatu sarana yang rasional dari politik kriminal. Apabila dikatakan bahwa tujuan politik kriminal adalah untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan, maka adalah rasional apabila suatu sarana benar-benar dapat mencegah atau menanggulangi terjadinya kejahatan itu. Jadi ukuran rasional diletakkan pada keberhasilan atau efektifitas sarana itu dalam mencapai tujuannya.¹⁵¹

Dalam pencapaian tujuan pemidanaan anak, penting pula diperhatikan sifat dan hakikat perilaku dari perbuatan pidana oleh anak, kondisi anak tersebut dan pihak-pihak yang menjadi korban. Ini semua dimaksudkan untuk memahami dan menemukan kesesuaian tujuan pemidanaan anak yang perlu diprioritaskan dengan jenis sanksi pelaku anak yang sesuai dengan itu. Apakah anak akan dipidana sebagai

¹⁴⁹ *Ibid*, hal 74.

¹⁵⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Op.Cit*, hal. 101.

¹⁵¹ Barda Nawawi Arief, 2000, *Op.Cit*, hal. 95-96.

perwujudan pengimbalan perilakunya atau dikenakan tindakan dalam rangka pembinaan atau penyelesaian konflik.¹⁵²

Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam masalah penentuan sanksi apakah yang seharusnya dikenakan pada anak yang melakukan tindak pidana, yaitu :¹⁵³

- a. apakah sanksi pidana itu sungguh-sungguh mencegah terjadinya perbuatan pidana oleh anak;
- b. apakah sanksi itu tidak berakibat timbulnya keadaan lebih merugikan atas diri anak pelaku tindak pidana (stigmatisasi), daripada apabila tidak dikenakan sanksi;
- c. apakah tidak ada sanksi lain yang dapat mencegah secara efektif dengan kerugian yang lebih kecil.

Di samping itu secara khusus, perlu pula dipertimbangkan tujuan apakah yang ingin dicapai dengan pengenaan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana, dalam arti apakah tujuan yang ingin dicapai dengan pengenaan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut, dalam arti apakah tujuan yang ingin dicapai itu sama dengan tujuan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana oleh orang dewasa. Apakah tujuan pemidanaan yang tercakup dalam Pasal 50 RKUHP juga merupakan tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana anak.¹⁵⁴

Memang sulit menentukan tujuan pemidanaan terhadap pelaku anak, tetapi dapatlah ditarik secara garis besar bahwa tujuan perlakuan

¹⁵²Paulus Hadisuprpto, 2003, **Op.Cit.**, hal. 108

¹⁵³ **Ibid**, hal.110.

¹⁵⁴ **Ibid**, hal.111

terhadap anak, baik itu pemberian sanksi pidana ataupun berupa tindakan harus di dasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh anak, mengingat dalam konsiderans Undang Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dikatakan bahwa "anak adalah bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa".

Dalam kedudukan demikian, anak memiliki peranan strategis dan juga mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas.¹⁵⁵

Mengingat kecenderungan pemidanaan anak yang bertujuan pengimbangan, pembinaan dan penyelesaian konflik pada satu pihak dan sifat-sifat khusus anak-anak pelaku tindak pidana yang berbeda dengan pelaku dewasa dan hakekat serta dimensi perilaku perbuatan pidana anak pada pihak lain, maka dalam hal perlakuan terhadap pelaku anak (termasuk penjatuhan sanksi) rasanya perlu dipertimbangkan pendekatan nilai-nilai humanistik pemidanaan yang memunculkan ide individualisasi

¹⁵⁵ Lihat Penjelasan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

pidana. menurut **Barda Nawawi Arief**, ciri-ciri individualisasi pidana itu antara lain ialah :¹⁵⁶

1. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (*asas personal*)
2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (*asas culpabilitas* – tiada pidana tanpa kesalahan)
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi dan harus ada kemungkinan modifikasi sanksi dalam pelaksanaannya.

Erat kaitan dengan individualisasi pidana ini adalah “pendekatan nilai humanistik” yang oleh **Sheldon Glueck** seperti dikutip oleh **Barda Nawawi Arief**, diungkapkan sebagai berikut :¹⁵⁷

1. *The treatment (sentence-imposing) feature of the proceedings must be sharply differentiated from the guilt-finding phase;*
2. *The decision as to treatment must be made by abroad or tribunal specifically qualified in the interpretation and evaluation of psychiatric, psycological, and sociological data;*
3. *The treatment must be modifiable in the light of scientific reports progress;*
4. *The right of the individual must be safeguarded against possible arbitrariness or other unlawful action on the part of the treatment tribunal.*

Dalam Kaidah (Rule) 5 SMRJJ mengenai Tujuan Peradilan Anak, disebutkan : “Sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelaku-pelaku tindak pidana anak akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada para pelaku tindak pidananya maupun pelanggaran hukumnya itu sendiri”.

¹⁵⁶ Barda Nawawi Arief, 1996, **Op.Cit.**, hal. 43 – 44

¹⁵⁷ **Ibid.**

Dalam penjelasan Kaidah (*Rule*) 5 SMRJJ dikatakan bahwa ada dua tujuan penting dari penyelenggaraan peradilan anak. Tujuan pertama adalah pemajuan kesejahteraan anak dengan membentuk sistem hukum yang khusus diperuntukan dalam menangani pelaku tindak pidana anak dengan sedapat mungkin memberikan penghindaran terhadap sanksi-sanksi yang hanya sekedar menghukum. Tujuan kedua adalah prinsip kesepadanan, dimana dalam prinsip ini intinya adalah berupaya mengekang sanksi-sanksi yang menghukum yang diberikan bagi para pelaku tindak pidana anak, adanya upaya untuk memberikan batasan-batasan penjatuhan sanksi yang setimpal dengan beratnya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang anak, dan penjatuhan sanksi tersebut harus mempertimbangkan keadaan pribadi para pelaku tindak pidana anak tersebut. Oleh karena itu penentuan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana anak, haruslah diperhatikan dari segala aspek yang melekat pada diri seorang anak, agar tujuan dari pemidanaan tersebut menjadi efektif.

Penggunaan pidana yang berat atau kejam juga tidak dapat dibenarkan sekalipun pidana yang berat atau kejam itu terbukti efektif. Mengenai hal ini **Barda Nawawi Arief** mengemukakan pendapat beberapa sarjana :

Dikatakan **Wolf Middendorf**, bahwa efektifitas hanya merupakan salah satu kriteria dari pidana. Tidaklah mungkin menggunakan pidana-pidana yang kejam sekalipun terbukti sangat efektif.

Sutherland pun menyatakan, bahwa kebijaksanaan pidana yang sangat berat harus ditolak sekalipun hal itu nampaknya

merupakan cara yang paling berdaya guna menghadapi para penjahat, karena masyarakat juga mempunyai sikap-sikap perikemanusiaan tertentu.

Kemudian dikatakan **Roeslan Saleh** bahwa sekalipun pidana mati merupakan suatu alat yang lebih efektif terhadap pelanggaran-pelanggaran parkir dibandingkan denda, belumlah berarti bahwa atas delik-delik yang begitu ringan akan diterapkan pula pidana mati.¹⁵⁸

Kebijakan penerapan sanksi pidana atas anak-anak pelaku tindak pidana haruslah dikenakan dengan sangat hati-hati dan perlu adanya pertimbangan-pertimbangan dalam penentuan jenis-jenis sanksi yang paling sesuai dengan bagi anak-anak pelaku tindak pidana tersebut. Selama ini pelaku tindak pidana anak seringkali dijatuhi jenis sanksi pidana berupa pidana penjara. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh **Paulus Hadisuprpto** dalam disertasinya, terhadap 200 anak pelaku tindak pidana di 2 kota yaitu Semarang dan Surakarta, menunjukkan anak yang dijatuhi sanksi pidana sebanyak 80 % yang kebanyakan dari jenis sanksi pidana yang dijatuhi kepada para pelaku tindak pidana anak yaitu pidana penjara (62 %), dan pidana bersyarat (18 %), sedangkan sisanya dijatuhi sanksi pidana berupa tindakan (20 %).¹⁵⁹ Dalam salah satu artikel di surat kabar **Pikiran Rakyat**, disebutkan berdasarkan pengamatan **Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA)** selama tahun 2003, tercatat dari 255 perkara anak di Jawa Barat, 88 % anak mengalami penahanan dalam proses hukum, di Pengadilan Negeri Bandung selama periode

¹⁵⁸ *Ibid*

¹⁵⁹ Paulus Hadisuprpto, 2003, *Op.Cit.*, hal. 270

Januari – Juni 2003 terdapat 34 kasus anak dan 100 % vonis mereka berupa pidana penjara.¹⁶⁰

Dari gambaran informasi di atas, jelas dapat disimpulkan bahwa proporsi penjatuhan pidana penjara masih lebih besar dibandingkan dengan pidana bersyarat. Padahal secara teoritik, konsekuensi terberat yang harus diterima anak-anak yang mengalami sanksi pidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan (pidana penjara), mereka mau tidak mau harus menanggung akibat-akibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan seperti yang telah diungkap dalam bab sebelumnya.

Seringkali penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan dalam hal ini pidana penjara diberikan terhadap para pelaku pidana anak dengan jangka waktu yang relatif singkat. Lalu apakah aspek kegunaan atau manfaat dari pidana penjara yang relatif singkat itu, khususnya jika hal tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan berupa proses perbaikan diri pelaku tindak pidana anak melalui pembinaan yang harus dilaksanakan anak-anak itu dalam suatu lembaga.

Sampai seberapa jauh proses pembinaan yang relatif singkat itu berhasil guna, dalam arti dapat merubah anak-anak pelaku tindak pidana itu menjadi anak-anak yang baik dan bertanggungjawab terhadap akibat perbuatan pidananya itu. Apabila hal itu menimbulkan keraguan, apakah itu tidak berarti bahwa penjatuhan pidana penjara atas diri anak hanya bersifat sekedar sebagai ganjaran belaka, sementara aspek negatif yang

¹⁶⁰ Harian "Pikiran Rakyat", *Aparat Penegak Hukum Cenderung Menahan Anak*, Artikel, Surat Kabar, Bandung, 31 Desember 2003, hal. 3

disandang anak di dalam penjara (stigmatisasi) tidak dipertimbangkan dalam penanganan anak pelaku tindak pidana di masyarakat.

Salah satu contoh kasus mengenai masalah stigmatisasi masyarakat terhadap para pelaku tindak pidana setelah mereka menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan (penjara) seperti yang diberitakan dalam surat kabar Mingguan **Seputar Semarang** sungguh sangat ironis sekali, seorang residivis yang bernama Agus Marto, setelah menjalani masa pidananya di penjara, harus mengalami nasib sial karena menjadi korban pengeroyokan masyarakat yang menuduhnya akan melakukan kejahatan di daerah Kecamatan Tugu Semarang, sebelum dia menjelaskan status dirinya saat ini, padahal dia hanya mondar – mandir di kawasan tersebut karena sebelumnya ketika ingin pulang ke kampung halamannya di Kalimantan dengan menumpang kapal kayu, dirinya ditolak karena awak kapal tidak mau menanggung risiko jika membawa mantan narapidana seperti Agus tersebut.¹⁶¹ Dari cerita ini jelas, bahwa sampai saat ini, stigmatisasi terhadap para pelaku tindak pidana yang telah menjalani pidananya di penjara masih ada di masyarakat, dan stigmatisasi ini telah menghambat resosialisasi para pelaku tindak pidana untuk dapat kembali dan diterima di masyarakat.

Banyak sekali kritikan yang diberikan terhadap penggunaan sanksi pidana berupa perampasan kemerdekaan (penjara) ini. Menurut **Muladi**,

¹⁶¹ Mingguan “Seputar Semarang”, *Menggelandang, Dihakimi Warga*, Artikel, Edisi 22 tahun I, Semarang, 13 – 19 Januari 2004, hal. 3.

kerugian yang ditimbulkan oleh pidana penjara dapat bersifat filosofis maupun praktis, yaitu :¹⁶²

“Ditinjau dari segi filosofis, maka terdapat hal-hal yang bertentangan, yakni di satu pihak tujuan penjara adalah menjamin pengamanan narapidana, tetapi dilain pihak memberikan kesempatan-kesempatan kepada narapidana untuk direhabilitasi. Selanjutnya bilamana ditinjau dari hakekat fungsi penjara, maka penjara seringkali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi pelaku tindak pidana, berupa ketidak mampuan untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat”.

Kecenderungan masyarakat internasional saat ini adalah berupaya untuk memasyarakatkan pelaku tindak pidana di luar lembaga (penjara), karena melihat akibat-akibat negatif yang ditimbulkan dalam penerapan sanksi pidana penjara dari pada hasil yang diperoleh.

Salah satu sanksi pidana alternatif dari pidana penjara yang mempunyai potensi lebih baik ialah penerapan sanksi pidana kerja sosial. Penerapan sanksi pidana kerja sosial ini dilaksanakan diluar lembaga dengan pengawasan oleh badan pengawas yang ditunjuk, dan dilakukan secara sukarela. Dengan dilaksanakannya pidana kerja sosial tersebut di luar lembaga, maka otomatis tidak membatasi kehidupan seseorang anak dengan dunia luar atau masyarakat. Hal ini sangat membantu untuk lebih mempermudah dan mempercepat resosialisasi terhadap seorang anak, disamping tentunya memberikan keterampilan dan memberikan kesadaran terhadap anak tentang sebuah tanggung jawab dari perbuatan yang telah dilakukannya.

¹⁶² Muladi, 1985, *Op.Cit.*, hal. 222

Sebagai salah satu alasan mengapa pidana kerja sosial diterapkan dalam suatu peraturan pemidanaan, dapat dilihat pada saat pidana kerja sosial ini akan diterapkan dalam perturan hukum pidana Denmark, dimana alasan yang diajukan berdasarkan pengalaman keberhasilan penerapan pidana kerja sosial tersebut di negara Inggris, yaitu :¹⁶³

- *the convicted person does not lose his social contact,*
- *he can continue to follow his normal occupation, and also, other negative aspect of the prison sentence are absent,*
- *the sentence costs less than a prison sentence,*
- *the sentence should be seen as a form of recompense to the community, and can be carried out in a purposeful way,*
- *this sentence can be educational for certain offenders,*
- *the contact between the person doing the community service and fellow citizens with whom he is doing unpaid work can have a positive influence, and finally,*
- *community service can promote a better understanding among ordinary people for the delinquent and his situation.*

Di negara Indonesia, walaupun belum di atur secara hukum positif mengenai tujuan pemidanaan, baik dalam KUHP maupun dalam Undang Undang tentang Pengadilan Anak, tetapi secara umum tujuan pemidanaan memiliki dua aspek tujuan yaitu :¹⁶⁴

1. Aspek perlindungan masyarakat, yang pada intinya meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat.
2. Aspek perlindungan terhadap individu (sering disebut individualisasi pidana – penulis), yang pada intinya meliputi

¹⁶³ Anton M. van Kalmthout, Peter J.P. Tak, *Sanctions-Sistems in The Member-States of The Council of Europe, deprivation of liberty, community service and other subtites*, Kluwer Law and Taxation Publisher, USA, 1988, hal. 36.

¹⁶⁴ Barda Nawawi Arief, 2000, *Op.Cit.* hal. 93

tujuan untuk melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali pelaku tindak pidana agar taat dan patuh pada hukum.

Pidana kerja sosial mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan, terutama tujuan pemidanaan terhadap anak yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan berupa perbaikan diri pelaku anak yang didasarkan atas aspek kejiwaan anak sehingga tujuan pemidanaan yang cenderung berupa pengimbalan, pembinaan dan penyelesaian konflik dapat tercapai. Relevansi tujuan pemidanaan dengan pidana kerja sosial dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Aspek perlindungan masyarakat.

Pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana yang ditawarkan terutama untuk pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek. Alternatif tersebut dimaksudkan untuk menghindari efek negatif dari penerapan pidana perampasan jangka pendek. Pidana kerja sosial diterapkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti tindak pidana yang dilakukan tidak terlalu berat, ada kesanggupan dari terpidana dan sebagainya.

Sebagai alternatif pidana perampasan jangka pendek, pidana kerja sosial mempunyai berbagai keunggulan antara lain :¹⁶⁵

- 1) Pidana kerja sosial sedikit banyak menisbikan proses stigmatisasi yang selalu menjadi efek pidana perampasan kemerdekaan. Masalah stigmatisasi ini bagi para pelaku

¹⁶⁵ Tongat, **Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia**, 2001, **Op. Cit.** , hal . 49 – 50.

tindak pidana anak harus dihindarkan agar pada saat anak melakukan resosialisasi dalam masyarakat, anak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar tanpa harus ada perasaan takut karena diejek atau dikecam oleh lingkungannya.

- 2) Pidana kerja sosial akan meniadakan efek negatif berupa “pendidikan kejahatan oleh penjahat”. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Lembaga Pemasyarakatan seringkali berfungsi sebagai “sekolahnya para penjahat” yang akan melahirkan penjahat yang lebih profesional. Apalagi jika hal tersebut dihadapkan pada para pelaku anak, yang secara aspek kejiwaan, anak-anak pada masa usia tersebut masih dalam taraf pembelajaran guna pembentukan jati diri. Jika ternyata pembinaan mereka dalam lembaga pemasyarakatan hanya akan melahirkan efek negatif yang lebih parah, maka pembinaan dalam lembaga tersebut justru akan melahirkan generasi-generasi masa depan bangsa yang “jahat”.
- 3) Dilihat dari perspektif ekonomi, pidana kerja sosial juga jauh lebih murah dibanding dengan pidana perampasan kemerdekaan (penjara). Dengan pidana kerja sosial, maka subsidi untuk biaya hidup narapidana dilembaga dapat

ditekan yang pada akhirnya juga tidak akan membebani masyarakat secara keseluruhan.

Ditambahkan oleh penulis bahwa selain dari ke tiga keuntungan, ada lagi keuntungan lain yang dapat dirasakan oleh masyarakat, yakni bahwa kerja sosial ini dapat dikenakan kepada para pelaku tindak pidana dengan melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan sarana-sarana umum atau pelayanan-pelayanan umum yang tentunya berkaitan langsung dengan masyarakat.

b. Aspek perlindungan individu.

Dilihat dari aspek perlindungan individu, agaknya pidana kerja sosial banyak memberikan harapan besar sebagai suatu jenis pidana, lebih-lebih dengan falsafah pembinaan (*treatment philosophy*) yang sangat berorientasi pada perbaikan individu pelaku tindak pidana. dengan menjalankan pidana kerja sosial, seorang terpidana akan memperoleh berbagai keuntungan antara lain :

- 1) Terhindar dari berbagai penderitaan akibat perampasan kemerdekaan, seperti : stigmatisasi dan kehilangan rasa percaya diri.
- 2) Dengan pidana kerja sosial, terpidana tetap dapat menjalankan kehidupannya secara normal sebagaimana orang yang tidak sedang menjalani pidana. Adanya kebebasan ini memberikan kesempatan kepada terpidana

untuk tetap menjalankan kewajibannya kepada keluarga dan kepada masyarakat. Bagi terpidana anak, hal ini sangat penting karena anak dapat tetap berkumpul bersama keluarga karena patut diingat bahwa orang tua memiliki peran penting dalam masalah pembinaan anak¹⁶⁶, anak dapat tetap melanjutkan sekolahnya, dan dapat tetap bermain dengan teman-teman sebayanya.

- 3) Pidana kerja sosial dapat menghindari “dehumanisasi” yang selalu menjadi efek negatif dari pidana perampasan kemerdekaan. Terhindarnya terpidana dari “proses” pengasingan dari masyarakatnya (dehumanisasi), maka secara otomatis terpidana tetap dapat melakukan sosialisasi dengan masyarakat sehingga sekembalinya terpidana dari menjalani pidana kerja sosial tidak harus melakukan adaptasi untuk kembali menjadi anggota masyarakat.

Dengan melihat dua aspek perlindungan tersebut di atas dan hubungannya dengan pidana kerja sosial, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana sangat relevan dengan tujuan pemidanaan, terutama tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana anak, karena pidana kerja sosial dapat

¹⁶⁶ Menurut Soerjono Soekanto, para remaja biasanya mengharapkan bimbingan itu datang dari orang tuanya sendiri, yang diharapkan menjadi tokoh panutan atau tokoh ideal baginya, kalau harapan tersebut tidak terpenuhi maka akan timbul suatu perasaan frustrasi. Lihat : Sanusi, Badri, Syafruddin, 1993, *Op. Cit.*, hal. 11.

memberikan perlindungan secara integratif antara perlindungan masyarakat dan individu sebagaimana tujuan pemidanaan yang dirumuskan dan telah dibahas di atas sebelumnya. Selain itu, pilihan pidana kerja sosial juga sesuai dengan kecenderungan internasional untuk sedapat mungkin menghindari penggunaan sanksi pidana berupa perampasan kemerdekaan terhadap para pelaku tindak pidana anak seperti yang tercantum dalam Rule 19.1 *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMR-JJ)* dan juga dalam RKUHP-Baru tahun 2000 disebutkan dalam Pasal 66 huruf (a) mengenai pertimbangan tidak menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa berusia di bawah 18 tahun.

2.2. Pembinaan Terpidana Anak Melalui Pidana Kerja Sosial.

Berkembangnya peradaban manusia yang ditandai dengan semakin beradabnya budi manusia membawa pengaruh yang sangat besar dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam konteks hukum pidana, sebagai mana telah disinggung dalam pembahasan masalah tujuan pemidanaan sebelumnya, perkembangan itu terjadi karena pergeseran paradigma dalam hukum pidana, mulai dari konsep aliran klasik, aliran modern dan aliran neo-klasik telah menandai babak baru dalam wacana hukum pidana.

Secara umum dapat dikemukakan, bahwa pergeseran tentang konsepsi pemidanaan itu cenderung beranjak dari konsepsi yang bersifat "menghukum" (*punishment to punishment*) yang berorientasi ke belakang

(*backward looking*) ke arah gagasan/ide “membina” (*treatment philosophy*) yang berorientasi ke depan (*forward looking*).¹⁶⁷ Menurut **Roeslan Saleh**, pergeseran orientasi pemidanaan disebabkan oleh karena hukum pidana berfungsi dalam masyarakat, hukum pidana mencerminkan gambaran masanya dan bergantung pada pikiran-pikiran yang hidup dalam masyarakat.¹⁶⁸

Mengutip Pendapat **Barda Nawawi Arief**, bahwa banyaknya tujuan-tujuan pidana berinduk pada satu tujuan yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini merupakan tujuan umum, yang merupakan induk dari keseluruhan pendapat atau teori-teori mengenai tujuan pidana. Dengan kata lain, keseluruhan pendapat atau teori-teori mengenai tujuan pidana hanya merupakan perincian atau pengindentifikasian dari tujuan umum ini.¹⁶⁹

Identifikasi beberapa aspek atau bentuk-bentuk perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan melahirkan tujuan :¹⁷⁰

1. Perlindungan masyarakat terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, tujuannya adalah penanggulangan kejahatan, atau dipakai istilah penindasan kejahatan (*repression of crime*), pengurangan kejahatan (*reduction of crime*), pencegahan kejahatan

¹⁶⁷ Tongat, 2001, *Op.Cit.*, hal. 53.

¹⁶⁸ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hal. 2.

¹⁶⁹ Barda Nawawi Arief, 2000, *Op.Cit.*, hal. 85.

¹⁷⁰ *Ibid*, hal. 85-94.

(*prevention of crime*), pengendalian kejahatan (*control of crime*).

2. Perlindungan masyarakat terhadap sifat berbahaya (orang) si pelaku, tujuannya adalah untuk memperbaiki si pelaku. Juga dipakai istilah rehabilitasi, reformasi, *treatment of offenders*, reedukasi, readaptasi sosial, resosialisasi, pemasyarakatan dan pembebasan.
3. Perlindungan masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam menggunakan sanksi pidana atau reaksi terhadap pelanggar pidana, tujuannya adalah untuk mengatur atau membatasi kesewenangan penguasa maupun warga masyarakat pada umumnya, atau dalam istilah lain *policing the police*, dan tujuan melindungi pelanggar dari pembalasan yang sewenang-wenang atau pembalasan tidak resmi (*unofficial retaliation*).
4. Aspek lain dari perlindungan masyarakat adalah mempertahankan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu oleh kejahatan, sehingga tujuannya adalah untuk memelihara atau memulihkan keseimbangan masyarakat. Tujuan keempat ini merupakan induk dari teori retributif.

Keempat aspek pokok tujuan perlindungan masyarakat di atas mengandung dua aspek pokok :¹⁷¹

1. Perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana,

¹⁷¹ Ibid

2. Perlindungan masyarakat terhadap individu atau pelaku tindak pidana,

Aspek pokok yang pertama meliputi tujuan-tujuan :

- a. mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana,
- b. memulihkan keseimbangan masyarakat yang pewujudannya sering dikemukakan dalam berbagai ungkapan, antara lain :
 . menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian atau kerusakan yang timbul, menghilangkan noda-noda yang timbul, memperkuat nilai-nilai hidup dalam masyarakat.

Aspek pokok yang kedua bertujuan memperbaiki si pelaku yang sering dikemukakan dalam berbagai ungkapan seperti : melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku, membebaskan si pelaku, mempengaruhi tingkah laku si pelaku untuk tertib atau patuh pada hukum, melindungi si pelaku dari pengenaan sanksi atau pembalasan yang sewenang-wenang luar hukum Aspek pokok kedua ini dapat disebut individualisasi pidana.

Memberikan gambaran mengenai aspek-aspek tujuan pemidanaan terhadap anak yang telah diuraikan sebelumnya, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa adanya masukan dari perkembangan masyarakat internasional yang tertuang dalam suatu perjanjian, baik berupa deklarasi ataupun konvensi yang merekomendasikan agar penanganan terhadap anak-anak atau remaja yang melakukan perbuatan tindak pidana haruslah dilakukan secara khusus dengan mengutamakan kepentingan pelaku

anak (disamping kepentingan masyarakat dan korban), dimana pelaku anak dipandang sebagai tetap sebagai seorang anak yang merupakan bagian dari generasi masa depan bangsa yang butuh perhatian dan bimbingan yang baik agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Pemberian bimbingan atau binaan terhadap anak yang bermasalah seyogianya dilakukan dengan cara khusus yang dibedakan dengan penanganan orang dewasa dan sedapat mungkin dihindari pengenaan sanksi pidana berupa pidana perampasan kemerdekaan yaitu berupa pidana penjara.¹⁷²

Adanya sisi negatif yang dapat terjadi jika seseorang ditempatkan dalam suatu lembaga penjara seperti yang dilukiskan oleh seorang sosiolog yang bernama **Clemer** yang menyatakan, bahwa penjara pada hakekatnya merupakan suatu masyarakat di dalam suatu masyarakat, bahkan merupakan suatu sistem sosial yang informal yang disebut sub-kultural narapidana. Melalui proses sosialisasi yang disebut *prisonization* narapidana baru akan menjadi terpenjara dan makin lama pidana penjara tersebut dijalani, maka kecenderungan untuk menjadi penjahat kambuhan (*recidive*) semakin besar.¹⁷³

Menurut **Bagir Manan**, dalam usaha menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku menyimpang anak-anak, sekali-kali tidak boleh

¹⁷² Seperti yang diatur dalam Rule 19 *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMR-JJ) 1985* atau **The Beijing Rules** disebutkan bahwa “penempatan seorang anak dalam lembaga harus selalu ditetapkan sebagai upaya yang terakhir dan untuk jangka waktu minimal yang diperlukan”.

¹⁷³ Muladi, *Pelaksanaan Pidana Perampasan Kemerdekaan di Semarang*, Majalah Masalah-Masalah Hukum No. 3, UNDIP, Semarang, 1986, hal. 10.

melupakan kedudukan anak dengan segala karakternya yang khusus. Walaupun anak pada dasarnya dan dalam batas wajar tidak menentukan sendiri langkah perbuatan berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi karena kondisinya sebagai anak, keadaan sekitarnya dapat berpengaruh lebih besar dalam menentukan sikap dan nilai pribadinya.¹⁷⁴

Penanganan yang salah terhadap anak-anak bermasalah, dapat berpengaruh pada masa depan anak tersebut seterusnya. Isu di sekitar tukar pengalaman diantara sesama narapidana mengisyaratkan bahwa tingkah laku kriminal itu dapat dipelajari.¹⁷⁵ Pemasyarakatan merupakan tempat berkumpulnya para pelanggar hukum. Berkumpulnya pelanggar hukum dengan berbagai karakteristik dan latar belakang kejahatannya memungkinkan mereka saling bertukar pengalaman mengenai cara-cara melakukan kejahatan.

Seperti dikatakan oleh **E. Sutherland**, dengan teorinya *differential association* yang menyatakan tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi.¹⁷⁶ Berdasarkan pendapat tersebut, kekhawatiran akan sanksi pidana yang kurang tepat bagi terpidana anak, terutama hubungan pergaulan bagi anak dalam lingkungan penjara selama menjalani masa pembedaannya yang dapat membentuk anak menjadi lebih jahat lagi ketika ia selesai

¹⁷⁴ Dalam tulisan Prof. Dr. Bagir Manan, SH., M.CL., dalam buku **Peradilan Anak di Indonesia**, penyunting : Romli Atmasasmita, Mandar Maju, Bandung, 1997, hal. 7.

¹⁷⁵ Petrus Irwan Panjaitan, Pandapotan Simorangkir, **Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana**, Pustaka sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal. 44.

¹⁷⁶ *Ibid*, hal. 45.

menjalani proses pembedaan tersebut. Hal ini menjadi bertolak belakang dari tujuan pembedaan seperti yang dikemukakan oleh **Ted Honderich** bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila : pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu dikenakan.¹⁷⁷

Sebagaimana uraian terdahulu dijelaskan bahwa pelaksanaan pidana penjara dalam perkembangannya terus menerus mengalami perbaikan perlakuan terhadap terpidana yang semakin manusiawi.

Di Indonesia perlakuan terhadap terpidana juga mengalami perbaikan-perbaikan sejak dicetuskan ide pemasyarakatan oleh **Sahardjo** pada saat pengukuhan gelar *Doctor Honoris Causa* dalam bidang ilmu hukum di Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963. Gagasan sistem pemasyarakatan tersebut sangat menarik perhatian, tidak hanya bagi kaum praktisi, melainkan juga bagi kaum teoritis. Gagasan termaksud mempunyai arti yang sangat penting bagi sejarah kepenjaraan di Indonesia, baik bagi masa kini maupun bagi masa yang akan datang.

Semula gagasan pemasyarakatan dimaksud sering diberi arti sebagai tujuan dari pidana penjara, akan tetapi kemudian di dalam suatu "Konperensi Direktur-Direktur Penjara Se-Indonesia" yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juli 1964 di Lembang, gagasan tersebut

¹⁷⁷ Barda Nawawi Arief, 1996, **Op. Cit.**, hal. 39

Dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan "Warga Binaan Pemasyarakatan" berdasarkan sistem dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Kepentingan penggantian ide pemasyarakatan ini didasarkan juga pada kenyataan bahwa lembaga yang menjadi wadah bagi para narapidana pada waktu itu adalah "lembaga penjara" sebagai lembaga warisan pemerintah kolonial Belanda. Lembaga tersebut dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat Indonesia. Hal ini juga ditegaskan dalam konsideran Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada bagian *b* menimbang, yang pada intinya menyatakan, bahwa perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan.

Apabila melihat makna dalam konsideran tersebut, dapat disimpulkan, terhadap pembinaan para narapidana harus didasarkan atas segala aturan yang mengacu atau berinduk pada UUD 1945, khususnya bagi penanganan pembinaan terhadap pelaku anakpun harus berdasarkan atas Pasal 28 B UUD 1945 yang menyatakan bahwa :

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"

Adapun nilai-nilai atau prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam gagasan/ide pemasyarakatan adalah sebagaimana prinsip-prinsip yang dikembangkan setelah berlangsungnya Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang, Jawa Barat pada tanggal 27 April 1964. dalam konferensi tersebut dirumuskan prinsip-prinsip dasar yang menyangkut perlakuan terhadap terpidana dan anak didik sebagai berikut :¹⁷⁸

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam oleh negara. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami narapidana dan anak didik hendaknya hanyalah dihilangkannya kemerdekaannya untuk bergerak dalam masyarakat;
3. Berikan bimbingan, berikan pada mereka pengertian tentang norma-norma hidup dan kehidupan, dan sertakan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya;
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana.

¹⁷⁸ Tongat, 2001 *Op.Cit*, hal. 55

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dengan masyarakat. Antara lain kontak dengan masyarakat dapat terwujud dalam bentuk kunjungan sanak keluarga;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh hanya sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan jawatan atau kepentingan negara pada waktu tertentu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan yang ada dalam masyarakat dan menunjang pembangunan;
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila. Artinya dalam hal ini berarti bahwa, mereka harus ditanamkan rasa kegotong royongan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan, disamping pendidikan kerohanian agar memperoleh kekuatan spiritual;
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia. Martabatnya dan perasaannya sebagai manusia harus dihormati.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaannya sebagai satu-satunya derita yang dapat dialaminya;

10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Dengan demikian, jelaslah bahwa pada dewasa ini yang dimaksud dengan pemasyarakatan bukan lagi semata-mata sebagai tujuan dari pidana penjara, melainkan suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sekaligus juga merupakan suatu metodologi di bidang *Treatment of Offenders* dengan cara melibatkan semua potensi dalam masyarakat, petugas dan individu pelanggar hukum yang bersangkutan.¹⁷⁹

Antara sistem kepenjaraan dengan sistem pemasyarakatan sangat berbeda sekali. Sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan No. M.02-PK 04.10/1990 bahwa sistem pemasyarakatan yang berlaku dewasa ini, secara konseptual dan historis sangatlah berbeda dengan apa yang berlaku dalam sistem kepenjaraan. Dalam konsep sistem pemasyarakatan menempatkan tahanan, narapidana, anak negara dan klien pemasyarakatan sebagai subyek, dan dipandang sebagai pribadi serta warga negara biasa dan dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan, tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Hal tersebut berbeda terbalik dengan sistem kepenjaraan yang lebih berorientasi bahwa tahanan, narapidana dan orang-orang yang masuk ke dalam

¹⁷⁹ BPHN, *Loka Karya Evaluasi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak*, Binacipta Bandung, 1977, hal. 40.

penjara karena mendapatkan sanksi pidana dianggap sebagai objek yang harus dibalas atas perbuatannya dengan mengenakan suatu nestapa.

Perbedaan kedua sistem tersebut memberi implikasi pada perbedaan dalam cara-cara pembinaan dan bimbingan yang dilakukan, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan tujuan.

Dalam sistem pemasyarakatan, menurut **Muladi**, muncul dimensi masukan lingkungan global berupa kerangka teoritik yang berkembang tentang hakekat tujuan pemidanaan saat ini. Dalam kerangka ini nampak adanya tarikan untuk lebih memperhatikan Model Keadilan (*Justice Model*) dalam pembinaan narapidana yang berlandaskan Teori Klassik yang dikombinasikan dengan perlindungan hak-hak asasi pelaku tindak pidana, oleh karena itu dalam melakukan penyempurnaan sistem pemasyarakatan dalam rangka pembinaan narapidana di Indonesia, maka perlu dikaji hal-hal sebagai berikut :¹⁸⁰

1. Kerangka Konseptual

Bahwa kelemahan Pemasyarakatan sebagai suatu sistem lebih banyak disebabkan oleh aspek substansi hukum yang belum mantap. Sistem peradilan pidana yang baik,¹⁸¹ paling tidak harus dilandasi pengaturan yang mantap dan sistematis yang meliputi empat bidang pengaturan yaitu : Hukum Pidana Materil, Hukum Pidana Formil, Hukum Pelaksanaan Pidana (Undang-Undang

¹⁸⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2002, hal. 121.

¹⁸¹ Sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub-sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integral agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal.

Pemasyarakatan) dan Undang-Undang Peradilan Anak. Dari segi operasionalisasi indikator efektivitas masih perlu dikaji seperti tingkat penerapan sanksi alternatif (*Alternative sanction*), apakah sudah dilaksanakan dengan baik.

2. Kerangka Doktrin Dasar (lingkungan instrumental)

Dari segi operasional lain, perlu juga dipelajari lebih lanjut mengenai seberapa jauhkah sistem pemasyarakatan telah diadaptasikan dengan sasaran utama umum Pembangunan Jangka Panjang, dalam usaha untuk meningkatkan kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri, menciptakan keselarasan dan keseimbangan antar hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam lingkungannya dan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

3. Kerangka Lingkungan Strategis (masuk lingkungan)

Pertanyaan pokok dalam hal ini yang pertama adalah sampai seberapa jauh Doktrin pemasyarakatan telah dikaji kembali dan diadaptasikan dengan perkembangan internasional yang menghasilkan dokumen dan instrumen internasional yang pada saat ini sarat dengan muatan HAM, seperti antara lain yang berkaitan dengan penanganan masalah anak yaitu : *Declaration of the Right of the Child*, *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, *United Nations Standards Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, dan sebagainya.

Pengertian lembaga pemasyarakatan sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dari pengertian ini dapat diketahui tentang perincian siapa yang dibina oleh lembaga pemasyarakatan, yaitu narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sebenarnya narapidana dan anak didik pemasyarakatan pada dasarnya sama, karena mereka sama-sama orang yang dipidana oleh pengadilan dan menjalani hukumannya tersebut di lembaga pemasyarakatan, akan tetapi undang undang menghendaki perbedaannya bahwa narapidana dimaksudkan sebagai istilah bagi terpidana dewasa, sedangkan anak didik pemasyarakatan bagi terpidana anak-anak.¹⁸² Bagi penulis tidak mempermasalahkan arti kedua istilah tersebut karena sebenarnya kedua kelompok usia (anak maupun dewasa) tersebut sama-sama seorang terpidana yang menghuni suatu lembaga pemasyarakatan atau penjara. Hanya dalam Pasal 60 Undang Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ditegaskan bahwa anak didik pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) anak yang harus terpisah dengan orang dewasa.

Dalam Undang Undang No. 12 Tahun 1995, Pasal 1 Angka 8, dikenal 3 (tiga) macam anak didik pemasyarakatan yaitu :

- a. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur

¹⁸² Gatot Supramono, 2000, **Op.Cit.**, hal. 115.

18 tahun. Jika sampai lebih dari umur 18 tahun belum selesai menjalani pidananya, maka anak pidana dipindahkan ke LAPAS (dewasa) (Pasal 61 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997), tetapi ditempatkan dalam blok khusus (blok untuk anak usia antara 18 tahun – 21 tahun) (Pasal 61 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997)

- b. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun. Jika umurnya telah melewati batas umur 18 tahun, bagi anak negara tidak dipindahkan ke LAPAS (dewasa) karena anak negara tidak dijatuhi pidana penjara. Hukumannya dijalani sampai di situ (keluar dari lembaga/bebas).
- c. Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

Dalam melaksanakan pembinaan pemasyarakatan perlu di dasarkan atas suatu asas yang merupakan pegangan bagi para pembina agar tujuan pembinaan tersebut dapat tercapai dengan baik. Untuk itu, dalam Pasal 5 Undang Undang No. 12 tahun 1995 disebutkan 7 (tujuh) asas sistem pembinaan pemasyarakatan, yaitu :

1. **Pengayoman**, yaitu : perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan

- pemasyarakatan. Juga memberikan bekal hidup kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat nantinya;
2. ***Persamaan perlakuan dan pelayanan***, yaitu : adanya perlakuan yang sama terhadap setiap warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan orang;
 3. ***Pendidikan***;
 4. ***Pembimbingan***
 5. ***Penghormatan harkat dan martabat manusia***, yaitu : dalam melaksanakan pembinaan tetap harus memperlakukan warga binaan pemasyarakatan sebagaimana layaknya manusia, walaupun mereka adalah orang-orang yang telah melakukan kesalahan besar dalam hidupnya;
 6. ***Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan***, maksudnya : hilangnya kebebasan untuk melakukan kegiatan hanya itulah satu-satunya penderitaan yang dialami selama menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan untuk kepentingan memperbaiki diri dari kesalahannya, penderitaan lainnya tidak diperbolehkan selama berada di lembaga tersebut;
 7. ***Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu***, maksudnya : pada prinsipnya untuk membina narapidana tidak boleh di asingkan sama sekali dengan masyarakat, mereka dapat berhubungan dengan keluarganya

dengan cara kunjungan pada saat-saat tertentu ke Lembaga Pemasyarakatan.

Ada dua pilar program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), yaitu :¹⁸³

1. Program pembinaan kepribadian yang erat dengan pembinaan mental dan rohani, sangat menekankan unsur keagamaan, pengetahuan kewarganegaraan, kesadaran hukum, untuk membangkitkan semangat cinta tanah air agar mau merenungkan dan menggunakan waktu selama dipidana betul-betul untuk bertaubat.
2. Program pembinaan kemandirian yang berkait erat dengan bakat minat agar punya keterampilan, keahlian dan akhirnya pekerjaan, sehingga LAPAS mampu menjadi lembaga pendidikan di satu sisi dan lembaga pembangunan di sisi lain.

Terhadap warga binaan masyarakat, disamping lembaga pemasyarakatan (LAPAS) yang bertugas melakukan pembinaan, terdapat juga lembaga lain yaitu Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang tugasnya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu : melaksanakan bimbingan terhadap warga binaan masyarakat. Warga binaan pemasyarakatan yang berada dalam

¹⁸³ Budi Santoso, **Remisi Umum ke Remisi Khusus**, Artikel, Majalah PILARS, No. 33/Th.VI/24-30 November 2003, hal. 12-13. Berdasarkan Sumber dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman dan HAM RI.

bimbingan BAPAS berdasarkan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (1) Undang Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terdiri dari :

- a. Terpidana bersyarat.
- b. Narapidana, Anak pidana dan Anak negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
- c. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua atau badan sosial.
- d. Anak negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Ketentuan mengenai tata cara pembinaan dan bimbingan terhadap terpidana khususnya terpidana anak telah diatur sedemikian rupa, tetapi dalam proses pelaksanaannya sering terjadi penyimpangan-penyimpangan. Seringkali ditemui bahwa perlakuan petugas lembaga pemasyarakatan terhadap terpidana anak masih disamakan dengan terpidana dewasa. Hal ini menunjukkan kurang profesionalnya petugas lembaga pemasyarakatan dalam menangani anak didik sebagai warga binaan yang harus diayomi. Padahal dalam peraturan sudah dijelaskan mengenai perbedaan perlakuan antara anak didik (terpidana anak) dengan narapidana (terpidana dewasa).

Selain masalah pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan tersebut, juga masih seringnya seorang anak yang melakukan perbuatan pidana dikenakan penahanan bahkan dijatuhi sanksi pidana berupa penjara. Dalam SMRJJ 1985 (*The Beijing Rules*) dalam Kaidah (*Rule*) 17.1 disebutkan :¹⁸⁴

Pengambilan keputusan oleh pejabat yang berwenang (termasuk hakim, pen.) harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Reaksi yang diambil (termasuk sanksi pidana, pen.) selalu harus diseimbangkan tidak hanya dengan keadaan-keadaan dan bobot keseriusan tindak pidana (*the circumstances and the gravity of the offences*), tetapi juga dengan keadaan-keadaan dan kebutuhan si anak (*the circumstances and the needs of the juvenile*) dan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat (*the needs of the society*);
- b. Pembatasan kebebasan/kemerdekaan pribadi anak (*restriction on the personal liberty of the juvenile*) hanya dikenakan setelah pertimbangan yang hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin;
- c. Perampasan kemerdekaan pribadi (*deprivation of personal liberty*) jangan dikenakan kecuali anak melakukan perbuatan serius (termasuk tindakan kekerasan terhadap orang lain) atau terus menerus melakukan tindak pidana serius, dan kecuali tidak ada bentuk respon/sanksi lain yang lebih tepat;
- d. Kesejahteraan anak harus menjadi faktor pedoman dalam mempertimbangkan kasus anak..

Aturan internasional lainnya yang menyokong agar perlakuan terhadap anak yang melakukan tindak pidana agar dalam penjatuhan sanksi pidana bagi diri anak tersebut sedapat mungkin untuk dihindari pidana berupa perampasan kemerdekaan, seperti yang tercantum dalam Resolusi RBB 45/113 tentang *United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty*, antara lain dinyatakan :¹⁸⁵

¹⁸⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, dalam buku : Romli Atmasasmita (editor), *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hal. 76 – 77

¹⁸⁵ *Ibid*, hal. 77 – 78

1. Pidana penjara harus digunakan sebagai upaya terakhir
(Imprisonment should be used as a last resort);
2. Perampasan kemerdekaan anak harus ditetapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu minimal yang diperlukan serta dibatasi untuk kasus-kasus yang luar biasa/eksepsional.
(Deprivation of the liberty of a juvenile should be a disposition of last resort and for the minimum necessary period and should be limited to exceptional cases)

Dalam ketetapan pemerintah melalui Undang Undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), disebutkan pula bahwa arah kebijakan pemerintah, khususnya di bidang penegakan hukum, termasuk pula di dalamnya masalah pembaharuan hukum dan kebijakan terhadap masalah sistem pembinaan para warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut memperlihatkan keinginan pemerintah di masa yang akan datang untuk memperbaiki sistem pembinaan para narapidana dan tentunya melalui pembaharuan perundang-undangan dalam penerapan sanksi pidana bagi para pelaku kejahatan, baik dewasa maupun anak-anak.

Secara umum dapatlah dikatakan bahwa pembinaan dan bimbingan dalam sistem pemasyarakatan haruslah ditingkatkan melalui pendekatan pembinaan diluar lembaga pemasyarakatan. Hal ini untuk mendorong tercapainya tujuan pemasyarakatan itu sendiri, mengingat sulitnya mewujudkan pembinaan para terpidana, terutama bagi

terpidana anak di dalam lembaga pemasyarakatan, banyak kendala yang ditemui jika pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan itu dilaksanakan di dalam lembaga.

Walaupun sistem kepenjaraan telah diubah menjadi sistem pemasyarakatan, tetap saja dalam praktek, hal-hal yang berhubungan dengan sistem kepenjaraan masa lampau masih terjadi, terutama masalah penanganan terpidana anak. Hal ini pernah diungkapkan oleh **B. Mardjono Reksodiputro** dalam Pertemuan Ilmiah tentang Penanggulangan Kejahatan yang Dilakukan oleh Anak Usia Muda di Jakarta, beliau mengemukakan :¹⁸⁶

“Indonesia membanggakan diri mempunyai konsepsi pemasyarakatan terpidana (Menteri Kehakiman Sahardjo, 1962) yang mengubah nama *penjara* menjadi *lembaga pemasyarakatan* dan berintikan *pembinaan* dan *bukan penderitaan*. Namun, tidak pernah jelas apakah dalam *sistem pemasyarakatan terpidana* Indonesia ini, termasuk pula adanya pendekatan khusus (di luar dari yang sudah dikenal dalam jaman kolonial Hindia-Belanda) terhadap pelaku muda usia”

Dari apa yang telah dikemukakan oleh Mardjono di atas, dapat disimpulkan bahwa beliau meragukan kinerja dari sistem lembaga pemasyarakatan yang ada sekarang ini, terutama masalah penanganan dan pembinaan terhadap para pelaku usia muda di dalam lembaga pemasyarakatan (penjara). Hal ini jelas menimbulkan pertanyaan yang mendalam, tentang kesiapan pemerintah dalam hal ini lembaga pemasyarakatan terhadap komitmennya seperti yang tercantum dalam

¹⁸⁶ B. Mardjono Reksodiputro, *Penanggulangan Kejahatan yang Dilakukan oleh Pelaku Usia Muda*, Makalah pada pertemuan ilmiah tentang “ Penanggulangan Kejahatan yang Dilakukan oleh Anak Usia Muda”, BPHN, Jakarta, 1994, hal. 7.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimana Seorang anak dikatakan sebagai generasi penerus bangsa dan dalam penanganan masalah anak-anak yang tersangkut dalam masalah hukum harus ditangani secara khusus dan hati-hati.

Sekedar bahan perbandingan mengenai penanganan anak yang tersangkut masalah hukum, terutama masalah pidana, di Inggris telah mempunyai suatu peraturan yang bernama *Criminal Justice Act 1948* yang di dalamnya diatur antara lain masalah usaha menjauhkan para pelaku pelanggaran hukum pidana sampai umur 21 tahun dari penjara (di Indonesia lembaga pemasyarakatan – penulis). Ketentuannya antara lain :¹⁸⁷

- 1) menyelenggarakan tempat penahanan yang khusus (bukan penjara) untuk mereka di bawah umur 21 tahun, yang sedang menunggu peradilan perkaranya;
- 2) melarang hakim menjatuhkan pidana penjara bagi pelaku di bawah umur 15 tahun, dan sangat membatasi dijatuhkannya pidana penjara untuk mereka yang berumur antara 16 – 17 tahun;
- 3) menyediakan jenis-jenis pembedaan lain (bukan pidana penjara) untuk para pelaku usia muda yang tidak melakukan pelanggaran hukum yang serius.

¹⁸⁷ *Ibid*, hal. 8.

Dari uraian di atas, jelas di Inggris, sejak tahun 1948 telah memikirkan mengenai penanganan yang khusus terhadap para pelaku tindak pidana oleh anak, bahkan penanganan pelaku anak tersebut sedapat mungkin untuk menghindari pemberian pidana terhadap pelaku pidana anak dengan menempatkannya dalam suatu lembaga (penjara atau lembaga pemasyarakatan).

Menurut **R.A. Koesnoen**, dikatakan bahwa :¹⁸⁸

"dalam urusan pemberantasan yang penting bukannya pidana atau tindakan apa yang harus dikenakan terhadap pelanggar hukum saja, tetapi terutama perlakuan sesudahnya yang akan menentukan apakah si pelanggar hukum akan menjadi baik atau tidak, pula bahwa tiap putusan harus selalu mengingat akan perlakuan yang akan dialami oleh pelanggar hukum dengan maksud agar putusan pidana atau tindakan itu ada manfaatnya, karena menurut pengalaman bahwa kehidupan dalam lembaga kurang baik bila dibandingkan dengan kehidupan dalam masyarakat bebas yang dibarengi dengan pengawasan dan bimbingan."

Dari pendapat yang telah diuraikan tersebut di atas, secara garis besar memberikan gambaran bahwa pembinaan narapidana terutama terpidana anak lebih baik dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan. Hal ini juga dipertegas dari pendapat **Loebby Loqman** yang mengisyaratkan bahwa biar bagaimanapun rasa derita dalam pidana hilang kemerdekaan merupakan masalah tersendiri bagi seorang narapidana, hal ini disebabkan karena :¹⁸⁹

¹⁸⁸ R.A. Koesnoen, *Peradilan Anak di Negara-Negara yang Telah Maju*, Majalah "Masalah-Masalah Hukum", Artikel, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hal. 17.

¹⁸⁹ Loebby Loqman, *Pidana dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta, 2002, hal. 71-73

1. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan terdapat kondisi-kondisi yang penuh dengan ketidakserasian , ketegangan dan ketidakpuasan, yang oleh **Gresham M. Skyes** digambarkan sebagai *Pains of Imprisonment*, yaitu :

- a. *Deprivation of liberty* : yaitu narapidana kehilangan kemerdekaannya karena ditempatkan dalam ruang gerak yang sempit dan peraturan yang membatasi geraknya. Hal ini dapat menyebabkan narapidana kehilangan hubungan emosional (*loss of emotional relationship*)
- b. *Deprivation of good and service* : yaitu hilangnya hak-hak pribadi dan keinginan untuk dilayani sehingga hal ini dapat menurunkan citra terhadap dirinya yang juga berakibat timbul ketidak seimbangan jiwa dalam dirinya.
- c. *Deprivation of heterosexual relationship* : yaitu terjadinya bentuk-bentuk penyimpangan seksual di dalam lembaga penjara karena masyarakat yang ada dalam lembaga pemasyarakatan/penjara hanya terdiri dari satu jenis kelamin (*one side sex community*).
- d. *Deprivation of security* : yaitu kehilangan rasa aman dalam diri narapidana karena mereka ditempatkan dalam satu ruangan dengan orang-orang sesama narapidana yang bukan pilihannya, maka timbul kecurigaan-kecurigaan terhadap orang lain disekitarnya.

- e. *Deprivation of autonomy* : yaitu kehilangan hak untuk mengatur dirinya sendiri karena segala sesuatu telah diatur secara mendetail di dalam peraturan-peraturan lembaga pemasyarakatan, sehingga menyebabkan narapidana tersebut merasa kehilangan gambaran pribadinya sebagai manusia yang berpotensi.
2. Adanya kutukan moral (*moral rejection*) oleh masyarakat, sehingga terjadi penolakan terhadap para narapidana untuk dapat kembali dalam masyarakat.
 3. Narapidana yang berada dalam lembaga pemasyarakatan, dalam kehidupan sehari-harinya selalu dikelilingi tembok yang memisahkan mereka dari kehidupan masyarakat.
 4. Dengan segala perlakuan dan pengalaman yang diterimanya selama di dalam lembaga pemasyarakatan, kadangkala malah membuat para narapidana merasa asing dari kehidupan masyarakat bebas (teralienasi). Akibat alienasi ini, narapidana mencari dunianya sendiri yaitu dengan mengidentifisir nilai-nilai subkultur kepenghunian (*inmate sub-culture*) selama di dalam lembaga.

Sebagai bahan gambaran terhadap buruknya pembinaan terpidana, terutama terpidana anak, akan diuraikan berdasarkan laporan **Vincentia Hanni S.**, seorang wartawan yang meneliti dan mewawancarai para penghuni lembaga pemasyarakatan anak dan melihat keadaan situasi dan

kondisi Lembaga Pemasyarakatan Anak di Tangerang.¹⁹⁰ Dilaporkan bahwa anak-anak penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Tangerang sangat merindukan kebebasan, untuk menandai sudah berapa lama mereka di LPA tersebut mereka membuat tanda coretan di dinding atau di kertas, malah ada yang sangat ekstrem dengan merobek sedikit daging di alat kelamin mereka. Hal ini menggambarkan betapa tingkat stress mereka di dalam lembaga tersebut sangat tinggi sekali. Setiap anak yang baru masuk harus mengalami masa karantina sebagai proses adaptasi selama 1 minggu, walaupun dalam prakteknya bisa berbulan-bulan. Selama masa karantina, mereka tidak boleh keluar dari sel karantina tersebut, segala kegiatan dilakukan di dalam ruangan sel, dari mulai tidur, mandi, buang air, bermain mereka lakukan di dalam ruangan tersebut.

Di LPA Tangerang tersebut dihuni oleh 343 anak, dengan rentang usia anak penghuni LPA tersebut antara 11 – 27 tahun. Padahal batas usia anak yang bisa menjalani hukuman pidana di penjara anak berdasarkan Undang Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak batas maksimum umur anak adalah 18 tahun. Akibat disparitas usia anak yang terlalu jauh ini, seringkali anak-anak yang lebih muda usianya menjadi sasaran kekerasan, pemerasan maupun kekerasan seksual. Dari laporan tersebut diungkapkan bahwa hampir setiap tahun ada saja anak yang mengidap penyakit kelamin, bahkan di tahun 2003 terdapat seorang

¹⁹⁰ Vincentia Hanni S., *Kisah Anak-Anak di Lembaga Pemasyarakatan, "Seks, Sayur Basi dan Premanisme"*, Harian Kompas, 8 Oktober 2003.

anak yang meninggal di penjara karena mengidap *gonore* (penyakit kelamin). Derita anak-anak pelaku tindak pidana yang menghuni LPA Tangerang tidak hanya itu saja, belum lagi fasilitas yang tersedia baik sarana dan prasarana yang kurang memadai, mayoritas anak-anak tidur tanpa alas tikar ataupun kasur, hanya anak-anak tertentu saja yang dapat menikmati tidur beralaskan kasur tipis. Untuk menahan dinginnya lantai dan angin malam, mereka akhirnya harus tidur bergerombol.

Dari gambaran situasi keadaan di salah satu Lembaga Pemasyarakatan Anak terbesar di Indonesia tersebut, jelas kiranya, bahwa pembinaan terpidana khususnya terpidana anak lebih baik dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan. Hal ini berkaitan keadaan lembaga pemasyarakatan dalam hal ini lembaga penjara anak yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembinaan dengan baik, selain minimnya sarana dan prasarana yang ada, minimnya anggaran pembinaan dan juga jumlah terpidana anak yang ditampung dalam suatu lembaga pemasyarakatan melebihi dari kapasitas dari yang seharusnya. Belum lagi adanya disparitas yang sangat jauh dari umur anak yang dimasukkan dalam satu lembaga, hal ini sangat membahayakan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak di masa mendatang dan tentunya pembinaan terhadap anakpun tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ide dasar pemasyarakatan itu sendiri.

Telah dibahas sebelumnya bahwa pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana ini harus diperhatikan aspek-aspek yang melekat

dalam diri anak tersebut, dengan melihat latar belakang kejiwaan anak yang masih dalam tahap belajar dan sangat rentan sekali terhadap masukan dari luar sehingga dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan diri serta jiwa si anak dalam mencari jati dirinya. Jika yang didapat oleh anak adalah hal yang baik, maka dikemudian hari ia akan menjadi lebih baik, tetapi sebaliknya jika yang di dapat itu adalah hal-hal yang buruk, maka suatu saat nanti perkembangan anakpun akan cenderung ke hal-hal yang buruk dan negatif.

Disadari bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap pelaku pidana anak-anak ini, melalui berbagai bentuk dan usaha tentunya menuntut kemampuan dan tanggung jawab yang lebih besar dari para pelaksananya, termasuk perlunya dukungan berupa sarana dan prasarana yang memadai. Karena disadari bahwa sarana dan prasarana yang ada saat ini sangatlah terbatas, maka para petugas pemasyarakatan harus mampu memanfaatkan melalui pengelolaan yang efisien sehingga mencapai hasil yang optimal.

Tujuan dari pemasyarakatan sendiri secara eksplisit dijelaskan dalam bagian konsideran huruf *b* bagian menimbang yang menyatakan, bahwa sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif

berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dan sistem pembinaan yang dapat diberikan kepada terpidana, khususnya terpidana anak (anak didik pemsyarakatan) tidak hanya dapat dilakukan dalam lembaga pemsyarakatan saja, tetapi juga dimungkinkan untuk dilaksanakan di luar lembaga pemsyarakatan. Menurut **Loebby Loqman**,¹⁹¹ pemsyarakatan sebagai proses terapi dapat diwujudkan dalam 2 (dua) pola pokok pembinaan, sebagaimana di uraikan dalam buku manual Pemsyarakatan Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (di dasarkan atas Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsyarakatan), yaitu : a) Pembinaan di Dalam Lembaga Pemsyarakatan; b) Pembinaan di Luar Lembaga Pemsyarakatan. Dalam hal ini, sebagai salah satu alternatif pembinaan di luar lembaga pemsyarakatan, Loebby Loqman mengaitkannya dengan pidana kerja sosial.¹⁹²

Pidana kerja sosial memiliki korelasi yang sangat positif dan sangat mendukung gagasan/ide pemsyarakatan dalam hal pembinaan para narapidana khususnya bagi anak-anak pelaku tindak pidana di luar lembaga pemsyarakatan, korelasi positif tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Kesesuaian tujuan, dimana tujuan dari pemsyarakatan adalah pembinaan kembali secara manusiawi dengan tetap menjunjung

¹⁹¹ Loebby Loqman, 2002, **Op.Cit.**, hal 75 - 104

¹⁹² **Ibid**, hal. 103.

tinggi harkat dan martabatnya terhadap seseorang yang sudah tersesat, dengan harapan agar dia sanggup menjadi manusia seutuhnya yang baik dan berguna bagi dirinya, bagi masyarakat serta bagi bangsa dan negara. Tujuan ini juga sama dengan tujuan pidana kerja sosial yang bertolak dari gagasan untuk tetap memanusiakan terpidana sebagai manusia yang utuh. Oleh Karena itu, hak-haknya sebagai manusia tetap dihormati dengan memberikan kebebasan bergerak tanpa harus dibatasi oleh lingkungan yang diberi tembok pembatas. Hal ini sesuai dengan kaidah yang terdapat dalam Resolusi PBB No. 40/33 tentang *United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)* mengenai penghindaran terhadap pengenaan pidana perampasan kemerdekaan bagi terpidana anak (lihat *Rule 19.1*).

- b. Ide pemasyarakatan pada hakekatnya merupakan gagasan melaksanakan pembinaan dengan sasaran akhir mengembalikan terpidana ketengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (resosialisasi). Hal inipun sama dengan ide dari pidana kerja sosial yang ingin memudahkan proses resosialisasi tersebut dengan tetap memberikan para anak-anak pelaku tindak pidana untuk tetap berhubungan dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya tanpa adanya batasan tembok pemisah yang dapat membuat anak-anak

frustasi. Dengan demikian anak-anak pelaku tindak pidana tersebut tidak mengalami *dehumanisasi* dan efek negatif lainnya akibat penerapan pidana dalam lembaga.

- c. Ide pemasyarakatan juga menghendaki terhindarnya para pelaku tindak pidana terhadap kemungkinan adanya *prisonisasi*, dimana seorang pelaku tindak pidana yang sedang menjalani hukumannya di suatu lembaga, karena bersosialisasi bersama-sama dengan masyarakat dari lembaga pemasyarakatan tersebut, yang jelas semuanya berstatus sebagai terpidana dari berbagai kasus kejahatan, maka akibat sosialisasi diantara mereka dapat membawa dampak buruk dari pergaulan sehari-hari. Seperti yang telah dibahas dan disebutkan sebelumnya bahwa lembaga pemasyarakatan atau penjara itu adalah lembaga pendidikan yang paling baik dalam mencetak penjahat-penjahat menjadi berperilaku lebih jahat lagi setelah keluar dari lembaga tersebut. Hal ini yang sering menjadi bahan kritikan mengenai keberadaan suatu lembaga penjara. Maka dengan adanya pidana kerja sosial diharapkan agar efek negatif dari *prisonisasi* tersebut dapat dihilangkan, karena pengenaan terhadap pidana kerja sosial tidak dilaksanakan di dalam lembaga, tetapi di luar lembaga yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Hal ini lebih baik jika dilaksanakan bagi terpidana anak, mengingat latar belakang secara aspek

kejiwaan anak dimana dalam masa anak-anak, akan rentan sekali dengan keadaan dilingkungan mereka. Mereka akan cepat belajar dari lingkungannya, jika lingkungan mereka buruk maka merekapun akan menjadi buruk, tetapi jika lingkungan mereka baik, maka mereka akan menjadi lebih baik.

- d. Dengan pidana kerja sosial, maka pembinaan anak akan lebih baik dan terarah. Anak dapat memperoleh pendidikan dan bimbingan secara baik, karena disamping mereka secara kejiwaan tidak terisolasi oleh suatu keadaan lingkungan yang membatasi gerak mereka sehingga dapat membuat mereka frustrasi dan stress, mereka juga dapat tetap belajar, memperoleh pendidikan dan bimbingan dari orang tuanya. Mereka dapat belajar untuk bertanggung jawab dari perbuatan dan kesalahan mereka. Mereka dapat menyadari bahwa apa yang telah mereka lakukan ternyata bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat, karena pembinaan mereka dilakukan di dalam masyarakat itu sendiri (di luar lembaga pemasyarakatan) sehingga mereka bisa melihat dan merasakan langsung apa yang sesungguhnya telah terjadi.
- e. Dengan pidana kerja sosial, mereka juga dapat belajar bekerja sebagai modal keterampilan mereka, dan jati diri mereka dapat terbentuk dari tanggungjawab pekerjaan yang diberikan kepada mereka. Hal ini lebih memudahkan seorang anak untuk

memperbaiki dirinya, karena anak-anak yang menjalankan pidana kerja sosial ini akan melihat kehidupan yang nyata dari arti sebuah tanggung jawab dan mereka tidak harus kehilangan hubungan dengan masyarakat sekitar.

Melihat berbagai kesesuaian antara pidana kerja sosial dengan ide pemasyarakatan guna melakukan pembinaan khususnya pembinaan di luar lembaga terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana, maka dapat disimpulkan pidana kerja sosial sangat menunjang bagi pembinaan terhadap anak-anak pelaku tindak pidana yang dilaksanakan di luar lembaga (*non custodial*).

B. Kebijakan Pengaturan Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Terpidana Anak Di Indonesia.

1. Upaya Penerapan Pidana Kerja Sosial Terhadap Terpidana Anak Di Indonesia dan Di Beberapa Negara Lain.

Kebijakan pidana atau kebijakan penal (*penal policy*), mencakup baik pengetahuan maupun seni yang terutama berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan praktis, yang memungkinkan peraturan-peraturan positif dirumuskan lebih baik dan sekaligus memberikan pedoman bagi pembuat undang-undang, bagi pengadilan yang menerapkan undang-undang tersebut serta bagi aparat koreksi yang secara konkrit menjadikan keputusan pengadilan tersebut mempunyai efek praktis.¹⁹³

¹⁹³ Muladi, 2002, *Op.Cit.*, hal. 131.

Berbicara masalah pengetahuan tentunya tidak terlepas dari pembahasan terhadap ilmu pengetahuan modern tentang kejahatan (*modern criminal science*), maka tinjauan terhadap kebijakan pidana (*penal policy*) merupakan keharusan, disamping tentu saja kriminologi yang mempelajari fenomena kejahatan dalam segala aspeknya dan hukum pidana yang menjelaskan dan menerapkan hukum positif, yang pada dasarnya merupakan reaksi sosial terhadap kejahatan.

Di samping pandangan moderat tersebut, terdapat pula pandangan-pandangan ekstrim seperti gerakan abolisionisme yang ingin menggantikan pidana penjara, bahkan ingin menggantikan sistem peradilan dengan sistem penyelesaian perkara yang bertumpu pada *assensus model (civilization of criminal justice system)*.¹⁹⁴

Di Indonesia, pembicaraan tentang pidana dan pemidanaan semakin intensif sehubungan dengan usaha-usaha untuk menyusun Konsep Rancangan KUHP Baru yang dikoordinasikan melalui BPHN Departemen Kehakiman dan HAM. Konsep Rancangan KUHP tersebut diharapkan dapat mencerminkan cita-cita nasional, kondisi manusia, alam dan tradisi bangsa dan memperhatikan pula kecenderungan-kecenderungan yang diakui oleh masyarakat internasional.

Dalam usaha pembaharuan tersebut seperti juga di negara-negara lain, timbul kesadaran bahwa pidana penjara memang tidak disukai

¹⁹⁴ Menurut gerakan abolisionisme, tidak ada organisasi yang berkuasa yang dapat mendefinisikan mana yang benar dan mana yang salah, sebab hanya mereka yang berselisihlah yang dapat menentukan secara tepat bagi diri mereka. Caranya adalah dengan melakukan *civilization* peradilan pidana, yakni menggunakan sejauh mungkin pendekatan hukum perdata, sebagai sarana penyelesaian konflik. Lihat lebih lanjut : Muladi, 2002, *Op.Cit.*, 125 – 129.

karena berdasarkan penelitian beberapa ahli hukum, seperti **R.M. Jackson, Sutherland, Cressey dan Ramsey Clark**, serta berdasarkan laporan Kongres PBB kelima tahun 1975 mengenai *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*,¹⁹⁵ pidana penjara banyak menimbulkan aspek-aspek negatif bagi para terpidana dan masyarakat luas.

Kecenderungan internasional yang sangat eksklusif dalam dekade terakhir antara lain adalah berkembangnya konsep untuk selalu mencari alternatif dari pidana kemerdekaan (*alternatif to imprisonment*) dalam bentuknya sebagai sanksi alternatif (*alternative sanctions*). Alasannya sebenarnya tidak hanya bersifat kemanusiaan, tetapi juga atas dasar pertimbangan filosofis pemidanaan dan alasan-alasan ekonomi.

Sampai seberapa jauh nantinya sanksi alternatif akan berhasil dengan memuaskan, sedikit banyak akan tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut :¹⁹⁶

- 1) sanksi alternatif harus cocok untuk menggantikan pidana kemerdekaan, dalam arti kesanggupan untuk mencapai tujuan dan fungsi yang sama;
- 2) sanksi alternatif harus dapat diterima sebagai pidana oleh masyarakat;
- 3) harus diperhitungkan kemanfaatannya atas dasar analisis biaya dan hasil, sebagaimana keuntungan dan kerugian pidana kemerdekaan;

¹⁹⁵ Lihat : Barda Nawawi Arief, 2000, **Op.Cit.**, hal. 43 – 47.

¹⁹⁶ Muladi, 2002, **Op.Cit.**, hal. 135.

- 4) penerapan sanksi harus dirasakan sebagai kebutuhan di dalam kerangka sistem peradilan pidana;
- 5) kesiapan infrastruktur pendukung secara memadai.

Atas dasar pemikiran-pemikiran di atas, maka Konsep Rancangan KUHP juga mencari *alternative to imprisonment*, tanpa harus menghilangkan pidana kemerdekaan (pidana penjara) dalam bentuk : pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial. Di beberapa negara eropa, alternatif pidana kemerdekaan dapat berupa pidana kerja sosial (*community service order*), pidana bersyarat (*suspended sentence*), pidana denda, *probation* dan sebagainya.

Dalam kerangka pemikiran di atas, maka dapat dikatakan bahwa pidana kerja sosial pada hakekatnya merupakan salah satu alternatif yang ditawarkan. Bahkan di pelbagai negara Eropa jenis pidana ini sudah berkembang dengan baik dan merupakan jenis alternatif pidana yang paling banyak diterapkan. Dalam rangka proses rehabilitasi dan resosialisasi terpidana, khususnya terpidana anak, maka alternatif pidana perampasan kemerdekaan tersebut semakin hangat dibicarakan, terutama setelah Kongres PBB tahun 1985 mengenai *Standar Minimum Rules for the Administration of Juvenile (SMR-JJ)* atau *The Beijing Rules* memberikan pedoman terhadap penanganan pelaku tindak pidana yang masih dibawah umur/anak-anak, dalam salah satu kaidahnya yaitu *Rule 19* mengenai penggunaan sekecil mungkin penempatan pada lembaga

pemasyarakatan/penjara terhadap anak-anak yang bermasalah dengan hukum.

Dengan melihat latar belakang anak dan aspek kejiwaan anak, maka pengenaan anak terhadap pidana perampasan kemerdekaan dapat berdampak sangat buruk terhadap perkembangan anak selanjutnya, karena secara psikologis anak, bahwa pada masa usia muda seperti itu, anak dalam keadaan pencarian jati diri dan selalu dalam proses belajar berdasarkan apa yang dilihat di sekelilingnya. Jika seorang anak ditempatkan dalam lingkungan yang kurang kondusif, maka perilaku anakpun akan berkembang sesuai dengan suasana lingkungannya tersebut. Apalagi dalam lembaga pemasyarakatan/penjara, seorang anak ditempatkan bersama-sama dengan teman sebaya atau yang lebih tua darinya, sehingga kemungkinan akan terpengaruhnya segala perilaku buruk akan semakin besar, mengingat lingkungannya terdiri dari anak-anak yang sedang mengalami permasalahan dengan hukum.

Maka salah satu alternatif pidana penjara yang saat ini sedang dikembangkan dan diterapkan di beberapa negara, terutama di negara-negara Eropa mengenai penanggulangan perbuatan anak yang melakukan tindakan pidana, salah satunya melalui pidana kerja sosial karena dianggap perkembangan anak tidak terganggu karena tidak dikenakan perampasan kemerdekaan. Anak masih dapat melaksanakan pendidikannya dan yang utama anak masih dekat dengan orang tuanya sebagai pembimbing utama yang secara kejiwaan dapat memberikan

pengaruh yang sangat baik pada anak karena orang tua adalah panutan, dan juga masih dalam lingkungan masyarakat, sehingga seorang anak masih dapat diberi kesempatan untuk belajar mengetahui norma-norma yang hidup di dalam masyarakat, sehingga mereka dapat belajar untuk bertanggungjawab terhadap perbuatannya yang melanggar norma-norma tersebut.

Kaitannya dengan hal tersebut di atas, maka dalam sub bab berikut ini akan dibahas masalah perbandingan penerapan pidana kerja sosial beberapa negara dalam KUHP-nya sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan dan juga dibahas mengenai rumusan sanksi pidana kerja sosial ini dalam Konsep Rancangan KUHP Baru Indonesia tahun 2000, terutama pengenaan sanksi tersebut kepada terpidana anak.

1.1. Pidana Kerja Sosial Menurut Beberapa KUHP Asing

a. Portugal

Pidana kerja sosial (*community service; trabalho a favor da comunidade*) di Portugal sebenarnya sudah lama ada, hanya penerapannya yang berbeda dalam KUHP yang berlaku sekarang ini.¹⁹⁷ Dahulu pidana kerja sosial merupakan sanksi yang berupa bekerja untuk kepentingan umum tanpa dibayar sebagai alternatif jika denda tidak dibayar. Perubahan dengan KUHP 1983 ialah pidana kerja sosial adalah pidana pokok,

¹⁹⁷ Lihat : Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal. 34 – 35.

Dimana pidana kerja sosial ini masih merupakan pidana bekerja tanpa dibayar sebagai pidana alternatif dari :

- 1) sebagai pidana alternatif bagi pidana penjara 3 bulan atau kurang dengan atau tanpa denda, atau dikenakan pidana denda harian sampai batas waktu 3 bulan (90 hari). (Pasal 60 KUHP Portugal);
- 2) sebagai pidana pengganti denda yang tidak dapat ditarik dari pendapatan atau dapat harta terpidana (Pasal 47 KUHP Portugal)

Denda untuk mengganti pidana penjara sampai 6 bulan termasuk dalam pengertian ini, jika denda itu tidak dibayar, jadi secara tidak langsung kerja sosial tersebut mengganti pidana penjara sampai 6 (enam) bulan.

Pidana kerja sosial secara keseluruhan dapat diterapkan dengan jangka waktu minimal selama 9 jam dan maksimal selama 180 jam, dan dilaksanakan setiap hari tidak boleh melebihi dari 2 jam.¹⁹⁸

Penerapan pidana kerja sosial terhadap terpidana anak, menjadi bahan perbincangan yang tidak dapat dijawab apakah bisa atau tidak dikenakan pidana ini terhadap anak-anak. Karena pengaturan mengenai pidana kerja sosial dalam

¹⁹⁸ Luis Manuel Oliveira de Miranda Pereira, *Community Service in Portugal : How Did Community Service Perform Since its Implementation in The 1982 Amendment*, on : Hans-Jorg Albrecht and Wolfram Schadler (editor), *Community Service (Gemeinnutzige Arbeit, Dienstverlening, Travail d'Interet General), A new option in punishing offender in Europe*, Freiburg, Jerman, 1986, hal. 143.

peraturan perundang-undangan Portugal ini hanya mengatur pidana kerja sosial sebagai bagian dari pidana denda, yaitu pidana kerja sosial dikenakan sebagai pengganti pidana denda (dalam aturan untuk orang dewasa). Dalam *Decreto-Lei* 401/82, tidak pernah dijelaskan mengapa pidana kerja sosial tidak dapat dijatuhkan terhadap terpidana anak, sama halnya dengan tidak dimasukkannya pidana denda. Tetapi dalam kenyataannya, pidana denda jelas tidak dijatuhkan pada terpidana anak, dan kondisi yang berhubungan dengan hal tersebut sudah jelas dinyatakan dalam aturan tentang pidana denda, ini dapat diartikan bahwa pembuat undang-undang menginginkan bahwa pidana kerja sosial bukan merupakan pidana pengganti dari pidana denda terhadap anak-anak. (seperti yang dikenakan di Belanda).¹⁹⁹ Sedangkan terhadap pengaturan sebagai pidana alternatif pidana penjara jangka pendek, tidak dimungkinkan karena keterbatasan waktu yang dimiliki oleh seorang anak.

Jadi ada dua alasan mengapa terpidana anak tidak dapat dikenakan pidana kerja sosial, yaitu : 1) karena dilihat dari kondisi anak tidak dapat dikenakan pidana, tetapi harus dikenakan tindakan dengan alasan untuk menghormati dan menghargai keadaan anak dalam proses rehabilitasi; 2) adanya

¹⁹⁹ Anton M. Van Kalmthout, Peter J.P. Tak, 1998, *Op.Cit.*, hal. 229.

pernyataan dalam peraturan bahwa kondisi yang memungkinkan untuk melakukan pidana kerja sosial adalah untuk jangka waktu yang pendek (sebagai alternatif pidana jangka pendek). Sedangkan jika dibandingkan dengan pidana kerja sosial yang dikenakan kepada orang dewasa sebagai pengganti denda yaitu, 1 hari (pidana denda) sama dengan 8 jam kerja. Dilihat dari kenyataan tersebut maka kondisinya tidak dimungkinkan bagi anak untuk melakukan pekerjaan karena mereka harus membagi waktu antara sekolah dengan kerja.

Walaupun pidana kerja sosial secara teori tidak dapat dikenakan terhadap terpidana anak, tetapi pidana tersebut dapat saja dikenakan terhadap terpidana anak dengan dua syarat yaitu :

- 1) Dalam *section* 5 dan 6 dari *Decreto-Lei 401/82*, dapat disimpulkan bahwa terhadap sanksi yang dikenakan kepada terpidana anak yang tertentu, hakim dapat mengenakan pidanakerja sosial jika hakim merasa bahwa pengenaan sanksi pidana penjara dalam perhitungannya dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan dan keadaan pribadi dari terpidana anak tersebut;
- 2) Bahwa pengenaan pidana kerja sosial itu tidak dapat diterapkan karena di beberapa peraturan melarang

seorang yang berumur di bawah 18 tahun (masih dalam golongan anak) untuk bekerja melebihi jam kerja yang normal bagi mereka (seperti yang di atur dalam *section* 21 D-L 409/71 dan *section* 11 D-L 110-A/81). Hal ini dapat diartikan bahwa terhadap seorang anak yang sudah berumur 18 tahun atau di atas 18 tahun dapat dikenakan pidana kerja sosial.²⁰⁰

Batasan umur terpidana yang dapat dikenakan pidana kerja sosial adalah 18 tahun atau lebih. Untuk terpidana anak, yang dapat dikenakan pidana kerja sosial adalah anak dengan batasan umur antara 18 – 21 tahun.²⁰¹

Ada kendala dalam penerapan pidana kerja sosial di Portugal. Hal ini disebabkan adanya ketidak konsistenan antara ketentuan pidana kerja sosial dalam peraturan perundang-undangan tersebut dan peraturan pelaksanaannya, sehingga terjadi kesenjangan seperti hakikat dan ruang lingkup kerja sosial kerja sosial, persyaratan persetujuan terpidana, laporan pengawas sosial, pedoman dan pengawasan eksistensi serta akibatnya jika ternyata pidana kerja sosial itu gagal dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana.²⁰²

²⁰⁰ Di Portugal, batasan usia pertanggungjawaban pidana anak adalah antara 10 – 21 tahun. *Ibid.*, hal. 228.

²⁰¹ *Ibid.*, hal. 229.

²⁰² Andi Hamzah, 1995, *Ibid.*, hal. 34

b. Denmark

Sebenarnya banyak hambatan dalam penerapan pidana kerja sosial ini di Denmark. Adanya penentangan penerapan pidana ini oleh serikat pekerja di Denmark. Mereka beralasan masih banyaknya pengangguran yang belum mendapat pekerjaan. Mereka mempertanyakan, bagaimana bisa terpidana diberi pekerjaan, sedangkan banyak orang baik-baik yang tidak bekerja. Oleh karena itu, sebelum seseorang dijatuhi jenis pidana ini, maka diminta terlebih dahulu suatu laporan dari *Kriminalforsorgen* (badan yang mengawasi pidana bersyarat). Laporan tersebut mengenai keadaan keluarga terpidana, sejarah pekerjaannya dan pendidikan terpidana.

Laporan itu digunakan untuk menentukan dapat tidaknya terpidana dikenakan pidana kerja sosial, atau dengan pengertian lain, laporan tersebut menyangkut perkiraan apakah pidana kerja sosial ini akan sukses mencapai tujuannya atau tidak. Laporan yang paling terpenting berasal dari Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasehat Hukumnya. Syarat lainnya pengenaan sanksi pidana ini adalah adanya persetujuan dari terpidana untuk dikenakan pidana kerja sosial tersebut.

Pidana kerja sosial dapat diterapkan dengan suatu syarat kondisi tertentu yaitu dalam hal penerapan pidana

jangka pendek, dan bukan merupakan penangguhan pidana (*suspended sentence*). Dalam praktek sebenarnya pidana kerja sosial dapat dikenakan sebagai pengganti pidana penjara yang ancaman pidananya untuk jangka waktu lebih dari 15 – 18 bulan. Tetapi dalam kebanyakan kasus yang terjadi, pidana kerja sosial dikenakan sebagai pidana pengganti terhadap pidana penjara yang diancam pidana antara 6 – 8 bulan.²⁰³

Jumlah waktu pengenaan pidana kerja sosial di Denmark antara 40 – 200 jam, dengan panjangnya waktu penyelesaian pidana kerja sosial tersebut minimum selama 4 bulan dan maksimum selama 1 tahun (12 bulan). Batasan umur bagi terpidana yang dapat dikenakan pidana kerja sosial adalah di atas 15 tahun. Rekomendasi kepada terpidana untuk dapat dikenakan pidana kerja sosial diberikan oleh Pengadilan, Penuntut Umum, lembaga pengawasan (*probation*) ataupun lembaga lainnya yang berhubungan penilaian pemberian pidana.

Terhadap terpidana anak yang melakukan perbuatan yang berhubungan dengan kejahatan terhadap barang milik pribadi (*property offences*) dengan ancaman pidana penjara 6 – 8 bulan dapat dikenakan pidana kerja sosial ini. Tetapi terhadap perbuatan pidana anak dalam kasus-kasus

²⁰³ Jorgen Balder, *Community Service in Denmark, Report on The Experience With Community Service as a Penal Sanction*, on : Hans-Jorg Albrecht and Wolfram Schadler (editor), 1986, Op.Cit., hal. 110.

penyerangan (*assault case*), narkoba, dan kasus lainnya yang berhubungan dengan kekerasan terhadap diri seseorang, pengenaan pidana kerja sosial diterapkan dengan sangat hati-hati. Pidana Kerja sosial sama sekali tidak dapat diterapkan terhadap perbuatan pidana anak yang berhubungan dengan mabuk di saat mengendarai kendaraan.

Pekerjaan yang dapat diberikan dalam rangka pelaksanaan pidana kerja sosial adalah pekerjaan-pekerjaan di dalam lembaga milik pemerintah, lembaga yang mendukung proyek pemerintah yang tujuannya tidak untuk mencari keuntungan, atau bekerja sebagai pekerja sukarela dalam suatu lembaga *voluntary*.

c. Perancis

Dimasukkannya ketentuan Pidana kerja sosial dalam KUHP Perancis, didasarkan atas penerapan aturan pidana kerja sosial yang ada di Canada berdasarkan hukum *Anglo-Saxon*. Selain pengalaman penerapan pidana kerja sosial di Canada tersebut, Perancis juga terinspirasi dari percobaan-percobaan penerapan pidana tersebut dalam rentang tahun 1992 – 1993, dan disimpulkan bahwa pidana kerja sosial sangat berguna jika diterapkan bagi para pelaku tindak pidana, yaitu menghindarkan diri mereka dari suasana hukuman

penjara dan juga dapat diterapkan bagi para residivis yang telah menghuni beberapa kali lembaga penjara tersebut.²⁰⁴

Pidana kerja sosial dilaksanakan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat secara sukarela, dan pengenaan pidana ini disyaratkan dengan adanya persetujuan dari terpidana untuk menerima sanksi pidana kerja sosial dengan bekerja untuk kepentingan masyarakat.²⁰⁵ Dan pelaksanaan pidana kerja sosial ini harus mengacu pada ketentuan tentang Ketenaga Kerjaan yang ada dalam Konvensi No. 29 dan 105 dari *The International Bureau of Labour* yang diadopsi dari *The European Declaration of Human Rights* dan *The International Declaration of Human Rights*.

Pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan selama jangka waktu minimum 40 jam dan maksimum 240 jam dan pelaksanaan keseluruhan pidana tersebut tidak melebihi jangka waktu maksimum 18 bulan. Dalam melaksanakan pekerjaan dalam lingkup pidana kerja sosial ini, terpidana tidak boleh bekerja melebihi waktu selama 12 jam dari waktu bekerja yang biasanya selama seminggu.

²⁰⁴ Jean-Marie Picquart, *Community Service, the French Experience*, http://www.penalreform.org/english/altern_csfrance.htm.

²⁰⁵ Nicole Mastracci, *Le Travail D'Interet General : The French Option in Substituting Short-Term Imprisonment*, on : Hans-Jorg Albrecht and Wolfram Schadler (editor), 1986, *Op.Cit.* hal. 90.

Pidana kerja sosial di Perancis, dapat dikenakan terhadap terpidana anak yang berumur antara 16 – 18 tahun, dengan jangka waktu antara 20 – 120 jam.

Jika pidana kerja sosial tidak dapat dilaksanakan secara baik sesuai dengan kesepakatan atau tidak dilaksanakan secara sempurna, maka pengadilan yang memberikan pidana tersebut akan melihat kembali keputusan yang telah dijatuhkan tersebut dengan mengganti keputusan tersebut menjadi pidana penjara (sebagai pidana bersyarat atau secara langsung dikenakan pidana penjara) atau dikenakan pidana denda.

Menurut **Jean-Marie Picquart**, pidana kerja sosial didalam ketentuan KUHP Perancis, pada pokoknya terdiri dari 2 tipe, yaitu :²⁰⁶

- 1) Pidana kerja sosial sebagai pidana pokok (diterapkan selama 200 jam yang dilaksanakan selama 6 bulan, jika gagal dilaksanakan, maka hukuman dapat digantikan dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar 200.000 F) (*Article 132-54 the French Criminal Code*);
- 2) Sanksi pidana kerja sosial sebagai kombinasi dengan pidana bersyarat (*suspended sentence*). (sanksi pidana

²⁰⁶ Jean-Marie Picquart, **Op.Cit.**, hal : 2.

bersyarat yang dapat dikenakan pidana kerja sosial dengan ancaman pidana minimal 3 bulan penjara). (Berdasarkan *Article 132-54 the French Criminal Code*, di sebutkan bahwa "*This provision is very close to a probation order. In particular, its use is not subject to any conditions*). Pidana kerja sosial di sini dapat dikenakan secara keseluruhan atau sebagian dari pembatal pidana bersyarat (hakim berpandangan untuk mengambil alih yurisdiksi pembedaan tersebut).

d. Republik Czech²⁰⁷

Pidana Kerja Sosial telah diterapkan dalam *The Czech Penal Code* sejak tahun 1995. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Republik Czech ini berlaku efektif pada Januari 1996. Pengaturan pidana kerja sosial dapat diterapkan apabila diancam dengan pidana kurang dari 5 (lima) tahun. Selain itu juga hakim harus memperhitungkan terlebih dahulu mengenai sifat dari perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku, kepribadian si pelaku dan juga harus mempunyai dasar yang kuat atas tujuan yang akan dicapai dari pengenaan sanksi pidana kerja sosial kepada pelaku tanpa harus memasukkannya ke dalam penjara. Hal ini dimaksudkan agar pidana kerja sosial

²⁰⁷ Sumber : *Recent Development*, <http://www.prison.org/english/altrec.htm>

merupakan satu-satunya pidana alternatif dari pidana penjara yang dapat dikenakan.

Seseorang yang dikenakan pidana kerja sosial ini harus melakukan suatu pekerjaan yang dilaksanakan secara sukarela yang keuntungannya dari pekerjaan yang ia lakukan itu dapat dirasakan oleh masyarakat. Pidana kerja sosial tersebut dilaksanakan dengan jangka waktu selama 50 – 400 jam, dan pelaksanaannya harus berakhir dalam jangka waktu 1 tahun setelah ditetapkannya suatu putusan oleh pengadilan.

Pengadilan juga memberikan pembatasan terhadap pelaku pidana kerja sosial, yaitu jika pelaku gagal memperbaiki hidup atau tidak dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh pengadilan dalam putusannya kepada pelaku, maka pengadilan akan mengubah putusannya tersebut menjadi hukuman penjara. Dalam keadaan seperti itu, pelaku tetap menjalankan pidana kerja sosial dengan bekerja di dalam penjara setiap hari selama paling sedikit 2 jam sampai selesai waktu pidananya seperti yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

e. Inggris ²⁰⁸

Di Inggris, pidana kerja sosial dalam *Criminal Justice (Community Service) Act* 1983, dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang berumur minimal 16 tahun yang dinyatakan

²⁰⁸ Dari *Criminal Justice (Community Service) Act, 1983* yang diadopsi juga dalam *Criminal Justice and Court Service Act 2000*. <http://www.UK-Acts.com/crowncopyright2000>.

bersalah atas tindakannya melawan hukum. Pidana kerja sosial yang dikenakan, dapat dilaksanakan dengan rentang waktu selama tidak kurang dari 40 jam dan tidak lebih dari 240 jam.

Penetapan pengadilan terhadap pengenaan pidana kerja sosial terhadap seorang terpidana, didasarkan atas beberapa persyaratan yaitu :

1. Pengadilan merasa puas setelah mempertimbangkan keadaan terdakwa dari petugas pengawasan dan kesejahteraan (*probation and welfare officer*), dan jika dianggap perlu petugas tersebut dapat didengar kesaksiannya mengenai keadaan diri terdakwa yang cocok jenis pekerjaan yang akan diberikan dalam pidana kerja sosial tersebut;
2. Terpidana menyetujui untuk dikenakan pidana kerja sosial tersebut.

Sebelum pidana kerja sosial dikenakan, maka hakim harus menjelaskan kepada terpidana mengenai :

- a) Akibat dari pengenaan sanksi pidana kerja sosial, yaitu :
terpidana harus melaporkan setiap saat kepada pengadilan dimana terpidana bertempat tinggal atau dimana pekerjaan yang diperintahkan itu dilakukan atau kepada petugas yang ditunjuk.

- b) Memperlihatkan hasil kerja yang memuaskan untuk beberapa jam kerja yang telah diperintahkan oleh pengadilan atau oleh petugas yang bertugas dalam mengawasi jalannya pidana kerja sosial ini.
- c) Melaporkan setiap perubahan alamat kepada petugas yang telah ditunjuk.

Jika seorang terpidana gagal melaksanakan ketentuan yang diberikan dalam pelaksanaan pidana kerja sosial, maka ia patut dipersalahkan atas tindakan melawan hukum dan dapat dikenakan hukuman denda tidak melebihi dari 300 poundsterling.

f. Amerika Serikat²⁰⁹

Di Amerika Serikat, pidana kerja sosial bukan merupakan bentuk sanksi pidana, tetapi lebih merupakan bentuk tindakan di dalam ruang lingkup pengawasan (*probation*) dimana sebelumnya petugas pengawasan berperan dalam pemberian sanksi tersebut. Pemberian pidana kerja sosial ini dilaksanakan untuk jangka waktu antara 100 – 500 jam dan lamanya pidana kerja sosial ini tidak boleh melebihi jangka waktu 1 tahun.

Tujuan dari pidana kerja sosial ini diarahkan pada tujuan pemidanaan klasik yaitu :

²⁰⁹ Sumber : *Community Service, Office of Probation and Pretrial Service Administrative Office of the U.S. Courts*, Januari, 2003, <http://www.uscourts.gov/misc/2003-community.PDF>

- a. *Punishment*, yaitu pidana kerja sosial termasuk dalam pidana yang berupa tindakan, yaitu pidana pengawasan. Pidana ini juga membatasi kebebasan individu dari pelaku dan menghendaki mereka untuk mengorbankan waktu luangnya dengan melakukan pidana kerja sosial.
- b. *Reparation*, yaitu pidana kerja sosial memberikan kepada pelaku tindak pidana untuk bertobat dalam jalan yang benar dan bersifat membangun.
- c. *Restitution*, yaitu pidana kerja sosial dipandang sebagai pengganti dari kompensasi financial terhadap korban atau bagian secara simbolik dari ganti kerugian yang harus diberikan jika yang menjadi korban adalah masyarakat.
- d. *Rehabilitation*, yaitu pidana kerja sosial membantu dalam mengembangkan pandangan mengenai tanggung jawab masyarakat terhadap pelaku kejahatan dan memberikan kesempatan kepada mereka dalam membangun rasa percaya diri dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk juga menanamkan dan menolong kepada para pelaku kejahatan tersebut agar dapat membangun dirinya dan menambah keterampilannya.

Pelaku tindak pidana yang dapat dikenakan pidana kerja sosial adalah pelaku yang melakukan tindak pidana

dalam korporasi ataupun secara individual, terhadap pelaku tindak pidana yang tergolong dalam *first offender*, terhadap para residivis, orang kaya ataupun miskin, anak-anak maupun orang dewasa.

Tetapi pengadilan dalam memberikan pidana kerja sosial terhadap pelaku tindak pidana ini sangat bersikap hati-hati dan melalui proses seleksi yang sangat ketat. Tidak semua kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dikenakan pidana kerja sosial ini. Seseorang yang karena perbuatannya, diperkirakan kedepannya dapat memberikan ancaman yang serius kepada masyarakat, maka orang tersebut tidak memenuhi syarat untuk diberikan pidana kerja sosial ini. Biasanya yang termasuk tidak memenuhi syarat untuk dikenakan pidana kerja sosial adalah terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan obat-obatan terlarang dan kecanduan alkohol, seseorang yang memiliki sejarah melakukan serangan atau tindakan terhadap kejahatan seksual, seseorang yang memiliki masalah serius secara emosional dan latar belakang kejiwaannya (Psikhologinya)

Pelaku yang dapat dikenakan pidana kerja sosial harus memiliki kepribadian dan stabilitas sosial yang baik, memiliki

keinginan serta motivasi yang tinggi, dan tidak memiliki catatan kriminal yang menyangkut kejahatan dengan kekerasan.

Petugas pengawasan (*probation officers*) memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan pidana kerja sosial ini. Sektor pekerjaan yang dapat diberikan dalam mensukseskan pidana kerja sosial di Amerika Serikat ini, terdiri dari jenis pekerjaan yang berhubungan dengan :

- a) Pekerjaan yang meluangkan waktunya di dalam hutan lindung dengan membersihkan jalan setapak dan membangun tempat perkemahan;
- b) Pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan terhadap anak-anak dalam sekolah khusus anak-anak yang dalam perawatan (seperti sekolah luar biasa - penulis), khususnya dalam penyediaan makanan dan membuat kursi roda bagi anak-anak cacat;
- c) Bekerja dalam perusahaan jasa konstruksi yang sedang membangun proyek bendungan milik pemerintah dan membantu penanganan tempat penampungan bagi pengungsi yang terkena banjir;
- d) Mengirimkan makanan ke panti-panti jompo;
- e) Bekerja sebagai operator alat-alat berat untuk meratakan jalan raya, membersihkan salju di jalan raya, atau membangun kawasan sehat di tempat penampungan warga indian;
- f) Bekerja di perusahaan yang membuat perangkat lunak (*software*) komputer, mengajarkan keterampilan komputer untuk siswa

sekolah menengah yang berada dikawasan perumahan penduduk yang padat atau kumuh.

Jika pelaku yang melaksanakan pidana kerja sosial ini tidak memenuhi kewajibannya, maka petugas dari pengawasan akan memberikan sanksi berupa teguran ataupun pencabutan kembali sanksi tersebut dan akan dikenakan pidana lainnya.

g. Mauritius ²¹⁰

Penerapan pidana kerja sosial di negara Mauritius, didasarkan pada aturan khusus yaitu *The Community Service Order Act 2001*. pidana kerja sosial ini dikenakan terhadap pelaku pidana dengan batasan umur minimum 18 tahun atau lebih yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara selama tidak lebih dari 3 tahun. Jika seorang di denda dengan pidana denda tidak lebih dari 10.000 rupees dengan atau tanpa perintah untuk membayar ternyata tidak dibayarkan, maka sebagai terpidana dikenakan pidana penjara sebagai pidana pengganti, tetapi hakim dapat menunda pelaksanaan pidana penjara tersebut dengan memberikan sanksi pidana lain berupa pidana kerja sosial dalam jangka waktu tertentu (*Article 3 (3) The Community Service Order Act 2001*).

²¹⁰ Sumber dari : *A Bill to Provide for Community Service Orders as an Alternative to Imprisonment, The Community Service Order Act 2001, enacted by the Parliament of Mauritius*, http://www.mauritius_penalcodes.com

Pengadilan dapat memberikan pidana kerja sosial terhadap terpidana dengan suatu persyaratan yaitu : (1) adanya keinginan dari terdakwa untuk dikenakan pidana kerja sosial; (2) pengadilan harus mendengarkan masukan atau berdasarkan dari petugas pengawasan mengenai keadaan diri dari terpidana untuk secara pantas dapat diberikan pidana kerja sosial tersebut; (3) adanya pemikiran yang matang tentang akibat yang terjadi jika pidana kerja sosial tersebut diberikan kepada terpidana (berhubungan dengan tujuan pemidaan).

Pidana kerja sosial ini dilaksanakan dalam jangka waktu tidak kurang dari 60 jam, dan maksimumnya tidak lebih dari 300 jam, serta diselesaikan dalam jangka waktu selama tidak lebih dari 12 bulan. Pengadilan dalam menerapkan pidana kerja sosial ini harus memperhitungkan waktu luang yang tersedia bagi terdakwa, termasuk waktu dalam setiap akhir minggu, kemudian juga harus dipertimbangkan masalah hukuman yang dikenakan terhadap terdakwa tidak malah mengancam keamanan dari masyarakat, selain itu pekerjaan yang diberikan sebagai bentuk hukuman terhadap terpidana tersebut wakan memberikan manfaat atau keuntungan bagi negara, *statutory body*, lembaga sosial, dan organisasi sukarela yang tujuannya tidak mencari keuntungan.

h. Belanda

Di Belanda, pidana kerja sosial hanya dapat dijatuhkan sebagai suatu pidana pokok alternatif.²¹¹ Dalam hal hakim mempertimbangkan untuk menjatuhkan misalnya, pidana badan tidak bersyarat yang diancam dengan hukuman tidak lebih dari 6 (enam) bulan ataupun pidana badan yang untuk bagian tidak bersyarat yang dieksekusi dengan ancaman hukuman tidak lebih dari 6 (enam) bulan, maka sebagai pengganti atau alternatifnya hakim dapat memberikan pidana kerja sosial. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana maksimum lebih dari 6 (enam) bulan, kemungkinan besar tidak dapat menikmati pidana kerja sosial itu, dan juga bagi para residivis.

Pidana kerja sosial tidak akan diberikan sebagai alternatif terhadap pidana bersyarat (*voorwaardelijke vrijheidstraf*), pidana denda atau kurungan pengganti. Alasannya adalah karena dalam pandangan pembuat undang-undang, pidana kerja sosial ini lebih berat dibandingkan dengan pidana bersyarat/percobaan, maka penggantian pidana bersyarat/percobaan tersebut dengan pidana kerja sosial juga mengimplikasikan pemberatan pidana.

²¹¹ Di Belanda, sanksi pidana pokok menurut Pasal 113 ayat (3) UUD Belanda 1983 hanya dapat dijatuhkan oleh seorang hakim, di luar sanksi pidana pokok, jaksa/penuntut umum dapat memberlakukan sebagai syarat transaksi pengenaan pidana terhadap seseorang. Lihat : Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 798.

Pekerjaan yang dilakukan dalam pidana kerja sosial di Belanda ini hanyalah terhadap pekerjaan yang dilakukan demi kepentingan pelayanan masyarakat umum, tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan selain di badan-badan pemerintahan, misalkan di perusahaan swasta/partikelir yang bidang pekerjaannya berupa bidang kesehatan masyarakat, lingkungan hidup, kerja sosial budaya, perlindungan pelestarian alam, dan lembaga-lembaga bantuan sosial lainnya.

Haruslah diupayakan agar sifat pekerjaan yang dilakukan dalam kaitannya dengan pidana kerja sosial, berkaitan dengan delik yang dilakukan terpidana. Misalkan mereka yang bersalah melakukan pengrusakan fasilitas-fasilitas umum, dapat dihukum untuk bekerja pada dinas kebersihan pemerintah daerah atau dinas taman kota.

Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kerja sosial terkecuali ada persetujuan dari terdakwa (Pasal 22c KUHP Belanda). Hakim baru dapat menjatuhkan pidana kerja sosial setelah ia memastikan adanya orang atau instansi yang untuk jangka pendek tertentu bersedia memberikan pekerjaan tersebut kepada terpidana. Dimungkinkan jika ternyata tidak ada pekerjaan yang tersedia bagi terpidana, maka hakim dapat

tidak menjatuhkan pidana kerja sosial, tetapi hanya dimungkinkan untuk pengenaan pidana badan saja.

Dalam suatu keputusan hakim yang memuat sanksi pidana kerja sosial, maka disamping dicantumkannya sanksi pidana kerja sosial tersebut, maka tercantum pula sanksi pidana badan, yang oleh hakim dinyatakan tidak dijalankan kecuali jika hakim tidak memilih pidana kerja sosial sebagai suatu sanksi pidana dalam keputusan akhirnya atau hal ini untuk mengantisipasi jika ternyata sanksi pidana kerja sosial gagal dilaksanakan dengan baik.

Maksimal yang dapat diterapkan untuk pidana kerja sosial ini adalah selama 240 jam, perhitungan abstrak selama 240 jam tersebut sebanding dengan pidana badan selama 6 (enam) bulan, dengan perincian tiap minggu maksimal terpidana bekerja selama 9 – 10 jam. Maksimum jangka waktu penyelesaian pidana kerja sosial ini adalah selama 1 (satu) tahun.

Terhadap terpidana anak, batasan umur anak dalam KUHP Belanda adalah 12 – 18 tahun, namun untuk rentang umur antara 16 – 18 tahun, hakim dengan mempertimbangkan kedewasaan dari terpidana anak tersebut, dapat memilih untuk memberlakukan hukum pidana dewasa dengan ketentuan pidana penjara dikurangkan setengahnya dari pidana penjara

orang dewasa, pidana penjara seumur hidup diganti dengan pidana penjara 10 tahun.

Dalam pasal 77h ayat (2), disebutkan bahwa pidana kerja sosial termasuk dalam sanksi alternatif pengganti pidana pokok yang dikenakan terhadap anak. Dalam Pasal 77f ayat (1b) disebutkan bahwa dalam menerapkan Pasal 74 ayat (1), Penuntut Umum dapat menambahkan syarat-syarat kepada terdakwa berupa pidana kerja sosial (*arbeid ten algemenen*) atau memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana atau mengikuti proyek pelatihan minimal 40 jam dalam suatu periode tertentu, namun tidak boleh lebih dari 3 bulan.

Pidana kerja sosial sebagai sanksi alternatif harus diterapkan/dikenakan sebagai pengganti dari pidana-pidana yang ditetapkan untuk delik khusus, dan tidak ada sanksi alternatif yang dapat disamakan dengan tindakan "penempatan dalam suatu lembaga" (Pasal 77g). Dalam Pasal 77b KUHP Belanda disebutkan bahwa, dalam hal seseorang telah mencapai usia 16 tahun, tetapi belum 18 tahun pada saat delik dilakukan, hakim dapat tidak menerapkan Pasal 77g – 77gg KUHP Belanda dan memberlakukan ketentuan dalam bab terdahulu apabila ada alasan berdasarkan kualitas/bobot,

sifat/karakter pembuat, atau keadaan-keadaan pada waktu delik dilakukan.²¹²

Dapat disimpulkan dari dua pasal di atas (yaitu Pasal 77b dan Pasal 77g), bahwa batas usia anak yang dapat melaksanakan pidana kerja sosial adalah anak yang telah berusia 18 tahun, karena dalam ketentuan Pasal 77b KUHP Belanda disebutkan bagi anak yang **sudah berusia 16 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun** (cetak tebal oleh penulis) tidak dapat dikenakan sanksi dalam Pasal 77g – 77gg (pidana kerja sosial dikenakan terhadap suatu delik khusus).²¹³

Dalam Pasal 77c KUHP Belanda, mengenai batasan usia anak yang dapat dikenakan pidana kerja sosial berbeda dengan Pasal 77b KUHP Belanda. Dalam Pasal 77c disebutkan bahwa dalam hal seseorang telah mencapai usia 18 tahun tetapi belum 21 tahun pada saat delik dilakukan, hakim dapat menerapkan pasal-pasal 77g – 77gg, apabila ada alasan berdasarkan sifat/karakter dari si pembuat (*the character of the offender*) atau keadaan-keadaan pada saat delik dilakukan.²¹⁴

Tetapi terhadap ketentuan penerapan sanksi pidana kerja sosial sanksi alternatif dari pidana pokok berupa denda,

²¹² Lihat Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hal. 17 – 21.

²¹³ Delik khusus yang dimaksudkan disini misalkan saja delik yang berupa perbuatan pengrusakan terhadap fasilitas-fasilitas umum seperti yang dikatakan oleh Jan Remmelink. Lihat : Jan Remmelink, 2003, *Op. Cit.*, hal. 800.

²¹⁴ Lihat : Barda Nawawi Arief, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hal. 33.

maka ketentuan yang berlaku bagi terpidana anak dalam kaitannya mengenai pengenaan pidana kerja sosial berdasarkan Pasal 77l ayat (5) disebutkan bahwa sanksi pidana kerja sosial akan dikenakan secara proporsional dengan jumlah denda/biaya-pemulihan yang belum terpenuhi (*the amount outstanding*) dan sanksi tersebut hanya dapat dikenakan apabila terpidana belum mencapai usia 18 tahun. Lamanya kerja sosial tersebut tidak boleh lebih dari 200 jam (Pasal 77m ayat (2)), dengan jangka waktu tidak boleh lebih dari 6 bulan apabila pekerjaan tersebut terdiri dari pekerjaan yang tidak lebih dari 100 jam dan tidak melebihi jangka waktu maksimal yaitu 1 tahun (Pasal 77m ayat (3)).

Jadi dalam KUHP Negara Belanda, batas umur pengenaan sanksi pidana kerja sosial terhadap anak terdiri dari 3 ketentuan yaitu :

1. Pidana kerja sosial dapat dikenakan terhadap anak yang sudah mencapai usia 18 tahun, jika perbuatan yang dilakukan termasuk dalam delik khusus (Pasal 77b KUHP Belanda);
2. Pidana Kerja Sosial dikenakan terhadap terhadap terpidana anak dengan batasan umur mmencapai 19 tahun, tetapi belum 21 tahun pada saat delik dilakukan, apabila ada alasan berdasarkan

sifat/karakter si pelaku tindak pidana atau keadaan-keadaan pada saat delik dilakukan (Pasal 77c KUHP Belanda);

3. Pidana kerja sosial dapat dikenakan terhadap anak dibawah usia 18 tahun jika ternyata pidana kerja sosial tersebut dikenakan sebagai sanksi alternatif dari pidana denda (Pasal 77I KUHP Belanda).

Dari gambaran penerapan pidana kerja sosial di beberapa negara yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa untuk penerapan batasan umur yang dapat dikenakan terhadap pidana tersebut sangat beragam, tetapi jika dikaitkan dengan batasan umur anak, maka dapat ditarik jalan tengah bahwa batasan umur yang dapat dikenakan pidana kerja sosial adalah antara 16 – 18 tahun, hal ini mengingat perkembangan dan aspek kematangan seorang anak, dengan batas umur seperti itu, perkembangan anak memasuki pradewasa, sehingga sudah mulai memiliki pemikiran untuk bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan.²¹⁵

Walaupun di negara-negara khususnya di Eropa dan Amerika telah banyak yang menerapkan sanksi pidana kerja sosial tetapi ada juga di

²¹⁵ Menurut Soerjono Soekanto, apabila seorang anak sudah menginjak usia 17 tahun sampai dengan 18 tahun, anak tersebut lazim disebut sebagai golongan muda atau pemuda-pemudi (*youth*), dimana sikap tindak mereka rata-rata sudah mendekati pola sikap tindak orang dewasa, walaupun dari sudut perkembangan mental belum sepenuhnya demikian. lihat : Soerjono Soekanto, *Kehidupan Remaja dan Masalahnya*, artikel dalam buku : **Mengenal dan Memahami Masalah Remaja**, kumpulan karangan, Pustaka Antara, Jakarta, 1993, Op.Cit, hal. 10.

beberapa negara ternyata pidana kerja sosial ini menghadapi banyak kendala dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu beberapa negara seperti Swedia, Spanyol, Yunani, dan Belgia masih menolak jenis pidana ini dan belum masuk dalam KUHP-nya. Swedia menolak jenis pidana kerja sosial ini sebagai alternatif bagi pidana penjara singkat dengan alasan :

- 1) Pidana kerja sosial itu memerlukan penentuan pekerjaan yang bagaimana yang cocok bagi kesanggupan individual terdakwa;²¹⁶
- 2) Diperlukan banyak sekali tenaga untuk mengawasi pelaksanaan pidana kerja sosial ini;²¹⁷
- 3) Masyarakat Swedia adalah masyarakat yang *highly professionalized* dan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan profesional tersebut perlu latihan-latihan yang intensif. Mengingat pidana kerja sosial tidak dapat bersaing dengan pekerjaan-pekerjaan yang diupah, maka akan sulit sekali menemukan proyek-proyek pelayanan sosial yang cocok;²¹⁸
- 4) Bekerja adalah merupakan hak istimewa dan terhormat dan merupakan bagian penting dari kehidupan sosial, sehingga akan selalu dipertanyakan pembenaran bekerja sebagai sanksi pidana.²¹⁹

Di Belgia, pidana kerja sosial ditolak penerapannya mengingat kurangnya tenaga-tenaga pengawas yang diperlukan jika pidana kerja

²¹⁶ Andi Hamzah, 1995, *Op.Cit.*, hal. 48.

²¹⁷ *Ibid.*

²¹⁸ Muladi, 2002, *Op.Cit.*, hal. 139.

²¹⁹ *Ibid.*

sosial tersebut diterapkan. Alasan Spanyol untuk tidak memasukan pidana kerja sosial sebagai salah satu sanksi pidana dalam KUHP-nya di dasarkan atas kenyataan belum memadainya infra struktur yang diperlukan, khususnya lembaga probation yang terorganisasikan secara baik.

Alasan-alasan yang dikemukakan oleh beberapa negara di atas kiranya dapat dimengerti, atas dasar pengalaman-pengalaman di pelbagai negara yang sudah terlebih dahulu menerapkan pidana kerja sosial ini sbagai sanksi pidana. dari pengalaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan sanksi ini banyak tergantung pada ada tidaknya perangkat infrastruktur yang baik. Di pelbagai negara pengawasan dalam sanksi ini diserahkan pada *probation service* (lembaga pengawasan).

Walaupun begitu, bagi negara-negara yang sudah menerapkan pidana kerjas sosial ini, seperti Amerika serikat, dapat merasakan keuntungan-keuntungan yang ditimbulkan dari pidana tersebut. Pidana kerja sosial dapat memberikan keuntungan bagi pelaku tindak pidana, masyarakat, korban dan bagi pengadilan, yaitu :²²⁰

1. Bagi pelaku tindak pidana : sanksi pidana kerja sosial hanya sedikit memberikan pembatasan individu dibandingkan dengan sanksi pidana penjara, memberikan kepada pelaku sebuah tanggung jawab akan pekerjaannya dan juga tanggung jawab terhadap keluarganya, memberikan kesempatan kepada mereka untuk dapat

²²⁰ Article from *Office of Probation and Pretrial Services Administrative Office of the U.S. Court*, Januari 2003, <http://www.uscourt.gov/misc/2003-community.PDF>.

kembali kemasyarakatan dan dapat menolong orang lain, memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pengalaman kerja, mendapatkan keterampilan kerja dan referensi kerja, sebagai dorongan bagi mereka untuk memiliki rasa harga diri.

2. Bagi Masyarakat : adanya tenaga kerja tanpa harus diberi upah, dapat memberikan pelayanan setiap waktu yang sebelumnya tidak ada karena keterbatasan pembiayaan, menyelamatkan pembayaran pajak yang diberikan guna pembiayaan selama dipenjara, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembinaan para pelaku tindak pidana, memberikan kesempatan untuk merubah paradigma negatif terhadap para terpidana.
3. Bagi korban kejahatan : sanksi pidana kerja sosial dapat menjadi tuntutan yang nyata bagi para pelaku tindak pidana,²²¹ memberikan kepuasan karena mengetahui bahwa pelaku tindak pidana tersebut tidak dapat mengelak dari tanggungjawabnya terhadap perbuatan pidana yang telah ia lakukan.
4. Bagi Pengadilan : sanksi pidana kerja sosial ini merupakan sanksi yang bersifat *fair* dan sangat efektif, merupakan alternatif pidana yang dapat mewujudkan tujuan pemidanaan.

²²¹ Maksud dari tuntutan yang nyata terhadap pelaku dari korban yaitu bahwa dengan pidana kerja sosial, yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dapat dirasakan pula oleh korban sebagai bagian dari masyarakat

1.2. Pidana Kerja Sosial Menurut Rancangan KUHP Indonesia

Penerapan pidana kerja sosial di Indonesia hanya baru berupa konsp atau rancangan saja. Ketentuan mengenai penerapan sanksi pidana kerja sosial ini dapat dilihat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Baru) atau disingkat menjadi RKUHP-Baru. Dalam kebijakan formulasi mengenai pidana kerja sosial yang tercantum dalam RKUHP-Baru tersebut, dikenakan tidak hanya terhadap ketentuan pidana bagi orang dewasa, dimana kerja sosial masuk dalam pidana pokok, tetapi juga diberlakukan bagi terpidana anak dalam pidana dengan syarat yang juga merupakan bagian dari pidana pokok.

Tetapi, pada dasarnya, sebenarnya pidana kerja sosial itu merupakan pidana alternatif dari pidana pokok lain, terutama alternatif dari pidana penjara (perampasan kemerdekaan) seperti yang disebutkan dalam penjelasan bahwa pidana kerja sosial (selain pidana pengawasan) dikembangkan sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan.

Dari beberapa pasal yang tercantum dalam RKUHP-Baru Tahun 2000, maka pidana kerja sosial merupakan pidana alternatif dari :

- 1) Sebagai alternatif dari pidana denda, jika denda tersebut tidak melebihi denda kategori I yaitu sebesar Rp. 150.000,- (Pasal 76 ayat (3) RKUHP);

- 2) Sebagai alternatif pidana penjara jika ancaman pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda (Pasal 79 ayat (1) RKUHP);

Dan dari beberapa ketentuan tentang pidana kerja sosial sebagai pidana alternatif di atas, maka jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) RKUHP Tahun 2000, yang disebutkan :

*“Jika suatu tindak pidana diancam dengan **pidana pokok secara alternatif** (cetak tebal penulis), maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan”*

dari ketentuan dalam Pasal 56 RKUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa pidana kerja sosial merupakan pidana alternatif utama yang harus diterapkan sebagai pidana pengganti karena berdasarkan Pasal 60 ayat (1) RKUHP menempatkan pidana kerja sosial dalam urutan paling akhir, yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 60 ayat (2) –nya bahwa urutan dalam Pasal 60 ayat (1) tersebut menentukan berat ringannya, maka pidana kerja sosial ditempatkan sebagai urutan paling akhir dari pidana pokok lainnya mengindikasikan secara tegas bahwa pidana kerja sosial tersebut merupakan pidana yang paling ringan.

Pidana kerja sosial dalam RKUHP juga diterapkan terhadap terpidana anak sebagai pidana pokok dengan syarat. Jenis-jenis pidana bagi anak dalam Pasal 109 ayat (1) RKUHP tersebut terdiri dari :

- a. Pidana nominal :

1. pidana peringatan; atau

2. pidana teguran keras.
- b. Pidana dengan syarat :
 1. pidana pembinaan di luar lembaga;
 2. pidana kerja sosial; atau
 3. pidana pengawasan;
- c. Pidana denda; atau
- d. Pidana pembatasan kebebasan :
 1. pidana pembinaan di dalam lembaga;
 2. pidana penjara; atau
 3. pidana tutupan.

Selain pidana pokok di atas, dalam Pasal 109 ayat (2) RKUHP, terdapat jenis sanksi pidana tambahan yang terdiri atas : (a) perampasan barang-barang tertentu dan atau tagihan; (b) pembayaran ganti kerugian; atau , (c) pemenuhan kewajiban adat.

Masuknya pidana kerja sosial dalam kategori pidana dengan syarat, dimaksudkan dalam RKUHP adalah pidana yang penerapannya dikaitkan dengan syarat-syarat khusus dengan tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik. Dalam pidana dengan syarat ini, hakim tidak menjatuhkan pidana penjara, tetapi berupaya untuk memberikan sanksi berupa pidana pembinaan di luar lembaga, pidana kerja sosial atau pidana pengawasan. Pada saat hakim menjatuhkan salah satu pidana tersebut, maka ditentukan syarat-syarat baik umum maupun khusus, yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu.

Apabila syarat-syarat itu tidak dipenuhi, maka dapat dilakukan perpanjangan waktu menjalani pidana tersebut. Syarat umum misalkan selama terpidana anak menjalani pidana bersyarat, maka ia tidak boleh melakukan atau mengulangi perbuatan pidananya. Syarat khusus misalkan harus menjalankan pidana bersyarat tersebut sampai selesai dengan baik, harus membuat laporan dan sebagainya.

Pidana kerja sosial dilaksanakan minimum selama 7 jam dan maksimum selama 240 jam bagi terdakwa yang telah berusia 18 tahun ke atas dan 120 jam bagi terdakwa yang berusia di bawah 18 tahun, dan jika terpidana tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban menjalankan pidana kerja sosial ini tanpa alasan yang sah, maka terpidana diperintahkan :

- a. mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;
- b. menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang sebelumnya diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau
- c. membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dibayar.

Khusus jika pidana kerja sosial dikenakan terhadap terpidana anak maka harus memperhatikan usia layak kerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam pelaksanaannya ternyata anak tersebut tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana kerja sosial tersebut tanpa alasan yang sah, maka

pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial itu (Pasal 113 ayat (2) RKUHP).

Pelaksanaan pidana kerja sosial ini dapat diangsur dalam waktu paling lama 12 bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan atau kegiatan lain yang bermanfaat. Maksud dari pengertian ini adalah bahwa terpidana masih diberi kesempatan untuk menjalankan tugasnya mencari nafkah demi keluarganya atau bagi seorang anak untuk menjalankan kewajibannya ke sekolah, karena sifat dari pidana kerja sosial ini sebagai pidana (*work as penalty*) maka pekerjaan yang dilakukan tidak dibayar.

Sebelum melaksanakan pidana kerja sosial ini harus persetujuan terdakwa untuk dikenakan pidana kerja sosial (menghindari adanya kerja paksa yang dapat bertentangan dengan *Forced Labour Convention* (Geneva Convention 1930), *the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom* (Treaty of Rome 1950), *the Abolition of Forced Labour Convention* (the Geneva Convention 1957), dan *the International Covenant on Civil Political Rights* (the New York Covenant on Civil Political Rights (the New York Convention, 1966)), kemudian dilihat riwayat sosial terdakwa untuk menilai latar belakang terdakwa serta kesiapannya baik secara fisik maupun mental dalam menjalani pidana kerja sosial.

Dalam Penjelasan Pasal 79 RKUHP disebutkan bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial in dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti, panti lansia (panti jompo), sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana.

Pemberian pidana kerja sosial terhadap seorang terdakwa, sebelumnya hakim harus dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan pelaksanaan pidana tersebut. Dalam Pasal 79 ayat (2) RKUHP disebutkan bahwa penjatuhan pidana kerja sosial wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- b. usia layak kerja terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
- d. riwayat sosial terdakwa;
- e. perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
- f. tidak boleh dikomersialkan;
- g. tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama dan politik terdakwa; dan
- h. kemampuan terdakwa membayar denda.

Dari uraian masalah pengaturan pidana kerja sosial, baik di dalam RKUHP – Baru Indonesia maupun di beberapa negara, dapat ditarik kesimpulan sebagai gambaran tentang keberadaan pidana kerja sosial tersebut, bahwa pidana kerja sosial posisinya sebagai pidana alternatif, terutama sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan yaitu pidana penjara dan juga sebagai pidana alternatif dari pidana denda (dengan ketentuan khusus).

Dilihat dari tujuan pemidanaan, pidana kerja sosial masih sesuai dengan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perlindungan masyarakat, perlindungan korban dan perlindungan pelaku tindak pidana itu sendiri. Juga sifat dan hakekat dari pidana kerja sosial yang merupakan pidana kerja secara sukarela tanpa diberi upah, dan pengenaannya terhadap terpidana harus berdasarkan syarat-syarat khusus yaitu antara lain : harus berdasarkan permintaan dan persetujuan dari terdakwa, harus dipertimbangkan latar belakang terdakwa, harus dipertimbangkan tujuan dari penjatuhan pidana kerja sosial itu terhadap diri terdakwa, harus dipertimbangkan keuntungan yang dapat diambil dari penjatuhan pidana kerja sosial tersebut, baik bagi terdakwa itu sendiri maupun bagi korban dan masyarakat pada umumnya.

Selain itu juga, ada pembatasan usia terhadap pengenaan pidana kerja sosial ini, hal ini terutama bagi terpidana anak, dengan adanya pembatasan umur (selain batasan kriteria lainnya yang harus dipenuhi seorang anak, misalkan tidak bertentangan dengan peraturan mengenai

pekerja anak, batasan jam kerja yang diperbolehkan bagi anak, batasan aspek kejiwaan dan sebagainya), maka tidak semua terpidana anak dapat dikenakan pidana kerja sosial ini. Hal ini harus diperhatikan dalam pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan pidana kerja sosial tersebut kepada terpidana anak, mengingat latar belakang anak secara fisik dan psikologis yang membatasi anak untuk dapat bekerja dalam suatu pekerjaan yang membutuhkan tanggung jawab yang lebih besar.

Dalam pelaksanaannya, di setiap negara, bahwa pidana kerja sosial ini erat sekali kaitannya dengan masalah pengawasan. Dalam pelaksanaan pidana kerja sosial, harus ada petugas pengawas, apakah itu dari lembaga pengawasan secara khusus (*probation institution*) atau juga dari lembaga lain yang ditunjuk, yang bertugas mengawasi jalannya pidana kerja sosial serta memberikan bimbingan dan pembinaan sekaligus memberikan laporan dari hasil yang telah dicapai dari apa yang telah dilakukan oleh seorang terpidana yang melakukan pidana kerja sosial tersebut.

2. Prospek Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Anak Indonesia

Sifat dan hakikat sanksi pidana terhadap anak yang saat ini ada dalam peraturan pidana anak terutama dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, jika dilihat lebih jauh lagi tampaknya kompleksitasnya lebih tinggi bila dibandingkan dengan sanksi pidana terhadap orang dewasa. Sanksi pidana pada umumnya (terhadap

pelaku orang dewasa) selama ini dipandang hanya sebagai pengobatan simptomatik, bukan kausatif, dimana pengobatan simptomatik lewat sanksi pidana ternyata mengandung sifat-sifat kontradiktif/paradoksial dan unsur-unsur negatif lainnya yang membahayakan atau setidaknya berdampak negatif bagi pelaku.²²²

Apabila hal tersebut secara analogi dikaitkan dengan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana, maka masalahnya pun tidak berbeda, bahkan justru mungkin dampak negatifnya lebih besar menimpa anak pelaku tindak pidana, karena pengalaman dari si anak selama mengalami pengobatan simptomatik lewat proses pemidanaan, “obatnya” akan lebih bersifat paradoksial dan negatif membekas pada diri anak secara kejiwaan bila dibandingkan dengan pelaku orang dewasa.²²³

Apabila terjadi hal yang demikian maka tidak menutup kemungkinan bagi anak-anak yang sedang menghadapi masalah dengan hukum akan mengalami perkembangan baik secara mental maupun fisik menjadi lebih buruk dari apa yang telah dilakukannya. Padahal, seperti yang telah disinggung terdahulu, kadangkala perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang anak hanyalah terpicu karena keadaan tertentu yang melingkupi diri si anak sehingga ia melakukan hal-hal yang negatif, seperti semata-mata dari motif iseng atau sensasional, karena dorongan lingkungan sosial yang tidak kondusif bagi perkembangan jiwa anak dan sebagainya.

²²² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 45.

²²³ Paulus Hadisuprpto, 2003, *Op.Cit.*, hal. 114.

Maka sangatlah tidak manusiawi jika penanganan masalah anak dengan hukum pidana ini pun malah dapat membuat anak makin sengsara dan membuat perkembangan jiwanya pertumbuhan dirinya ke depan semakin terganggu. Padahal dalam salah satu kaidah yang tercantum dalam Konvensi hak anak, disebutkan bahwa penanganan masalah anak harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik untuk anak, oleh karena itu perlu kiranya penyelesaian permasalahan anak melalui hukum pidana secara khusus terutama penerapan sanksi pidana bagi anak yang mengacu pada prinsip tersebut.

Pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum dan peradilan anak ini sering terungkap di dalam berbagai pernyataan antara lain :²²⁴

- 1) anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan (*juvenile offender*) janganlah dipandang sebagai seorang penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang;
- 2) pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis) yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*) serta menghindari proses stigmatisasi yang

²²⁴ Muladi, Barda Nawawi Arief, 1996, *Op.Cit.*, hal. 115.

dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anak dalam arti yang wajar.

Adanya pendekatan khusus itu dimaksudkan agar perkembangan dan pertumbuhan anak sebagai generasi masa depan bangsa dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga mereka benar-benar menjadi tunas-tunas bangsa yang memiliki kepribadian yang baik. Untuk mencapai hal ini, sudah seharusnya pemerintah berkewajiban melaksanakan pembinaan terhadap terpidana anak dengan kebijakan yang memberikan pengayoman dan perlindungan bagi si anak itu sendiri berdasarkan ide dasar masyarakat yang bersumber dari konsep hukum sebagai pengayom dengan memberikan pembinaan terhadap segala kekurangan dengan cara :²²⁵

- 1) Agar selama kehilangan kemerdekaan, maka terpidana dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan;
- 2) Pekerjaan dan pendidikan yang diberikan tidak boleh hanya bersifat mengisi waktu luang atau bagi kepentingan jawatan. Pekerjaan harus satu dengan pekerjaan masyarakat atau ditujukan kepada Pembangunan Nasional;
- 3) Bimbingan diberikan berdasarkan Pancasila.

Dalam *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* 1985, dalam Rule 18.1 diuraikan beberapa

²²⁵ Ninik Widiyanti, Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 67.

jenis tindakan bagi penanganan anak yang melakukan tindak pidana untuk menghindari sanksi yang bersifat institusionalisasi, yaitu :²²⁶

- 1) tindakan/perintah perawatan, bimbingan dan pengawasan (*Care, guidance and supervision orders*);
- 2) pengawasan (*Probation*);
- 3) perintah kerja sosial (*Community Service Orders*);
- 4) pidana yang bersifat uang ganti rugi (*financial penalties, compensaton and restitution*);
- 5) perawatan lanjutan dan tindakan perawatan lainnya (*intermediate treatment and other treatment orders*);
- 6) tindakan/perintah untuk ikut berpartisipasi dalam kelompok-kelompok konseling dan kegiatan lain yang serupa (*Orders to participate in group counseling and similar activities*);
- 7) tindakan-tindakan atau perintah yang berhubungan dengan perawatan untuk membantu perkembangan dengan tinggal di dalam masyarakat atau dalam lingkungan yang bersifat mendidik (*orders concerning foster care, living communities or other educational settings*);
- 8) tindakan-tindakan lain yang relevan (*other relevant orders*).

Selanjutnya dalam *Rule 18.2* ditegaskan :

"Tidak seorang anakpun dapat dilepaskan dari pengawasan orang tua, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali hal itu diperlukan mengingat keadaan kasus si anak"

²²⁶ Muladi, Barda Nawawi Arief, 1996, *Op.Cit.*, hal. 126.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa penanganan terhadap terpidana anak, harus dilakukan secara khusus, mengingat latar belakang anak, dan pengenaan pidana terhadap anak haruslah diupayakan untuk tidak menempatkan anak pada suatu lembaga, kecuali pada kasus-kasus tertentu yang memungkinkan anak untuk ditempatkan pada lembaga, dalam hal ini lembaga pemasyarakatan. Tetapi konsep dari pemasyarakatan sendiri yang berupa pengayoman terhadap para terpidana, juga diarahkan pada pendekatan diri dengan masyarakat, dengan tidak memisahkan terpidana dengan masyarakat. Salah satu rekomendasi terhadap tindakan yang seharusnya diberikan kepada terpidana anak, yang tertera dalam *Rule 18.1 SMRJJ* adalah dengan tindakan berupa kerja sosial (*community service order*).

Tindakan berupa pemberian sanksi pidana bagi terpidana anak yaitu pengenaan pidana kerja sosial ini menurut penulis dapat diterapkan dan tidak bertentangan dengan konsep dasar dari pemasyarakatan yang telah disebutkan terdahulu, terutama mengenai masalah sedapat mungkin agar terpidana tidak dipisahkan dengan masyarakat dan pemberian Pekerjaan dan pendidikan tidak boleh hanya bersifat mengisi waktu luang atau bagi kepentingan jawatan, pekerjaan harus satu dengan pekerjaan masyarakat atau ditujukan kepada pembangunan nasional.

Maka prospek pada masa yang akan datang, pidana kerja sosial ini dapat diterapkan sebagai salah satu sanksi pidana bagi terpidana anak, mengingat banyak sekali keuntungan yang di dapat dari pemberian sanksi

model ini, seperti yang telah diungkapkan sebelumnya. Tetapi ada beberapa hal yang harus dicermati berkenaan dengan penerapan sanksi pidana kerja sosial ini, walaupun konsep mengenai pidana kerja sosial ini sudah dimasukkan dalam Rancangan KUHP – Baru, khususnya pengenaan pidana kerja sosial terhadap anak, timbul masalah terhadap batasan minimum umur anak yang dapat dikenakan pidana ini secara jelas. Dalam RKUHP Pasal 113 ayat (1) RKUHP hanya menyebutkan batasan umur anak layak kerja disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam Pasal 79 ayat (3) hanya menyebutkan batasan umur 18 tahun ke atas dan yang berusia di bawah 18 tahun . Hal ini justru nantinya akan menimbulkan kerancuan, karena seperti yang telah dibahas mengenai batasan umur anak, dalam peraturan di Indonesia batasan umur anak berbeda-beda.

Walaupun kemudian jika masalah batasan umur anak minimum yang dapat dikenakan pidana kerja sosial tersebut didasarkan pada ketentuan dalam RKUHP, maka berdasarkan aturan pada Pasal 106, maka batasan minimal umur anak yang dapat dikenakan pidana kerja sosial tersebut adalah 12 tahun.

Apabila merujuk pada undang-undang ketenagakerjaan, mungkin hal ini bertentangan karena batasan minimum umur anak yang dapat dipekerjakan dalam undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah antara umur 13 tahun (Pasal 69 ayat 1) dan 14 tahun (Pasal 70), jadi ada dua kriteria batasan umur, sehingga hal ini

dapat menimbulkan kebingungan nantinya dalam penerapan pengenaan minimum batasan umur anak yang dapat dikenakan terhadap sanksi pidana kerja sosial. Mengapa tidak dipertegas saja dalam RKUHP mengenai batasan minimum anak yang dapat dikenakan pidana kerja sosial, misalkan antara 13 – 14 tahun atau salah satu dari batasan umur tersebut, atau batasan umur atas dasar aspek kejiwaan seperti yang pernah diuraikan sebelumnya oleh penulis yaitu antara 16 – 18 tahun,²²⁷ dibawah umur minimum tersebut dapat dikenakan tindakan lainnya selain pidana kerja sosial.

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam Pasal 69 ayat (1) disebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak kecuali bagi anak yang berumur 13 – 15 tahun dapat dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Tetapi dalam Pasal 69 ayat (2) disebutkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan : a) izin tertulis dari orang tua atau wali; b) perjanjian kerja antara dengan orang tua atau wali; c) waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; d) dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; e) keselamatan dan kesehatan kerja; f) adanya hubungan kerja yang jelas; dan g) menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

²²⁷ Lihat Pendapat Soerjono Soekanto sebelumnya, *Loc. Cit.*, hal. 207.

Dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dan ketentuan ini berlaku bagi anak yang berusia minimal 14 (empat belas) tahun. Pekerjaan ini dapat dilakukan dengan syarat (Pasal 70 ayat (3)) yaitu : a) diberi petunjuk yang jelas tentang tata cara pelaksanaan pekerjaan, adanya bimbingan dan pengawasan dalam melakukan pekerjaan; b) diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Dari ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang anak yang dapat melakukan suatu pekerjaan adalah anak dalam batas usia antara 13 sampai dengan 14 tahun dengan syarat pekerjaan yang dilakukan adalah harus bersifat pekerjaan yang ringan dengan waktu kerja maksimum 3 jam. Tidak ada penjelasan lebih lanjut dengan maksimum kerja 3 jam ini apakah perhari atau perminggu. Tetapi ketentuan dalam Pasal 69 ayat (2) butir c menyatakan seperti itu. Seorang anak dapat melakukan pekerjaan diluar ketentuan Pasal 69 tersebut, dengan ketentuan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang seperti yang tercantum dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Apabila dilihat, maka Pasal 70 ini dapat dikaitkan dengan masalah penerapan pidana kerja sosial bagi terpidana anak. Dengan

ketentuan dalam Pasal 70 ini, maka batas usia anak dapat dicantumkan secara tegas yaitu anak yang berusia minimum 14 tahun.

Masalah lainnya mengenai teknis pelaksanaan dari pidana kerja sosial terhadap terpidana anak ini dapat disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 68 – Pasal 76 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, dan khususnya mengenai batasan usia dan penghindaran pekerjaan yang termasuk kategori pekerjaan terburuk bagi anak.

Ketentuan pelarangan untuk mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk ini harus benar-benar diperhatikan dalam pelaksanaan pidana kerja sosial, seperti yang tercantum dalam Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan kriteria pekerjaan-pekerjaan terburuk dimaksud meliputi : a) segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya; b) segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian; c) segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan atau d) semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Ketentuan lainnya diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition*

and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182), dan juga ketentuan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Selain pelaksanaan teknis mengenai ketentuan ketenagakerjaan yang harus diperhatikan dalam penerapan pidana kerja sosial bagi terpidana anak ini, juga ada permasalahan lainnya yang tidak kalah penting, seperti masalah kesiapan aparatur penegak hukum dari mulai aparat kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, Hakim dan aparatur di Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Kesiapan tersebut tidak hanya kesiapan mental dari aparat untuk dapat mengedepankan setiap permasalahan anak ditangani secara khusus dan hati-hati, karena hal ini membutuhkan kesabaran dan keuletan dari aparatur itu sendiri, tetapi juga kesiapan pengetahuan yang harus diberikan mengenai tatacara penanganan setiap kasus pidana yang melibatkan anak-anak, hal ini tentunya terkait dengan masalah profesionalitas para aparat penegak hukum itu tadi.

Berkaitan dengan kesiapan aparat, yang selalu berhubungan dengan masalah pelaksanaan pidana kerja sosial adalah adanya suatu lembaga pengawasan atau lembaga lainnya yang ditunjuk untuk mengawasi dan membina dari pelaksanaan pidana kerja sosial itu sendiri. Dan tentunya sekali lagi, masalah profesionalitas kerja dituntut di sini, oleh karena itu sebelum penerapan pidana kerja sosial ini dilaksanakan,

terlebih dahulu disiapkan petugas-petugas yang profesional, dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan.

Selain masalah aparat dan petugas pelaksana/pengawas, juga dibutuhkan sarana dan prasarana lainnya dalam pelaksanaan pidana kerja sosial tersebut, misalkan adanya tempat atau lembaga yang khusus menangani masalah penerapan pidana kerja sosial ini yang tugasnya ikut mensukseskan pidana ini agar mencapai tujuan secara efektif, misalkan mencari pekerjaan-pekerjaan yang cocok bagi terpidana, menghubungi instansi-instansi yang telah ditunjuk oleh pemerintah dalam pelaksanaan pidana kerja sosial, atau membantu para terpidana yang telah selesai melaksanakan kewajibannya menjalankan pidana kerja sosial ini dengan berupaya menyalurkan bakat dan minat serta keterampilan yang dimiliki dari terpidana tersebut agar terpidana dapat beralih profesi dengan tidak mengulangi perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau melakukan perbuatan pidana lainnya.

Masalah penetapan batas minimum waktu pelaksanaan pidana kerja sosial dalam RKUHP yang dapat dikenakan terhadap anak sama dengan yang dikenakan dengan orang dewasa yaitu 7 (tujuh) jam (Pasal 79 ayat (4) RKUHP). Ini bisa menjadi kendala dalam pengefektifan pidana kerja sosial dilihat dari tujuan pemberian pidana kerja sosial itu sendiri, sebagai upaya perbaikan pelaku, khususnya pelaku tindak pidana anak. Apabila diperbandingkan dari beberapa negara yang menerapkan pidana kerja sosial seperti yang telah diuraikan sebelumnya, rata-rata waktu

minimum pelaksanaan pidana kerja sosial yang dikenakan antara 20 – 100 jam.²²⁸ Dari beberapa negara batas minimum rata-rata di atas 20 jam kecuali Portugal yang hanya 9 jam.

Mengacu pada Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka berdasar Pasal 69 ayat (2) butir c disebutkan seorang anak dapat bekerja dengan waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam (*perhari, menurut penulis*). Maka jika dikaitkan dengan pengaturan pidana kerja sosial, anak dapat dikenakan pidana tersebut dengan maksimum jumlah jam perhari yaitu selama 3 (tiga) jam, jika minimum waktu pelaksanaan menurut RKUHP selama 7 (tujuh) jam saja, dikaitkan dengan jumlah jam perhari maksimum 3 (tiga) jam maka jika dibagi perhari dari jumlah keseluruhan pelaksanaan minimum 7 (tujuh) jam, ini berarti pelaksanaan minimum pidana tersebut cuma dua setengah hari. Apa yang akan di dapat oleh anak jika ia hanya dikenakan pidana minimum selama 7 (tujuh) jam saja. Apabila dikaitkan dengan batas minimal pelaksanaan pidana kerja sosial terhadap anak paling singkat 7 (tujuh) hari (Pasal 113 ayat (3) RKUHP) , maka diartikan bahwa seorang anak melaksanakan pidana kerja sosial 1 jam perharinya (dari perhitungan 7 jam x 1 hari = 7 hari). Menurut penulis alangkah lebih baik jika pelaksanaan waktu minimum pidana kerja sosial ini ditambah, misalkan 14 jam dengan perincian waktu minimum dilaksanakan selama 7 hari (14 jam diperoleh dengan perhitungan perhari selama 2 jam x 7 hari = 14 jam). Ini memungkinkan untuk lebih mengefektifkan tujuan dari pemberian pidana

²²⁸ Batas minimum pelaksanaan pidana kerja sosial di beberapa negara (ada beberapa negara yang khusus diberikan terhadap anak) sebagai berikut : di Denmark 40 jam, Perancis 20 jam, Czech 50 jam, Inggris 40 jam, Amerika Serikat rata-rata 100 jam, Mauritius 60 jam, Belanda 40 jam, sedangkan Portugal 9 jam. Lihat pembahasan sebelumnya dalam Bab III tesis ini.

kerja sosial tersebut dan tetap memberikan waktu luang yang cukup bagi seorang anak untuk melaksanakan tugasnya belajar, baik di sekolah maupun di rumah ataupun kesempatan untuk berkumpul dengan keluarganya.

Tetapi untuk masalah maksimum jumlah jam perhari dapat disesuaikan lagi, dan harus ada pedoman pelaksanaan pidana kerja sosial yang menyangkut masalah batas waktu maksimum pelaksanaan pidana kerja sosial tersebut mengingat hal ini tidak ditentukan dalam RKUHP. Sebagai bahan perbandingan, di Portugal, batas maksimum waktu pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh lebih dari 2 jam perhari, sedangkan di Perancis batasan maksimumnya 12 jam perminggu, di Republik Czech batasan waktunya 2 jam perhari. Hal ini terkait dengan kondisi anak dan latar belakang anak serta kebutuhan dari anak itu sendiri, agar pelaksanaan pidana kerja sosial ini tidak mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak ataupun dapat menyita waktu anak untuk kegiatan lainnya seperti ke sekolah, mengerjakan tugas belajar di rumah, ataupun hal-hal lain yang diperlukan oleh anak.

Pemberian batasan waktu pelaksanaan pidana kerja sosial ini sangat penting dan harus dipertimbangkan sedemikian rupa mengingat tujuan pemberian pidana kerja sosial ini tidak hanya sebagai pengisi waktu luang saja, tetapi sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan (*skill*) terhadap pelaku, memberikan pengalaman kerja guna memperbaiki dirinya agar dapat bermanfaat dikemudian hari. Oleh karena itulah seyogyanya dalam ketentuan RKUHP mengenai hal ini untuk dapat dirumuskan kembali.

Dari semua yang telah diuraikan secara keseluruhan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan pidana kerja sosial di masa yang akan datang akan sangat menunjang bagi proses rehabilitasi dan resosialisasi terpidana anak, terutama sesuai dengan tujuan pemidanaan yang intergratif, karena keuntungan yang didapat dari pidana kerja sosial ini dapat dirasakan oleh masyarakat, korban dan pelaku sekaligus juga memberikan perlindungan bagi masyarakat, korban itu sendiri dan pelaku seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tetapi ada beberapa masalah yang patut untuk diperhatikan agar tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan pidana kerja sosial secara efektif, terutama menyangkut masalah pengaturan pidana kerja sosial anak itu sendiri (terutama yang ada dalam RKUHP) dan juga ketika pelaksanaan dalam prakteknya nanti seperti yang telah diuraikan di atas.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap dua pokok permasalahan yaitu : 1) Sejauhmanakah ide pidana kerja sosial untuk anak sesuai atau menunjang tujuan pemidanaan dan pembinaan terhadap terpidana anak dan, 2) Bagaimanakah kebijakan pengaturan sanksi pidana kerja sosial terhadap terpidana anak dalam rangka pembaharuan hukum pidana anak di Indonesia. Dari permasalahan pertama diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Ide dasar pidana kerja sosial terhadap anak sebagai alternatif dari pidana penjara sangat menunjang tujuan pemidanaan terhadap anak yaitu tujuan pemidanaan integratif, yang tidak saja mencakup perlindungan terhadap masyarakat, tetapi juga terhadap pelaku anak dan korban itu sendiri.
2. Dengan tujuan pemidanaan yang integratif tersebut, diharapkan anak dapat memperbaiki diri sesuai dengan kebutuhan dan keadaan diri dari anak itu sehingga berguna bagi masa depannya.
3. Penerapan sanksi pidana kerja sosial terhadap anak, dapat membantu dan mempermudah proses pembinaan terhadap terpidana anak serta dapat menjauhkan anak dari hal-hal negatif yang didapat jika proses pembinaan dilakukan dalam penjara seperti proses stigmatisasi dan dehumanisasi yang dapat merusak pribadi seorang anak.

Sedangkan dari permasalahan kedua diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan pengaturan sanksi pidana kerja sosial di dalam hukum pidana anak di Indonesia yang tertuang dalam Rancangan KUHP (RKUHP) saat ini adalah :
 - a. Pidana kerja sosial merupakan alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara jangka pendek) dan denda yang ringan.
 - b. Adanya pertimbangan khusus yang wajib diperhatikan oleh hakim dalam penjatuhan pidana kerja sosial.
 - c. Pidana kerja sosial terhadap terpidana anak dalam RKUHP merupakan jenis pidana pokok dengan syarat dan pelaksanaannya tidak dibayar karena sifatnya sebagai pidana (*work as penalty*).
 - d. Batasan usia anak yang dapat dikenakan pidana kerja sosial adalah maksimum 18 tahun dan minimum disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Pidana kerja sosial terhadap anak dijatuhkan paling lama 120 (seratus duapuluh) jam dan paling singkat 7 (tujuh) jam.
2. Sebagai upaya pembaharuan hukum pidana anak di Indonesia, kebijakan pengaturan sanksi pidana kerja sosial di dalam hukum pidana anak di Indonesia di masa yang akan datang yang tertuang dalam RKUHP seyogyanya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Adanya pembatasan yang jelas mengenai ketentuan syarat khusus atau syarat umum yang dapat dipakai sebagai

pedoman hakim dalam menjatuhkan pidana kerja sosial dalam kaitannya sebagai jenis pidana pokok dengan syarat.

- b. Masalah batasan usia minimum bagi terpidana anak yang dikenakan sanksi pidana kerja sosial perlu ditetapkan atau dicantumkan secara tegas untuk menghindari kerancuan dan keraguan hakim dalam menentukan batas usia minimum dari beberapa peraturan yang berlaku tentang usia layak kerja anak.
- c. Adanya penambahan jumlah jam minimum dalam pelaksanaan pidana kerja sosial terhadap anak. Penetapan batas minimum lamanya pelaksanaan pidana kerja sosial terhadap anak yaitu 7 (tujuh) jam dirasakan kurang efektif karena dengan pelaksanaan bekerja hanya 7 (tujuh) jam saja, dirasa belum mencapai tujuan dari pemberian pidana kerja sosial tersebut yaitu memberikan pengalaman dan keterampilan bekerja kepada anak sebagai bekal memperbaiki dirinya dikemudian hari.
- d. Ditetapkannya batas waktu pelaksanaan pidana kerja sosial terhadap anak dalam satu hari (jumlah maksimum jam yang harus dilaksanakan dalam satu hari).

B. SARAN

1. Pidana kerja sosial erat kaitannya dengan masalah fasilitas, sarana dan prasarana tempat bekerja yang memadai, oleh karena itu sebelum pelaksanaan pidana kerja sosial ini berjalan, maka segala fasilitas, sarana dan prasarana telah dipersiapkan, terutama terhadap

petugas pengawasan yang mengawasi dan membina terpidana yang melaksanakan pidana kerja sosial ini, serta tentunya aparat penegak hukum yang profesional dan mengerti mengenai tujuan pidana kerja sosial ini, terutama ketika mereka menangani kasus yang terpidananya masih tergolong anak-anak.

2. Adanya pembatasan umur yang jelas dalam KUHP nantinya (saat ini masih RKUHP) tentang batasan umur anak yang dapat dikenakan pidana kerja sosial ini. Batas umur anak lebih baik disesuaikan dengan keadaan psikologis anak, terutama menyangkut tanggung jawab anak dalam melakukan pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht, Hans-Jorg and Wolfram Schadler** (editor), *Community Service* (*Gemeinnutzige Arbeit, Dienstverlening, Travail d'Interet General*), *A new option in punishing offender in Europe*, Freiburg, Jerman, 1986.
- Asshiddiqie, Jimly**, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia : Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1996.
- Atmasasmita, Romli** , *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982.
- (Editor), *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- , *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif eksistensialisme dan Abolisionisme*, Putra Abardin, Bandung, 1996.
- , *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- A. Greenfeld, Lawrence**, *Child Victimizers : Violent Offenders and their Victims, Statistician*, U.S. Bureau of Justice Statistic, http://www.u.s.bureau_of_justice.com
- Bemmelen, Van**, *Hukum Pidana 1*, Terjemahan, Binacipta, Bandung, 1987.
- Budiarti**, *Masalah Peradilan Anak di Indonesia*, Makalah, Seminar "Masalah Hukum Perlindungan anak", BPHN, Jakarta, 1993.
- BPHN**, *Loka Karya Evaluasi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak*, Binacipta, Bandung, 1977.
- Curtis, Sarah**, *Children Who Break the Law or Everybody Does It*, Waterside Press, 1997.

- Cross, Rupert**, *Punishment, Prison and The Public, An Assesment of Penal Reform in Twentieth Century England by an Armchair Penologist*, Steven & Sons, London, 1971.
- David, Benedicto S.**, *Justice With A Heart* (alih bahasa : Ali Boediarso), Ulasan Hukum, Majalah Varia Peradilan tahun XII No. 135, Desember 1996.
- Dellyana, Shanty**, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Dirdjosoworo, Soedjono**, *Sejarah dan Azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Armico, Bandung, 1984.
- Faisal, Sanapiah**, *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasinya*, Malang, YA3, 1990.
- Gunakaya, A. Widiada**, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1988.
- Jacobs, Francis G.**, *Criminal Responsibility*, London School of Economics and Political Science, Weidenfeld and Nicholson, 5 winsley Street London W1.
- Hamzah, Andi**, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- , *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Hadisuprpto, Paulus**, *Hak-Hak Asasi Anak dan Implementasinya (Tinjauan Yuridis Sosiologis)*, Makalah, Pertemuan Ilmiah tentang "Kejahatan yang Dilakukan oleh Pelaku Usia Muda, Dewasa dan Penanggulangannya", BPHN, Jakarta, 1994.
- , *Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)*, Disertasi, UNDIP, Semarang, 2003.
- Harsono, C.I.**, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1995.

- Joni, Muhamad & Zulchaina Z. Tanamas**, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999.
- Kalmthout, Anton M. van, Peter J.P. Tak**, *Sanctions-Systems in The Member-States of The Council of Europe, deprivation of liberty, community service and other subtites*, Kluwer Law and Taxation Publisher, USA, 1988.
- Koesnoen, R.A.**, *Peradilan Anak di Negara-Negara yang Telah Maju*, Majalah Masalah-Masalah Hukum, FH-UNDIP.
- Kusumohamidjojo, Budiono**, *Ketertiban yang Adil, Problematik Filsafat Hukum*, PT. Gramedia, Jakarta, 1999.
- Kusumaatmadja, Mochtar**, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986.
- , *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasiona*, Binacipta, Bandung, 1986.
- Loqman, Loebby**, *Pidana dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta, 2002.
- Miller, Alden d., Lloyd E. Ohlin**, *Delinquency and Community, Creting opportunities and Controls*, Sage Publications, California, 1985.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief**, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1998.
- , *Bunga Rampai Hukum Pidana*, 1992
- Muladi**, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.
- , *Pelaksanaan Pidana Perampasan Kemerdekaan di Semarang*, Majalah Masalah-Masalah Hukum No. 3, UNDIP, Semarang, 1986.
- , *Diktat Kuliah Politik Kriminal*, UI, Jakarta, 1994.
- , *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- , *Perbandingan Sistem Pemidanaan dan Kemungkinan Aplikasinya di Indonesia*, Makalah pada Seminar Pembinaan Narapidana dalam Perspektif HAM, Jakarta, 13 Juli 1995.

- , *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP, Semarang, 2002.
- , *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2002.
- Nawawi Arief, Barda**, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- , *Kebijaksanaan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2000.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, 2001.
- , *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.
- , *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Packer**, *The Limits of Criminal Sanctions*, Stanford, California : Stanford University, 1968.
- Panjaitan, Petrus Irwan, Pandapotan Simorangkir**, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Prinst, Darwan**, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Rahardjo, Satjipto**, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- , *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980.
- Reksodiputro, B. Mardjono**, *Penanggulangan Kejahatan yang Dilakukan oleh Pelaku Usia Muda*, Makalah pada pertemuan ilmiah tentang “

- Penanggulangan Kejahatan yang Dilakukan oleh Anak Usia Muda", BPHN, Jakarta, 1994.
- Remmelink, Jan**, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Saleh, Roeslan**, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- Sahardjo**, *Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila Manipol Usdek*, Pidato Pengukuhan Gelar Doktor Honoris Causa di Fakultas Hukum UI, Jakarta, 5 Juli 1963.
- Sanusi, Badri dan Syafrudin**, *Mengenai dan Memahami Masalah Remaja*, Pustaka Antara, Jakarta, 1993.
- Scaffmeister, D.**, *Pidana Badan Singkat sebagai Pidana di Waktu Luang*, Terjemahan : Tristam Pascal Moeljono, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1981.
- Sianturi, S.R., Mompang L. Panggabean**, *Hukum Penintensia di Indonesia*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996.
- Soemitro, Ronny Hanitijo**, *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1984.
- , *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994.
- , *Suplemen Bahan Kuliah : Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang, 2001.
- Soekanto, Soerjono**, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press 1986.
- Soekito, Sri Widoyati Wiratmo**, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1989.
- Sisworahardjo, Suwantji**, *Services for Juvenile Delinquents in Indonesia*, makalah, tanpa tahun.
- Soedarto**, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, BAndung, 1981.
- , *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

-----, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Susanto, I.S., *Kriminologi*, Diktat Kuliah, FH-UNDIP, 1995.

Supramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.

Supriyadi, *Kebijakan Legislatif Mengenai Perlindungan Hukum Anak Dalam Proses Peradilan*, *Majalah Mimbar Hukum Fakultas Hukum UGM*, Edisi No. 42/X/2002.

Thomas, Charles W., *Corections in America, Problems of the Past and the Present*, Sage Publications, California, 1987.

Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002.

Warassih, Esmi, *Pemberdayaan MAsyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH-UNDIP, Semarang, April 2001.

Widiyanti, Ninik, Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Masalah Metodologi dalam Penelitian Hukum sehubungan dengan Masalah Keragaman Pendekatan Konseptualnya*, Makalah pada Pelatihan Metodologi Penelitian, FH. UNDIP, Mei, 1999.

Artikel :

Harian Pikiran Rakyat, *Nasib Anak-anak di Lampung yang Terpenjara*, Bandung, Selasa 13 Agustus 2002.

-----, *Pengadilan Konvensional, Bukan Cara Terbaik Atasi Anak Pelanggar Hukum*, Bandung, Jum'at 13 Februari 2004.

Office of Probation and Pretrial Services Administrative Office of the U.S. Court, Article, Januari 2003, <http://www.uscourt.gov/misc/2003-community.PDF>.

Hukumonline.com, *Hukum Pidana Nasional akan Mengenal Hukum Kerja Sosial*, 29 Desember 2003, <http://www.hukumonline.com>

- Hukumonline.com**, *Peranan BAPAS dalam Peradilan Anak Perlu Ditingkatkan*, 30 Desember 2003, <http://www.hukumonline.com>
- Hukumonline.com**, *Kriteria Penjatuhan Hukuman, Alasan-Alasan Penjatuhan Hukuman*, 31 Maret 2001, <http://www.hukumonline.com>
- Hukumonline.com**, *RUU KUHP BAru, Anak di Bawah Usia 12 Tahun Tidak Bisa Dihukum*, 10 November 2000, <http://www.hukumonline.com>
- Harian "Pikiran Rakyat"**, *Aparat Penegak Hukum Cenderung Menahan Anak*, Artikel, Surat Kabar, Bandung, 31 Desember 2003.
- Kompas**, *Hukuman Kerja Sosial Sudah Dicantumkan Dalam RUU KUHP*, Jakarta, <http://www.kompascyber.com>
- Mingguan "Seputar Semarang"**, *Menggelandang, Dihakimi Warga*, Artikel, Edisi 22 tahun I, Semarang, 13 – 19 Januari 2004.
- Bennett, Sherrie**, *Juvenile Crimes and Rehab*, <http://www.martindale-hubbell/lawyers.com>
- Bright, Christopher**, *Place the Heading Here, Community Service*, 1997, <http://www.prison-fellowship-internasional.com>
- Picquart, Jean-Marie**, *Community Service, the French Experience*, http://www.penalreform.org/english/altern_csfrance.htm.
- Santoso, Budi**, *Remisi Umum ke Remisi Khusus*, Artikel, Majalah PILARS, No. 33/Th.VI/24-30 November 2003.
- Vincentia Hanni, S.**, *"Kisah Anak-Anak di Lembaga Pemasyarakatan, "Seks, Sayur Basi dan Premanisme"*, <http://www.kompascyber.com>, 8 Oktober 2003.
- The Czech Penal Code, Recent Development*, <http://www.prison.org/english/altrec.htm>
- Community Service**, *Office of Probation and Pretrial Service Administrative Office of the U.S. Courts*, Januari, 2003, <http://www.uscourts.gov/misc/2003-community.PDF>

Peraturan-Peraturan :

***"Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa
Mengenai Administrasi Peradilan Remaja (Beijing Rules),***

Disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No. 40/33 tanggal 29
November 1985", UNICEF. (Terjemahan bahasa Indonesia)

Criminal Justice and Court Act 2000 (England), <http://www.UK-Acts.com/crowncopyright2000>

*A Bill to Provide for Community Service Orders as an Alternative to
Imprisonment, The Community Service Order Act 2001, enacted by
the Parliament of Mauritius, http://www.mauritius_penalcodes.com*

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Konvensi ILO No. 182
Mengenai Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-
Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Keppres No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN)
Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Konvensi PBB tentang Hak-Hak
Anak (*Convention on the Rights of the Child*)

Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

**Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Baru) Tahun 1999 -
2000**

Lainnya :

Fifth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment for Offender, "Report", New York: 1976, hal. 32 , Nomor : 256.

Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Laporan, BPHN, Dep-Keh, Jakarta, 1980.

Dictionary of Law, Oxford University Press, Market House Books Ltd, 1997.